

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah,  
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 /SEOJK.05/2021

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI  
SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan:

1. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107); dan
2. Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392),

perlu untuk mengatur ketentuan cakupan, bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, unit syariah pada perusahaan asuransi, dan unit syariah pada perusahaan reasuransi.

2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
4. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
7. Laporan Triwulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
8. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
9. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan yang disampaikan dalam periode tertentu.

## II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

1. Laporan Berkala Perusahaan terdiri atas:
  - a. Laporan Bulanan;
  - b. Laporan Triwulanan;
  - c. Laporan Tahunan; dan
  - d. Laporan Lain.

2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan terdiri atas:
  - a. aspek keuangan; dan
  - b. aspek manajemen.
3. Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, yaitu laporan keuangan tahunan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
4. Laporan keuangan tahunan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan laporan keuangan tahunan yang telah memperoleh pengesahan dari rapat umum pemegang saham (RUPS) atau yang setara.
5. Bentuk dan susunan Laporan Berkala Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) bagi perusahaan asuransi umum syariah dan Unit Syariah pada perusahaan asuransi umum adalah sebagaimana tercantum dalam format IA;
    - 2) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah pada perusahaan reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format I B; dan

- 3) bagi perusahaan asuransi jiwa syariah dan Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa adalah sebagaimana tercantum dalam format I C;
- b. bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bagi Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam format I D Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - c. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d bagi Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) untuk rencana bisnis sebagaimana tercantum dalam format II A;
    - 2) untuk laporan realisasi rencana bisnis termasuk laporan realisasi rencana bisnis adalah sebagaimana tercantum dalam format II B;
    - 3) untuk laporan pengawasan rencana bisnis adalah termasuk laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana tercantum dalam format II C;
    - 4) untuk laporan program reasuransi/retrosesi otomatis adalah sebagaimana tercantum dalam format II D;
    - 5) untuk laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen adalah sebagaimana tercantum dalam format II E;
    - 6) untuk laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam format II F;
    - 7) untuk laporan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam format II G;
    - 8) untuk laporan profil risiko terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam format II H;

- 9) untuk laporan kecukupan permodalan terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam format II I;
  - 10) untuk laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data nasabah adalah sebagaimana tercantum dalam format II J;
  - 11) untuk laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan adalah sebagaimana tercantum dalam format II K;
  - 12) laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik adalah sebagaimana tercantum dalam format III L;
  - 13) untuk hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam format III M;
  - 14) untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam format III N;
  - 15) untuk laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana tercantum dalam format III O; dan
  - 16) untuk ringkasan laporan keuangan triwulanan dan tahunan adalah sebagaimana tercantum dalam format III Q; dan
- d. bentuk dan susunan Laporan Lain yang berupa laporan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis bagi Unit Syariah pada perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, dan perusahaan asuransi jiwa disampaikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

### III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Perusahaan harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Perusahaan harus menyampaikan laporan secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
4. Dalam rangka penyampaian secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perusahaan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami gangguan teknis atau Perusahaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (daring), laporan disampaikan secara luar jaringan (luring) disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung berupa laporan baik dengan menggunakan media berupa *compact disk* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan ditujukan kepada:  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur IKNB Syariah  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  
Jakarta 12710.
6. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (luring) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkaladengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (daring) melalui:
    - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
    - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
  - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (luring), dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli dalam bentuk cetak Laporan Berkala yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

#### IV. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan setelah tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.05/2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah;
  - b. Lampiran II dan Lampiran IV dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Pelaksanaan Penempatan Reasuransi/Retrosesi; dan
  - c. Angka romawi III Nomor 4 huruf a dan Lampiran II dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen

Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 /SEOJK.05/2021  
TENTANG  
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA  
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH  
DAN UNIT SYARIAH

K e p a d a

**Yth. Direktorat IKNB Syariah**

Otoritas Jasa Keuangan

Wisma Mulia 2

Jakarta - 12710

**LAPORAN TAHUNAN  
USAHA ASURANSI UMUM SYARIAH  
Bulan Januari Tahun 1900**

---

---

---

---

No.	Nama Sheet	Nama Form
1	DATA UMUM	
2	COVER	
3	VALIDASI	
4	THPPUSY	Profil Perusahaan
5	THPPSAUSY	Rincian Pemegang Saham
6	THPPUAUS	Rincian Pihak Utama
7	THRPPAUS-1	Rincian Pendidikan Dan Pelatihan
8		Profil Produk
9		Profil Kacab Kanwil
10	THLPKSY	Laporan Posisi Keuangan
11	THLKKUS	Laporan Kinerja Keuangan
12	THLAKSY	Perhitungan Arus Kas
13	THLPDS	Laporan Perubahan Dana
14	THSAP	Analisis Perhitungan Aset Dan Liabilitas Sap
15	THRPTSAUS	Pencapaian Tingkat Solvabilitas
16	THRIKSTSU	Rasio Selain Tingkat Solvabilitas
17	THRKUS	Modal Minimum Berbasis Risiko Dan Dana Tabarru Minimum Berbasis Risiko
18	THRRKAUS	Risiko Kredit
19	THRKRAUS	Risiko Kredit - Risiko Kegagalan Atau Ketidakmampuan Debitur Atau Pihak Lain
20	THRKLAUS	Risiko Kredit - Kegagalan/Ketidakmampuan Penanggung Ulang
21	THRPSYA	Risiko Likuiditas
22	THRPAS	Risiko Pasar
23	THRPSB	Risiko Pasar - Perubahan Harga Pasar
24	THRPSC	Risiko Pasar - Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
25	THRSAS	Risiko Pasar - Risiko Perubahan Tingkat Hasil Investasi
26	THRSAS1	Risiko Asuransi
27	THRSAS2	Risiko Asuransi - Penyisihan Kontribusi
28	THRSAS3	Risiko Asuransi - Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
29	THRSAS4	Risiko Asuransi - Penyisihan Klaim
30	THRSOS	Risiko Asuransi - Penyisihan Atas Risiko Bencana
31	THRA110	Risiko Operasional
32	THRA120	Rincian Investasi Dan Property
33	THRA130	Rincian Tagihan
34	THRA210	Rincian Aset Lain
35	THRA220	Rincian Utang
36	THRA221	Penyisihan Ujroh, Penyisihan Kontribusi, Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
37	THRA222	Penyisihan Klaim
38	THRA310	Penyisihan Atas Risiko Bencana (Catastrophic Risk)
39		Rincian Rekapitulasi Aset Dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang Dan Umur Jatuh Tempo
40		Rincian Kontribusi
41		Rincian Klaim
42		Rincian Polis
43		Rincian Penyisihan
44	THRC110	Laporan Risiko Asuransi Bencana Alam
45	THRD110	Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan Dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan
46	THRD120	Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi
47	THRF110	Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro
48		Rincian Reasuransi Keluar
49		Pelaksanaan Seleksi Dan Akuntabilitas Saluran Pemasaran
50		Evaluasi Kinerja Produk bulanan
51		Evaluasi Kinerja Produk tahunan

<b>Data Umum</b>	
<b>Versi Laporan</b>	<b>4/30/2020 11:34:50 AM</b>
<b>Tanggal Pelaporan</b>	
<b>Kode Perusahaan / Pihak</b>	
<b>Nama Perusahaan / Pihak</b>	
<b>Alamat Perusahaan / Pihak</b>	
<b>Periode Pelaporan</b>	
<b>Bulan Pelaporan</b>	<b>Januari</b>
<b>Tahun Fiskal</b>	
<b>Jenis Periode Pelaporan</b>	<b>Laporan Tahunan</b>
<b>Nama Direksi / Penanggung Jawab</b>	
<b>Jabatan Direksi / Penanggung Jawab</b>	

## Profil Perusahaan

Per 31-Jan-1900

	Keterangan
Nama Perusahaan	
Alamat Lengkap	
DATI I (Provinsi)	
DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	
Telepon	
Fax	
E-mail	
NPWP	
No. Izin Usaha	
Tanggal Izin Usaha	
Single Investor Identification (SID)	
Jumlah Cabang/Perwakilan	
Jumlah Tenaga Kerja	
Jumlah Peserta	
Auditor Eksternal	
Pengendali	
PIC Laporan Keuangan	
Penyusun Laporan	
Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Extention	
Fax	
Email	
Penanggung Jawab Direksi	
Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Extention	
Fax	
E-mail	

Rincian Pemegang Saham

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama Pemegang Saham	Induk Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kelompok	Tingkat Derajat Kepemilikan	Jenis Pemegang Saham (Kode Counterparty)	Kode Lokasi (Negara)	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Rating Badan Hukum	Lembaga Pemeringkat	Ekuitas	Periode Ekuitas	Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Rincian Pihak Utama

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Rincian Pendidikan dan Pelatihan

Per 31-Jan-1900

(dalam iutaan rupiah)

Nomor Baris	Uraian	Jenis Peserta Diklat	Realisasi
		(Pegawai/Direksi/Komisaris/ DPS)	
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
14			-
15			-
16			-
17			-
18			-
19			-
20			-
21			-
22			-
23			-
24			-
25			-
26			-
27			-
28			-
29			-
30			-
31			-
32			-
33			-
34			-
35			-
36			-
37			-
38			-
39			-
40			-
41			-
42			-
43			-
44			-
45			-
46			-
47			-
48			-
49			-
50			-



RINCIAN PROFIL PRODUK

Kode Produk dari Perusahaan (Unique untuk semua field di profil produk ini)	Nama Produk	Status Produk	Kode Saluran Pemasaran	Media Pemasaran	Kode Mata Uang	Tanggal Izin Produk	Nomor Persetujuan / Pencatatan Produk di OJK	Kode Lini Usaha	Produk Investasi (Ya/ Tidak)	Asumsi*				Realisasi*				Dukungan Reasuransi	Dampak deviasi terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi (jika ada)	Estimasi Profit /Loss*	Metode Perhitungan Estimasi*	Keterangan				
										Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)	Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)							Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)		

PROFIL CABANG / PERWAKILAN

Nama Cabang	No Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Jenis Kantor Cabang/Perwakilan	Nama Pemimpin Kantor	Alamat	Lokasi (DT II)	Latitude	Longitude	No. Telp	No. Email



## Laporan Kinerja Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Investasi Peserta					
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Akad Wakalah Bil Ujah	Akad Mudharabah	Penyesuaian	Gabungan
<b>PENDAPATAN</b>						-
<b>PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI</b>						-
Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>						-
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi						-
a. Alokasi Kontribusi Langsung: Tabarru'/Ujroh/Investasi	-	-	-	-	-	-
b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung: Tabarru'/Ujroh	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Untuk Investasi	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP						-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>	-	-	-	-	-	-
<b>BEBAN</b>						-
<b>BEBAN UNDERWRITING</b>						-
Beban Klaim						-
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-	-	-	-
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN UNDERWRITING</b>	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>	-	-	-	-	-	-
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-
<b>BEBAN USAHA:</b>						-
a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-
c. Beban Umum dan Administrasi:	-	-	-	-	-	-
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-	-	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>LABA (RUGI) USAHA ASURANSI</b>	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset						-
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	-	-	-	-	-	-
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KINERJA SELURUH DANA</b>	-	-	-	-	-	-

Laporan Arus Kas  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian			Dana Investasi Peserta ☒		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Gabungan
SALDO AWAL	-	-	-	-	-
PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS	-	-	-	-	-
SALDO AKHIR KAS	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Kontribusi Para Peserta	-	-	-	-	-
Ujroh yang diterima	-	-	-	-	-
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'	-	-	-	-	-
Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-
Klaim Reasuransi Diterima	-	-	-	-	-
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi	-	-	-	-	-
Lain - Lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Klaim Dibayar	-	-	-	-	-
Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-
Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis	-	-	-	-	-
Beban Akuisisi	-	-	-	-	-
Beban Pemasaran	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Reasuransi	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Asuransi	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi Dibayar	-	-	-	-	-
Pembayaran Sewa	-	-	-	-	-
Pembayaran Zakat	-	-	-	-	-
Pembayaran Pajak	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Penerimaan Hasil Investasi	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabarru'	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta	-	-	-	-	-
Pencairan Investasi	-	-	-	-	-
Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Penempatan Investasi	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembelian Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Setoran Modal/Modal Kerja	-	-	-	-	-
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-
Penerimaan Qardh	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-
Pembayaran Dividen	-	-	-	-	-
Pembayaran Qardh	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-

## LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Investasi Peserta		Gabungan
			Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
I. Saldo Dana Awal	-	-		-	-
II. Penambahan	-	-		-	-
Modal Disetor	-	-		-	-
Laba komprehensif periode berjalan	-	-		-	-
Kenaikan akumulasi dana tabarru'/dana investasi peserta	-	-		-	-
Penambahan lainnya	-	-		-	-
III. Pengurangan	-	-		-	-
Rugi komprehensif periode berjalan	-	-		-	-
Penurunan akumulasi dana tabarru' / dana investasi	-	-		-	-
Pembayaran Deviden	-	-		-	-
Pengurangan lainnya	-	-		-	-
IV. Saldo Akhir Dana	-	-		-	-



Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	AYD Setelah Batasan Luar Negeri (Saldo SAP)	Aset PAYDI Digaransi
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Kontribusi Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH ASET (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	
Utang	-	-	-					
Penyisihan Kontribusi	-	-	-					
Penyisihan Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PKYBMP)	-	-	-					
Penyisihan Klaim	-	-	-					
Penyisihan atas Risiko Bencana (Catastrophic Risks)	-	-	-					
Jumlah Liabilitas	-	-	-					
DANA INVESTASI PESERTA								
I. Investasi	-	-	-					-
Deposito	-	-	-					-
Sertifikat Deposito	-	-	-					-
Saham Syariah	-	-	-					-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-					-
MTN Syariah	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-					-
Reksa Dana Syariah	-	-	-					-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-					-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-					-
REPO	-	-	-					-
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-					-
Emas Murni	-	-	-					-
Sukuk Daerah	-	-	-					-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-					-
Investasi Lain	-	-	-					-
Jumlah Investasi	-	-	-					-
II. Bukan Investasi	-	-	-					-
Kas dan Bank	-	-	-					-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-					-
Tagihan Investasi	-	-	-					-
Aset Lain	-	-	-					-
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-					-
JUMLAH KEKAYAAN ( I + II )	-	-	-					-
Utang	-	-	-					
Akumulasi Dana Investasi Peserta	-	-	-					
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-					
JUMLAH LIABILITAS	-	-	-					



RASIO KEUANGAN  
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	-
B. Liabilitas, selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	-
DTMBR/MMBR	-	-
A. Risiko Kredit	-	-
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	-
F. MMBR atas PAYDI Digaransi	-	-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	0,00%	0,00%
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)	0,00%	0,00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentasi sesuai POJK 72)	0,00%	0,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru	-	-
A. kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidacukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	0,00%	0,00%

RASIO KEUANGAN  
SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Indikator			
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				-
A. Kekayaan lancar	-	-	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				-
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-	-
B. Penyisihan teknis retensi sendiri	-	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	0,00%	-	-	0,00%
Aset yang Diperhitungkan Untuk Qardh pada Dana Perusahaan				
D. Rasio [a:(b+c)] setelah penambahan				
Rasio Pendapatan investasi neto				-
A. Pendapatan investasi netto	-	-	-	-
B. Rata-rata investasi	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio beban klaim				-
A. Beban klaim netto	-	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	-	-	0,00%
Rasio perubahan dana				-
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	-	-	-
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	-	-	-
C. Perubahan dana (a-b)	-	-	-	-
D. Rasio (c:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset Unit Syariah				-
A. Aset Dana Tabarru	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru				-
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Biaya Pegawai dan Pengurus				
Biaya Pendidikan dan Pelatihan				
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO KREDIT  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Risiko Kredit (a)	-	-	-
Risiko Kredit (b)	-	-	-
Total Risiko Kredit	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD			Faktor	Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)		Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,20%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,10%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,50%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,00%	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,2%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,1%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,5%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,0%	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	1,00%	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain*	-	-	-	-	-	-	-
a.Sangat sehat	-	-	-	1,60%	-	-	-
b.Sehat	-	-	-	2,80%	-	-	-
c.Kurang sehat	-	-	-	4,00%	-	-	-
d.Tidak sehat	-	-	-	6,00%	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-
Properti residensial	-	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	4,00%	-	-	-
Properti komersial lainnya	-	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	5,60%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	8,00%	-	-	-
Properti yang tidak digunakan	-	-	-	12,00%	-	-	-
Sukuk daerah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat Klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat Klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat Klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD			Faktor	Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)		Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
d. Peringkat Klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat Klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	8,00%	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
a. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang (dicharge dalam	-	-	-	-	-	-	-
b. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang program reasuransi dukungan modal (capital oriented reinsurance)	-	-	-	30,00%	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Peringkat Klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
Peringkat Klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
a. Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	-	-	-	2,00%	-	-	-
b. Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh	-	-	-	25,00%	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	2,00%	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kode Jenis Reasuradur	Tipe Reasuransi	Penyisihan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan atau Kontribusi yang ditahandi Perusahaan	Eksposur Reasuransi Netto ((G)-(H))	Faktor	Jumlah Deviasi
1	-	Reasuransi Otomatis (Treaty)	-	-	-	0,00%	-
2	-	-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
3	-	- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
4	-	- Surplus	-	-	-	0,00%	-
5	-	- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
6	-	- Cath X/L	-	-	-	0,00%	-
7	-	- Work X/L	-	-	-	0,00%	-
8	-	Reasuransi Fakultatif	-	-	-	0,00%	-
9	-	-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
10	-	- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
11	-	- Surplus	-	-	-	0,00%	-
12	-	- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
13	-		-	-	-	0,00%	-
14	-		-	-	-	0,00%	-
15	-		-	-	-	0,00%	-
16	-		-	-	-	0,00%	-
17	-		-	-	-	0,00%	-
18	-		-	-	-	0,00%	-
19	-		-	-	-	0,00%	-
20	-		-	-	-	0,00%	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO LIKUIDITAS  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan						Dana Tabarru'						PAYDI (digaransi)					
	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah
<b>Aset</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi/ujroh Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi/ujroh Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Klaim atau manfaat investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Utang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana Investasi Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SELISIH LIABILITAS DAN ASET</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVIASI (4% X (Maks (Li - AYDI), 0))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO PASAR  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi			Total
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru	PAYDI (digaransi)	
Risiko Pasar (A)	-	-	-	-
Risiko Pasar (B)	-	-	-	-
Risiko Pasar (C)	-	-	-	-
Total Risiko Pasar	-	-	-	-









MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian		Dana Tabarru'
PKrf		-
PKo		-
Max((PKrf-PKo),0)		-
PUrf	-	
PUo	-	
Max((PUrf-PUo),0)	-	
fPTB	15,00%	15,00%
PTPI	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU  
RISIKO ASURANSI  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-
II. Total ((PAKYBMPi - ARi)fpki	-
III. Total ((PKli - ARi)fpkli)	-
IV. Total ((PRBi - ARi)fpbi)	-
Total Deviasi	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	PK	PK*	Jumlah Deviasi
Harta Benda (Property)	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-
Satelit	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-
Aneka	-	-	-
Kesehatan	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-
Total max ((PK* - PK), 0)	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	PAKYBMP	AR	fpk	Jumlah Deviasi PAKYBMP
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	25%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-
Satelit	-	-	25%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-
Kredit (Credit)	-	-	30%	-
Aneka	-	-	25%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total ((PAKYBMPi - ARi)fpbi + (PKi -	-	-		-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	Penyisihan Klaim	AR	fpk	Jumlah Deviasi Penyisihan Klaim((2) - (3)) x (4)
Harta Benda (Property)	-	-	20%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	20%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	25%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	25%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	25%	-
Satelit	-	-	20%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	20%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	30%	-
Aneka	-	-	20%	-
Kesehatan	-	-	20%	-
Kecelakaan Diri	-	-	20%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total	-	-	-	-



MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	Penyisihan Risiko Bencana	AR	fpk	Jumlah Deviasi Penyisihan Risiko Bencana ((2) - (3)) x
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	25%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-
Satelit	-	-	25%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-
Aneka	-	-	25%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO OPERASIONAL  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Risiko Operasional Perusahaan		
a. Beban Umum dan Administrasi	-	-
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-
c. Risiko Operasional = $(1\% * (a-b))$	-	-
d. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-
e. Risiko Operasional = $(50\% * d)$	-	-
f. Sub Total Risiko Operasional Perusahaan (c+e)	-	-
Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)		
g. Aset Dana PAYDI	-	-
h. Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI = $(1\% * g)$ )	-	-
Risiko Operasional Dana Tabarru' (RODT)		
i. Investasi Dana Tabarru'	-	-
j. Sub Total RODT = $(1\% * i)$	-	-
Total Deviasi (f+h+j)	-	-





RINCIAN A-120. Rincian Tagihan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Debitur	Kode Kategori Usaha / Kategori Debitur	Kode Jenis Tagihan	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Mulai	Kode Mata Uang	Kode Peringkat Debitur	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)	AYD (Juta Rp)
1		-	-	-		-	-	-	-	-
2		-	-	-		-	-	-	-	-
3		-	-	-		-	-	-	-	-
4		-	-	-		-	-	-	-	-
5		-	-	-		-	-	-	-	-
6		-	-	-		-	-	-	-	-
7		-	-	-		-	-	-	-	-
8		-	-	-		-	-	-	-	-
9		-	-	-		-	-	-	-	-
10		-	-	-		-	-	-	-	-
11		-	-	-		-	-	-	-	-
12		-	-	-		-	-	-	-	-
13		-	-	-		-	-	-	-	-
14		-	-	-		-	-	-	-	-
15		-	-	-		-	-	-	-	-
16		-	-	-		-	-	-	-	-
17		-	-	-		-	-	-	-	-
18		-	-	-		-	-	-	-	-
19		-	-	-		-	-	-	-	-
20		-	-	-		-	-	-	-	-
21		-	-	-		-	-	-	-	-
22		-	-	-		-	-	-	-	-
23		-	-	-		-	-	-	-	-
24		-	-	-		-	-	-	-	-
25		-	-	-		-	-	-	-	-
26		-	-	-		-	-	-	-	-
27		-	-	-		-	-	-	-	-
28		-	-	-		-	-	-	-	-
29		-	-	-		-	-	-	-	-
30		-	-	-		-	-	-	-	-
31		-	-	-		-	-	-	-	-
32		-	-	-		-	-	-	-	-
33		-	-	-		-	-	-	-	-
34		-	-	-		-	-	-	-	-
35		-	-	-		-	-	-	-	-
36		-	-	-		-	-	-	-	-
37		-	-	-		-	-	-	-	-
38		-	-	-		-	-	-	-	-
39		-	-	-		-	-	-	-	-
40		-	-	-		-	-	-	-	-
41		-	-	-		-	-	-	-	-
42		-	-	-		-	-	-	-	-
43		-	-	-		-	-	-	-	-
44		-	-	-		-	-	-	-	-
45		-	-	-		-	-	-	-	-
46		-	-	-		-	-	-	-	-
47		-	-	-		-	-	-	-	-
48		-	-	-		-	-	-	-	-
49		-	-	-		-	-	-	-	-
50		-	-	-		-	-	-	-	-

RINCIAN A-130. Rincian Aset Lain

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Aset	Dasar Penilaian	Kode Jenis Dana	Nilai Pasar / Appraisal	Saldo Juta (Rp)	Keterangan
1		-	-	-	-	
2		-	-	-	-	
3		-	-	-	-	
4		-	-	-	-	
5		-	-	-	-	
6		-	-	-	-	
7		-	-	-	-	
8		-	-	-	-	
9		-	-	-	-	
10		-	-	-	-	
11		-	-	-	-	
12		-	-	-	-	
13		-	-	-	-	
14		-	-	-	-	
15		-	-	-	-	
16		-	-	-	-	
17		-	-	-	-	
18		-	-	-	-	
19		-	-	-	-	
20		-	-	-	-	
21		-	-	-	-	
22		-	-	-	-	
23		-	-	-	-	
24		-	-	-	-	
25		-	-	-	-	
26		-	-	-	-	
27		-	-	-	-	
28		-	-	-	-	
29		-	-	-	-	
30		-	-	-	-	
31		-	-	-	-	
32		-	-	-	-	
33		-	-	-	-	
34		-	-	-	-	
35		-	-	-	-	
36		-	-	-	-	
37		-	-	-	-	
38		-	-	-	-	
39		-	-	-	-	
40		-	-	-	-	
41		-	-	-	-	
42		-	-	-	-	
43		-	-	-	-	
44		-	-	-	-	
45		-	-	-	-	
46		-	-	-	-	
47		-	-	-	-	
48		-	-	-	-	
49		-	-	-	-	
50		-	-	-	-	

RINCIAN A-210. Rincian Utang

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama	Kode Jenis Utang	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Periode Mulai	Kode Mata Uang	Kode Negara	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)
1		-	-		-	-	-	-
2		-	-		-	-	-	-
3		-	-		-	-	-	-
4		-	-		-	-	-	-
5		-	-		-	-	-	-
6		-	-		-	-	-	-
7		-	-		-	-	-	-
8		-	-		-	-	-	-
9		-	-		-	-	-	-
10		-	-		-	-	-	-
11		-	-		-	-	-	-
12		-	-		-	-	-	-
13		-	-		-	-	-	-
14		-	-		-	-	-	-
15		-	-		-	-	-	-
16		-	-		-	-	-	-
17		-	-		-	-	-	-
18		-	-		-	-	-	-
19		-	-		-	-	-	-
20		-	-		-	-	-	-
21		-	-		-	-	-	-
22		-	-		-	-	-	-
23		-	-		-	-	-	-
24		-	-		-	-	-	-
25		-	-		-	-	-	-
26		-	-		-	-	-	-
27		-	-		-	-	-	-
28		-	-		-	-	-	-
29		-	-		-	-	-	-
30		-	-		-	-	-	-
31		-	-		-	-	-	-
32		-	-		-	-	-	-
33		-	-		-	-	-	-
34		-	-		-	-	-	-
35		-	-		-	-	-	-
36		-	-		-	-	-	-
37		-	-		-	-	-	-
38		-	-		-	-	-	-
39		-	-		-	-	-	-
40		-	-		-	-	-	-
41		-	-		-	-	-	-
42		-	-		-	-	-	-
43		-	-		-	-	-	-
44		-	-		-	-	-	-
45		-	-		-	-	-	-
46		-	-		-	-	-	-
47		-	-		-	-	-	-
48		-	-		-	-	-	-
49		-	-		-	-	-	-
50		-	-		-	-	-	-





RINCIAN A-221.  
 Penyisihan KLAIM  
 Per 31-Jan-1900

Cabang Asuransi	Dana Tabarru			
	Penyisihan Klaim Dalam Proses	Penyisihan Klaim IBNR	Penyisihan Klaim Pembayaran Berkala	Jumlah Penyisihan Klaim
Harta Benda (Property)	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

RINCIAN A-222  
Penyisihan Risiko Bencana  
Per 31-Jan-1900

Cabang Asuransi	Dana Tabarru <sup>2</sup>	
	Retensi Sendiri	Reasuransi
Harta Benda (Property)	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-
Satelit	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-
Kecelakaan Diri	-	-
Kesehatan	-	-
Kredit (Credit)	-	-
Suretyship	-	-
Aneka	-	-
Jiwa*)	-	-
Total II	-	-







RINCIAN POLIS

Kode Produk	Kode Polis Tradisional /PAYDI	Kode Jenis Polis	Kode Cara Bayar	Kode Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Counterparty Pemegang Polis	Status (Aktif/Non Aktif)	Kode Inforce/Not Inforce	Jumlah Polis	Jumlah Peserta	Jumlah Manfaat Asuransi Syariah (Jutaan Rp)
								Peserta Lanjutan			
								Peserta Baru			
								Pemulihan Kembali Kepesertaan			
								Perubahan Dari Lini Asuransi Lain			
								Peserta Meninggal Dunia			
								Kepesertaan Habis Kontrak			
								Pemutusan Kontrak Produk Yang Dihasilkan Pada Tahun Bersangkutan			
								Perubahan Ke Lini Asuransi Lain			

### RINCIAN PENYISIHAN

Kode Produk	Penyisihan Teknis*				
	Penyisihan Kontribusi (Rp)	Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan (Rp)	Penyisihan Ujroh (Rp)	Penyisihan Klaim/Manfaat Dalam Proses (Rp)	Jumlah Polis

No.

**Laporan Risiko Asuransi Bencana Alam  
YYYY  
(Nama Perusahaan)**

dalam jutaan rupiah

Provinsi *)	Kode Okupasi **)	Jumlah Risiko	Kontribusi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Total

\*) Mengikuti Provinsi dalam Zona Asuransi Gempa Bumi di SEOJK tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor

\*\*\*) Mengikuti Kode Okupasi di SEOJK tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor



C-110. LAPORAN DANA JAMINAN  
Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan  
Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah
<b>1. Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan</b>	
Saldo Awal Dana Jaminan	-
<b>Penempatan Dana Jaminan Baru:</b>	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
<b>Total Penempatan Dana Jaminan Baru (3 + 4)</b>	-
<b>Pencairan Dana Jaminan:</b>	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
<b>Total pencairan Dana Jaminan (7 + 8)</b>	-
<b>Saldo Akhir Dana Jaminan (1 + 5 – 9)</b>	-
<b>2. Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan Tahunan</b>	
Ekuitas minimum yang dipersyaratkan	-
Jumlah Kontribusi neto*)	-
Jumlah Kontribusi reasuransi*)	-
Jumlah Penyisihan atas PAYDI yang digaransi	-
Batas Minimum Dana Jaminan I (20% x 1)	-
Batas Minimum Dana Jaminan II ((1% x 2) + (0,25% x 3) + (2% x 4))	-
Batas Minimum Dana Jaminan Yang Digunakan ( Nilai antara 5 dan 6 mana yang lebih besar)	-
Dana Jaminan Yang Dimiliki	-
<b>Kelebihan (Kekurangan) Dana Jaminan (8 - 7)</b>	-



RINCIAN D-120. Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Jenis Saluran Pemasaran		Wilayah Pemasaran		Pemasar Badan Hukum		Jumlah Pemasar Perorangan	Nama Produk Yang Dipasarkan	Jumlah Peserta	Kontribusi Bruto (Rp)
	Jenis Saluran Pemasaran	Wilayah Pemasaran	Kategori Badan Hukum	Jumlah Badan Hukum						
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN F-110. Reasuransi Keluar  
 Usaha Asuransi Syariah  
 Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Kode Lini Usaha	Kode Jenis Polis	Dalam Negeri			Dalam Dalam Negeri Surplus Underwriting dari Reasuradur	ASEAN			NON-ASEAN					
			Kontribusi kepada Reasuradur	Ujroh kepada Reasuradur	Claim Recovery		Kontribusi Dibayar	Ujroh Diterima	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur	Kontribusi Dibayar	Ujroh Diterima	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

No.

**Pelaksanaan Seleksi dan Akuntabilitas Saluran Pemasaran (Triwulanan)**

Periode pelaksanaan \*):

Kategori Saluran Pemasaran <sup>1)</sup>	Jumlah Pihak yang Diseleksi <sup>2)</sup>	Jumlah Pihak Baru <sup>3)</sup>	Jumlah Pihak yang Mengikuti Pelatihan <sup>4)</sup>	Jumlah Pihak yang Lulus Pelatihan <sup>5)</sup>	Jumlah Pihak yang Mengikuti Ujian Sertifikasi Pemasar <sup>6)</sup>	Jumlah Pihak yang Lulus Sertifikasi Pemasar <sup>7)</sup>	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi Produk yang Dievaluasi (RIPLAY) <sup>8)</sup>	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi Produk yang Diperbaiki <sup>9)</sup>	Jumlah Pemasar yang Dilakukan Evaluasi <sup>10)</sup>	Jumlah Pemasar yang Diberhentikan <sup>11)</sup>

Petunjuk pengisian:

\*) Diisi waktu pelaksanaan seleksi: Triwulan 1 (1 Januari-31 Maret), Triwulan 2 (1 April-30 Juni), Triwulan 3 (1 Juli-30 September), atau Triwulan 4 (1 Oktober-31 Desember)

1) Diisi dengan saluran pemasaran yang dievaluasi: direct marketing, agen Asuransi, bank, BUSB, atau tenaga Pemasar

2) Diisi jumlah orang yang diseleksi sesuai periode pelaksanaan

3) Diisi jumlah orang yang baru direkrut Perusahaan dari proses seleksi sesuai periode pelaksanaan

4) Diisi jumlah orang yang mengikuti pelatihan sesuai periode pelaksanaan

5) Diisi jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan lulus dalam pelatihan tersebut sesuai periode pelaksanaan

6) Diisi jumlah orang yang mengikuti ujian sertifikasi keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian sesuai periode pelaksanaan

7) Diisi jumlah orang yang lulus ujian sertifikasi keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian sesuai periode pelaksanaan

8) Diisi jumlah materi pemasaran dan RIPLAY yang dievaluasi apakah sesuai dengan yang ditetapkan atau disetujui Perusahaan sesuai periode pelaksanaan

9) Diisi jumlah materi pemasaran dan RIPLAY yang diperbaiki dan disesuaikan dengan persetujuan Perusahaan sesuai periode pelaksanaan

10) Diisi jumlah orang yang dievaluasi Perusahaan, misalnya kesesuaian pihak pemasar dalam menyampaikan informasi, kepatuhan terhadap perjanjian, dll sesuai periode pelaksanaan

11) Diisi jumlah orang yang diberhentikan Perusahaan karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama dan ketentuan yang berlaku sesuai periode pelaksanaan

No.	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
	Nama Subdana	Mata Uang	Kurs	NAB	NAB/Unit	Hasil Investasi Tahunan	Hasil Investasi Benchmark	SHARPE Ratio

- i Nama Subdana PAYDI
- ii Mata uang yang digunakan Subdana PAYDI
- iii Kurs yang digunakan pada saat pelaporan, menggunakan kurs tengah BI (dalam rupiah)
- iv Nilai Aset Bersih (dalam mata uang Subdana PAYDI)
- v Nilai Aset Bersih / jumlah unit, hanya diisi oleh PAYDI berbentuk unit (dalam mata uang Subdana PAYDI)
- vi Hasil investasi Subdana PAYDI satu tahun terakhir (dalam %)
- vii Hasil investasi acuan yang ditetapkan perusahaan pada waktu pembuatan Subdana PAYDI, selama satu tahun terakhir (dalam %)
- viii (Hasil investasi Tahunan - Risk Free Rate) / Standar Deviasi hasil investasi subdana PAYDI; Risk free rate menggunakan tingkat bunga bank umum yang dijamin LPS.

2. Rincian Investasi Subdana PAYDI

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv
Keterangan Akun	Nama Subdana	Status Aset	Jenis Investasi	Dalam/Luar Negeri	Mata Uang	Kurs	Kode (Counterparty)	Nama (Counterparty)	Apakah Counterparty Terafiliasi dengan Perusahaan? (Ya/Tidak)	Nomor Seri	Kategori	Sektor Ekonomi	Nama Manajer Investasi (Mi)
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total													

i	xv	xvi	xvii	xviii	xix	xx	xxi	xxii	xxiii	xxiv	xxv	xxvi	xxvii
Keterangan Akun	Peringkat	Klaster	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Gram)	Saldo	% NAB Subdana	Saldo Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Target Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Hasil Investasi	Keterangan
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total													

i Diisi dengan nama portofolio investasi pada subdana PAYDI  
 ii Nama Subdana PAYDI

iii Diisi dengan status aset berdasarkan peruntukannya, yaitu "Aset Subdana PAYDI Non Garansi", "Aset Subdana PAYDI Garansi", "Aset Back Up Subdana PAYDI Garansi". Yang dimaksud dengan aset back-up adalah aset perusahaan yang disediakan untukantisipasi penambahan Subdana PAYDI digaransi.

vi Diisi dengan mata uang aset investasi.

vii Diisi dengan kurs tengah Bank Indonesia dari mata uang aset investasi pada tanggal laporan.

x Diisi "Ya" atau "Tidak". Definisi hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 71/2016 dan POJK 72/2016.

xxii Diisi persentase masing-masing underlying aset dari NAB Subdana PAYDI

xxv Diisi target hasil investasi tahunan untuk masing-masing underlying aset, dalam persentase.

xxvi Diisi hasil investasi tahunan untuk masing-masing underlying aset, dalam persentase.

3. Ketersediaan Aset untuk PAYDI yang Digaransi

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
Karakteristik Garansi yang Diberikan									
Nama Subdana	Jenis Garansi yang Diberikan	Mata Uang	Kurs	Asumsi / Target Tingkat Hasil Investasi	Jumlah Peserta	Aset	Liabilitas atas Subdana yang Digaransi	Rata-rata Penambahan Subdana PAYDI Garansi Bulanan	Estimasi Kebutuhan Aset Back-Up Subdana PAYDI Digaransi 1 Bulan Kedepan
Total									

- i Diisi nama Subdana PAYDI
- ii Diisi jenis garansi yang diberikan, misalnya garansi tingkat hasil investasi, garansi pokok investasi.
- iii Diisi mata uang Subdana PAYDI
- iv Diisi kurs mata uang Subdana PAYDI
- v Diisi asumsi tingkat hasil investasi untuk memenuhi garansi yang diberikan.
- vi Diisi jumlah peserta yang memiliki Subdana PAYDI
- vii Diisi total aset Subdana PAYDI yang digaransi.
- viii Diisi total liabilitas pada PAYDI yang digaransi, untuk bagian manfaat investasi (nilai tunai) setelah memperhitungkan garansi yang diberikan.
- ix Diisi rata-rata penambahan Subdana PAYDI Garansi secara bulanan.
- x Diisi estimasi kebutuhan Aset Back-Up Subdana PAYDI Digaransi dalam 1 bulan yang akan datang.





No	Kolom	Petunjuk Pengisian
1	Nama Produk	Diisi dengan nama produk yang mendapatkan izin dari OJK
2	Kode Produk	Diisi dengan kode produk yang dibuat oleh perusahaan, kode produk ini tidak boleh berubah
3	Status Produk	Diisi dengan pilihan berupa produk baru, produk masih dijual, dan produk sudah tidak dijual
4	Kanal Distribusi	Diisi dengan <b>kode</b> saluran pemasaran produk yaitu: <b>1201</b> Direct <b>1202</b> Agency <b>1203</b> Bancassurance <b>1204</b> Badan Usaha Selain Bank - Agen Laku Pandai <b>1205</b> Badan Usaha Selain Bank - Selain Agen Laku Pandai <b>1206</b> Tenaga Pemasar (Mikro) - Agen Laku Pandai <b>1207</b> Tenaga Pemasar (Mikro) - Selain Agen Laku Pandai
5	Tanggal Izin Produk	Diisi dengan tanggal persetujuan OJK atas produk tersebut
6	Lini Usaha	Diisi dengan salah satu <b>kode</b> dari lini usaha asuransi umum sebagai berikut: <b>1101</b> Harta Benda (Property) <b>1102</b> Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident) <b>1103</b> Pengangkutan (Marine Cargo) <b>1104</b> Rangka Kapal (Marine Hull) <b>1105</b> Rangka Pesawat (Aviation Hull) <b>1106</b> Satelit <b>1107</b> Energi Onshore (Oil and Gas) <b>1108</b> Energi Offshore (Oil and Gas) <b>1109</b> Rekayasa (Engineering) <b>1110</b> Tanggung Gugat (Liability) <b>1111</b> Kredit (Credit) <b>1112</b> Aneka <b>1113</b> Kesehatan <b>1114</b> Kecelakaan Diri
7	Estimasi Profit/Loss	Diisi dengan pilihan hasil estimasi berupa "Profit" atau "Loss" berdasarkan metode perhitungan estimasi
8	Metode Perhitungan Estimasi	Diisi dengan pilihan metode perhitungan estimasi yaitu Profit Testing, Embedded Value, Value of New Business, dan
9	Kontribusi - Jumlah Kontribusi (Rp)	Diisi dengan pendapatan Kontribusi yang berasal dari Kontribusi bruto (sebelum dikurangi komisi) untuk produk tersebut dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
10	Kontribusi - Jumlah Polis	Diisi dengan jumlah polis yang melakukan pembayaran Kontribusi (untuk Kontribusi kumpulan, tetap dihitung berdasarkan polis)
11	Klaim - Jumlah Klaim (Rp)	Diisi dengan jumlah klaim bruto dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
12	Klaim - Jumlah Polis	Diisi sesuai dengan jumlah polis yang melakukan klaim
13	Penyisihan Teknis - Penyisihan Kontribusi	Diisi dengan jumlah Penyisihan Kontribusi (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
14	Penyisihan Teknis - PAPYBMP	Diisi dengan jumlah PAPYBMP (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
15	Penyisihan Ujroh	Diisi dengan jumlah penyisihan teknis bagi Dana Perusahaan (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
16	Penyisihan Teknis - Penyisihan Klaim Dalam Proses	Diisi dengan jumlah Penyisihan Klaim Dalam Proses (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam Rincian Penyisihan Klaim
17	Keterangan	Diisi dengan keterangan metode perhitungan estimasi yang digunakan apabila memilih isian "Lainnya" pada kolom 6, dan keterangan kolom-kolom lain yang relevan



No	Kolom	Petunjuk Pengisian
1	Nama Produk	Diisi dengan nama produk yang mendapatkan izin dari OJK
2	Kode Produk	Diisi dengan kode produk yang dibuat oleh perusahaan, kode produk ini tidak boleh berubah
3	Status Produk	Diisi dengan pilihan berupa produk baru, produk masih dijual, dan produk sudah tidak dijual
4	Kanal Distribusi	<p>Diisi dengan <b>kode</b> saluran pemasaran produk yaitu:</p> <p><b>1201</b> Direct  <b>1202</b> Agency  <b>1203</b> Bancassurance  <b>1204</b> Badan Usaha Selain Bank - Agen Laku Pandai  <b>1205</b> Badan Usaha Selain Bank - Selain Agen Laku Pandai  <b>1206</b> Tenaga Pemasar (Mikro) - Agen Laku Pandai  <b>1207</b> Tenaga Pemasar (Mikro) - Selain Agen Laku Pandai</p>
5	Tanggal Izin Produk	Diisi dengan tanggal persetujuan OJK atas produk tersebut
6	Lini Usaha	<p>Diisi dengan salah satu <b>kode</b> dari lini usaha asuransi umum sebagai berikut:</p> <p><b>1101</b> Harta Benda (Property)  <b>1102</b> Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)  <b>1103</b> Pengangkutan (Marine Cargo)  <b>1104</b> Rangka Kapal (Marine Hull)  <b>1105</b> Rangka Pesawat (Aviation Hull)  <b>1106</b> Satelit  <b>1107</b> Energi Onshore (Oil and Gas)  <b>1108</b> Energi Offshore (Oil and Gas)  <b>1109</b> Rekayasa (Engineering)  <b>1110</b> Tanggung Gugat (Liability)  <b>1111</b> Kredit (Credit)  <b>1112</b> Aneka  <b>1113</b> Kesehatan  <b>1114</b> Kecelakaan Diri</p>
7	Estimasi Profit/Loss	Diisi dengan pilihan hasil estimasi berupa "Profit" atau "Loss" berdasarkan metode perhitungan estimasi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran
8	Metode Perhitungan Estimasi	Diisi dengan pilihan metode perhitungan estimasi yaitu Profit Testing, Embedded Value, Value of New Business, dan Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran
9	Kontribusi - Jumlah Kontribusi (Rp)	Diisi dengan pendapatan Kontribusi yang berasal dari Kontribusi bruto (sebelum dikurangi komisi) untuk produk tersebut dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
10	Kontribusi - Jumlah Polis	Diisi dengan jumlah polis yang melakukan pembayaran Kontribusi (untuk Kontribusi kumulatif, tetap dihitung berdasarkan polis)
11	Klaim - Jumlah Klaim (Rp)	Diisi dengan jumlah klaim bruto dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
12	Klaim - Jumlah Polis	Diisi sesuai dengan jumlah polis yang melakukan klaim

13	Penyisihan Teknis – Penyisihan Kontribusi	Diisi dengan jumlah Penyisihan Kontribusi (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
14	Penyisihan Teknis – PAPYBMP	Diisi dengan jumlah PAPYBMP (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tahunan
15	Penyisihan Ujroh	Diisi dengan jumlah penyisihan teknis bagi Dana Perusahaan (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
16	Penyisihan Teknis – Penyisihan Klaim	Diisi dengan jumlah Penyisihan Klaim Dalam Proses (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan
17	Asumsi - Loss Ratio (%)	Diisi berdasarkan tingkat loss ratio yang digunakan ketika melaporkan produk baru
18	Asumsi - Morbidita	Diisi berdasarkan asumsi tabel morbidita yang digunakan ketika melaporkan produk baru
19	Asumsi - Beban Komisi (Rp)	Diisi dengan asumsi jumlah komisi dibayar atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
20	Asumsi - Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Diisi berdasarkan asumsi jumlah biaya umum & administrasi atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
21	Asumsi - Hasil Underwriting (Rp)	Diisi berdasarkan asumsi hasil underwriting atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
22	Realisasi - Loss Ratio (%)	Diisi berdasarkan tingkat loss ratio atas produk tersebut
23	Realisasi - Morbidita	Diisi berdasarkan realisasi tabel morbidita atas produk tersebut
24	Realisasi - Beban Komisi (Rp)	Diisi dengan realisasi jumlah komisi dibayar atas produk tersebut
25	Realisasi - Biaya Umum &	Diisi berdasarkan realisasi jumlah biaya umum & administrasi atas produk tersebut
26	Realisasi - Hasil Underwriting (Rp)	Diisi berdasarkan realisasi hasil underwriting atas produk tersebut
27	Dukungan Reasuransi	Diisi berdasarkan dukungan reasuransi atas produk tersebut
28	Dampak deviasi terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan	Diisi dengan deskripsi singkat mengenai dampak dari deviasi (selisih asumsi dan realisasi) terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan
29	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi (jika ada)	Diisi dengan deskripsi singkat mengenai mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi
30	Keterangan	Diisi dengan keterangan metode perhitungan estimasi yang digunakan apabila memilih isian "Lainnya" pada kolom 6

K e p a d a

**Yth.Direktorat IKNB Syariah**

Otoritas Jasa Keuangan

Wisma Mulia 2

Jakarta - 12710

**LAPORAN TAHUNAN**  
**USAHA REASURANSI SYARIAH**  
Bulan Januari Tahun 1900

---

---

---

---

No.	Nama Sheet	Nama Form
1	Data Umum	
2	Cover	
3	Validasi	
4	THPPUSY	Profil Perusahaan
5	THPPSRESU	Rincian Pemegang Saham
6	THPPURES	Rincian Pihak Utama
7	THRPPRES-1	Rincian Pendidikan dan Pelatihan
8		Profil Produk
9		Profil Kacab Kanwil
10	THLPKRE-SY	Laporan Posisi Keuangan
11	THLKKRE	Laporan Kinerja Keuangan
12	THLAK-R	PERHITUNGAN ARUS KAS
13	THLPDR	LAPORAN PERUBAHAN DANA
14	THSAP	ANALISIS PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP
15	THRPTSRES	PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS
16	THRIKSTSRU	RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS
17	THRKUS-RE	MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO RISIKO KREDIT
18	THRKRKRES	RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN
19	THRKRKRES1	RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG
20	THRKLRES	RISIKO LIKUIDITAS
21	THRPSYA-R	RISIKO PASAR
22	THRPARES	RISIKO PASAR - PERUBAHAN HARGA PASAR
23	THRPSB-R	RISIKO PASAR - PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING
24	THRPSC-R	RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI
25	THRSAS-R	RISIKO ASURANSI
26	THRSAS1-R	RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI
27	THRSAS2-R	RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
28	THRSAS3-R	RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM
29	THRSAS4-R	RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA
30	THRSOS-R	RISIKO OPERASIONAL
31	THRA110-R	Rincian Investasi dan Property
32	THRA120-R	Rincian Tagihan
33	THRA130-R	Rincian Aset Lain
34	THRA210-RU	Rincian Utang
35	THRA220-R	Penyisihan Ujroh, Penyisihan Kontribusi, Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
36	THRA221-R	Penyisihan Klaim
37	THRA222-R	PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA (CATASTROPHIC RISK)
38	THRA310-R	Rincian Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang dan Umur Jatuh Tempo
39		RINCIAN KONTRIBUSI
40		RINCIAN KLAIM
41		RINCIAN POLIS
42		RINCIAN PENYISIHAN
43	THRC110-RE	Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan
44	THRD110-R	Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi
45	THRD-120	Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro
46	THRF110	Rincian Reasuransi Keluar

<b>Data Umum</b>	
<b>Versi Laporan</b>	<b>4/30/2020 12:51:55 PM</b>
<b>Tanggal Pelaporan</b>	
<b>Kode Perusahaan / Pihak</b>	
<b>Nama Perusahaan / Pihak</b>	
<b>Alamat Perusahaan / Pihak</b>	
<b>Periode Pelaporan</b>	
<b>Bulan Pelaporan</b>	<b>Januari</b>
<b>Tahun Fiskal</b>	
<b>Jenis Periode Pelaporan</b>	<b>Laporan Tahunan</b>
<b>Nama Direksi / Penanggung Jawab</b>	
<b>Jabatan Direksi / Penanggung Jawab</b>	



## Profil Perusahaan

Per 31-Jan-1900

	Keterangan
Nama Perusahaan	
Alamat Lengkap	
DATI I (Provinsi)	
DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	
Telepon	
Fax	
E-mail	
NPWP	
No. Izin Usaha	
Tanggal Izin Usaha	
`	
Jumlah Cabang/Perwakilan	
Jumlah Tenaga Kerja	
Jumlah Peserta	
Auditor Eksternal	
Pengendali	
PIC Laporan Keuangan	
Penyusun Laporan	
Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Extention	
Fax	
Email	
Penanggung Jawab Direksi	
Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Extention	
Fax	
E-mail	

Rincian Pemegang Saham

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama Pemegang Saham	Induk Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kelompok	Tingkat Derajat Kepemilikan	Jenis Pemegang Saham (Kode Counterparty)	Kode Lokasi (Negara)	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Rating Badan Hukum	Lembaga Pemeringkat	Ekuitas	Periode Ekuitas	Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Rincian Pihak Utama

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

### Rincian Pendidikan dan Pelatihan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Uraian	Jenis Peserta Diklat	Biaya Pendidikan dan Pelatihan
		(Pegawai/Direksi/Komisaris/DPS)	Realisasi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



PROFIL CABANG / PERWAKILAN

Nama Cabang	No Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Jenis Kantor Cabang/Perwakilan	Nama Pemimpin Kantor	Alamat	Lokasi (DT II)	Latitude	Longitude	No. Telp	No. Email



## Laporan Kinerja Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Investasi Peserta					
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Penyesuaian	Gabungan
<b>PENDAPATAN</b>						
<b>PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI</b>						
Hasil Investasi						
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan						
Jumlah Hasil Investasi						
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi						
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi						
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>						
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi						
a. Alokasi Kontribusi Langsung: Tabarru'/Ujroh/Investasi						
b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung: Tabarru'/Ujroh						
Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Untuk Investasi						
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi						
Kontribusi Neto						
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP						
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi						
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP						
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana						
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto						
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>						
<b>BEBAN</b>						
<b>BEBAN UNDERWRITING</b>						
Beban Klaim						
a. Klaim Bruto						
b. Klaim recovery						
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim						
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo						
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)						
Jumlah Beban Klaim Netto						
Beban Adjuster						
<b>JUMLAH BEBAN UNDERWRITING</b>						
<b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>						
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan						
b. Surplus underwriting untuk Peserta						
<b>BEBAN USAHA:</b>						
a. Beban Pemasaran						
b. Beban Akuisisi						
c. Beban Umum dan Administrasi:						
- Beban Pegawai dan Pengurus						
- Beban Pendidikan dan Pelatihan						
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya						
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh						
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>						
<b>LABA (RUGI) USAHA ASURANSI</b>						
Pendapatan Lain						
Beban Lain						
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset						
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>						
Pajak Penghasilan						
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>						
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>						
<b>JUMLAH KINERJA SELURUH DANA</b>						



Laporan Arus Kas  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian			Dana Investasi Peserta		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Akad Wakalah Bil Ujah	Akad Mudharabah	Gabungan
SALDO AWAL	-	-	-	-	-
PENINGKATAN (PENURUNAN SALDO KAS)	-	-	-	-	-
SALDO AKHIR KAS	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Kontribusi Para Peserta	-	-	-	-	-
Ujroh yang diterima	-	-	-	-	-
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'	-	-	-	-	-
Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-
Klaim Reasuransi Diterima	-	-	-	-	-
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi	-	-	-	-	-
Lain - Lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Klaim Dibayar	-	-	-	-	-
Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-
Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis	-	-	-	-	-
Beban Akuisisi	-	-	-	-	-
Beban Pemasaran	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Reasuransi	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Asuransi	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi Dibayar	-	-	-	-	-
Pembayaran Sewa	-	-	-	-	-
Pembayaran Zakat	-	-	-	-	-
Pembayaran Pajak	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Penerimaan Hasil Investasi	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabarru'	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta	-	-	-	-	-
Pencairan Investasi	-	-	-	-	-
Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Penempatan Investasi	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembelian Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Setoran Modal/Modal Kerja	-	-	-	-	-
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-
Penerimaan Qardh	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-
Pembayaran Dividen	-	-	-	-	-
Pembayaran Qardh	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-

## LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Investasi Peserta		Gabungan
			Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
I. Saldo Dana Awal	-	-		-	-
II. Penambahan	-	-		-	-
Modal Disetor	-	-		-	-
Laba komprehensif periode berjalan	-	-		-	-
Kenaikan akumulasi dana tabarru' / dana investasi peserta	-	-		-	-
Penambahan lainnya	-	-		-	-
III. Pengurangan	-	-		-	-
Rugi komprehensif periode berjalan	-	-		-	-
Penurunan akumulasi dana tabarru' / dana investasi peserta	-	-		-	-
Pembayaran Deviden	-	-		-	-
Pengurangan lainnya	-	-		-	-
IV. Saldo Akhir Dana	-	-		-	-





RASIO KEUANGAN  
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	-
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	-
DTMBR/MMBR	-	-
A. Risiko Kredit	-	-
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	-
F. MMBR atas PAYDI Digaransi	-	-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	0,00%	0,00%
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)	0,00%	0,00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)	0,00%	0,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru'	-	-
A. Kekurangan (Kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidacukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	0,00%	0,00%

RASIO KEUANGAN  
SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Indikator		
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Gabungan
Rasio Likuiditas			-
A. Kekayaan lancar	-	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas			-
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-
B. Penyisihan teknis retensi sendiri	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	0,00%	-	0,00%
Aset yang Diperhitungkan Untuk Qardh pada Dana Perusahaan			
D. Rasio [a:(b+c)] setelah penambahan			
Rasio Pendapatan investasi netto			-
A. Pendapatan investasi netto	-	-	-
B. Rata-rata investasi	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio beban klaim			-
A. Beban klaim netto	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	-	0,00%
Rasio perubahan dana			-
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	-	-
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	-	-
C. Perubahan dana (a-b)	-	-	-
D. Rasio (c:b)	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset Unit Syariah			-
A. Aset Dana Tabarru	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	0,00%	0,00%	0,00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru			-
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-
Biaya Pegawai dan Pengurus			
Biaya Pendidikan dan Pelatihan			
Rasio Pendidikan dan Pelatihan			

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM  
RISIKO KREDIT  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi	
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan
Risiko Kredit (a)	-	-
Risiko Kredit (b)	-	-
Total Risiko Kredit	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,20%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,10%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,50%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,00%	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	0,00%	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	0,00%	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,20%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,10%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,50%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,00%	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Syariah	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	0,00%	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	0,00%	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara selain Negara RI	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	0,00%	-	-	-
REPO	-	-	-	1,00%	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain*	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. Sangat sehat	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Sehat	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Kurang sehat	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Tidak sehat	-	-	-	6,00%	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	-	0,00%	-	-	-
Properti residensial	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	4,00%	-	-	-
Properti komersial lainnya	-	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	5,60%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	8,00%	-	-	-
Properti yang tidak digunakan	-	-	-	12,00%	-	-	-



Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	8,00%	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
a. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggung ulang (dicharge dalam Risiko Kredit b)	-	-	-	-	-	-	-
b. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang program reasuransi dukungan	-	-	-	30,00%	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Peringkat Klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
Peringkat Klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
a. Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	-	-	-	2,00%	-	-	-
b. Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo/saat dicairkan	-	-	-	25,00%	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	2,00%	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG  
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Kode Jenis Reasuradur	Nama Reasuradur	Tipe Reasuransi	Penyisihan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan atau Kontribusi yang ditahandi Perusahaan	Eksposur Reasuransi Netto ((2)-(3))	(dalam jutaan rupiah)	
							Faktor	Jumlah Deviasi
1	-		Reasuransi Otomatis (Treaty)	-	-	-	0,00%	-
2	-		-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
3	-		- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
4	-		- Surplus	-	-	-	0,00%	-
5	-		- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
6	-		- Cath X/L	-	-	-	0,00%	-
7	-		- Work X/L	-	-	-	0,00%	-
8	-		Reasuransi Fakultatif	-	-	-	0,00%	-
9	-		-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
10	-		- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
11	-		- Surplus	-	-	-	0,00%	-
12	-		- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
13	-			-	-	-	0,00%	-



MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO PASAR  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi			Total
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru	PAYDI (digaransi)	
Risiko Pasar (A)	-	-	-	-
Risiko Pasar (B)	-	-	-	-
Risiko Pasar (C)	-	-	-	-
Total Risiko Pasar	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO PASAR - PERUBAHAN HARGA PASAR  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Perusahaan	Dana Tabarru	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Termasuk IDX30 atau JII	-	-	-	15%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa Indonesia	-	-	-	20%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa luar negeri	-	-	-	-	-	-	-
Saham penyusun indeks utama bursa utama negara Asia Pasifik dan Eropa anggota World Federation of Exchanges	-	-	-	20%	-	-	-
Saham Lainnya	-	-	-	30%	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	-	-	-	0%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang (SBPU)	-	-	-	6%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	-	-	-	16%	-	-	-
Campuran*)	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Dana Tabarru'	-	-	-	-	-	-	-
PAYDI (digaransi)	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12%	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	10%	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	10%	-	-	-
Tidak Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	20%	-	-	-
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi 4% atau lebih	-	-	-	7%	-	-	-
Hasil Investasi 2% - 4%	-	-	-	15%	-	-	-
Hasil Investasi kurang dari 2%	-	-	-	40%	-	-	-
Emas murni	-	-	-	3%	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	10,00%	-	-	-
BUKAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	4%	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-



MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM  
RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru
PKrf	-	-
PKo	-	-
$\text{Max}((\text{PKrf}-\text{PKo}),0)$	-	-
PUrf	-	-
PUo	-	-
$\text{Max}((\text{PUrf}-\text{PUo}),0)$	-	-
fPTB	15%	15%
PTPI	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA  
RISIKO ASURANSI  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi
I. Total max $((PK^* - PK), 0)$	-
II. Total $((PAKYBMPi - ARi)fpki)$	-
III. Total $((PKli - ARi)fpkli)$	-
IV. Total $((PRBi - ARi)fpbi)$	-
Total Deviasi	-



MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	PK	PK*	Jumlah Deviasi
Harta Benda (Property)	-	-	
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	
Satelit	-	-	
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	
Rekayasa (Engineering)	-	-	
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	
Kredit (Credit)	-	-	
Aneka	-	-	
Kesehatan	-	-	
Kecelakaan Diri	-	-	
Jiwa*)	-	-	
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	PAKYBMP	AR	fpk	Jumlah Deviasi PAKYBMP ((2) - (3)) x (4)
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	25%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-
Satelit	-	-	25%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-
Kredit (Credit)	-	-	30%	-
Aneka	-	-	25%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total ((PAKYBMPi - ARi)fpci + (PKi -	-	-		-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	Penyisihan Klaim	AR	fpk	Jumlah Deviasi Penyisihan Klaim ((2) - (3)) x (4)
Harta Benda (Property)	-	-	20%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	20%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	25%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	25%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	25%	-
Satelit	-	-	20%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	20%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	30%	-
Aneka	-	-	20%	-
Kesehatan	-	-	20%	-
Kecelakaan Diri	-	-	20%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	Penyisihan Risiko Bencana	AR	fpk	Jumlah Deviasi Penyisihan Risiko Bencana ((2) - (3)) x (4)
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	25%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-
Satelit	-	-	25%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-
Aneka	-	-	25%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO OPERASIONAL  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Tabarru	Dana Perusahaan
Risiko Operasional Perusahaan		
a. Beban Umum dan Administrasi		-
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan		-
c. Risiko Operasional = $(1\% * (a-b))$		-
d. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditanggungkan		-
e. Risiko Operasional = $(50\% * d)$		-
f. Sub Total Risiko Operasional Perusahaan (c+e)		-
Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)		
g. Aset Dana PAYDI		-
h. Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI =		-
Risiko Operasional Dana Tabarru' (RODT)		
i. Investasi Dana Tabarru'	-	-
j. Sub Total RODT = $(1\% * i)$	-	-
Total Deviasi (f+h+j)	-	-

RINCIAN A-110. Rincian Investasi dan Property

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nomor Akun (SID / Rekening Bank)	Kode Jenis Investasi	Nama Instrumen Investasi	Kode Instrumen Investasi	Nama Penerbit / Pihak	Kode Golongan Perusahaan / Penerbit	Nama Group	Kode Jenis Dana	Kode Dana Jaminan	Kode Investasi Dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur	Kode Pengawas	Jangka Waktu		Kode Peringkat Debitur	Kode Nama Pemeringkat	Kode Kategori Usaha / Kategori Debitur	Kode Sektor Ekonomi	Kode Lokasi	
												DD/MM/YYYY Mulai	DD/MM/YYYY Jatuh Tempo						
1					-				-					-					
2					-				-					-					
3					-				-					-					
4					-				-					-					
5					-				-					-					
6					-				-					-					
7					-				-					-					
8					-				-					-					
9					-				-					-					
10					-				-					-					



## RINCIAN A-120. Rincian Tagihan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Debitur	Kode Kategori Usaha / Kategori Debitur	Kode Jenis Tagihan	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Mulai	Kode Mata Uang	Kode Peringkat Debitur	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)	AYD (Juta Rp)
1		-	-	-		-	-	-	-	-
2		-	-	-		-	-	-	-	-
3		-	-	-		-	-	-	-	-
4		-	-	-		-	-	-	-	-
5		-	-	-		-	-	-	-	-
6		-	-	-		-	-	-	-	-
7		-	-	-		-	-	-	-	-
8		-	-	-		-	-	-	-	-
9		-	-	-		-	-	-	-	-
10		-	-	-		-	-	-	-	-



RINCIAN A-130. Rincian Aset Lain

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Aset	Dasar Penilaian	Kode Jenis Dana	Nilai Pasar / Appraisal	Saldo Juta (Rp)	Keterangan
1		-	-	-	-	
2		-	-	-	-	
3		-	-	-	-	
4		-	-	-	-	
5		-	-	-	-	
6		-	-	-	-	
7		-	-	-	-	
8		-	-	-	-	
9		-	-	-	-	
10		-	-	-	-	

RINCIAN A-210. Rincian Utang

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama	Kode Jenis Utang	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Periode Mulai	Kode Mata Uang	Kode Negara	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)
1		-	-		-	-	-	-
2		-	-		-	-	-	-
3		-	-		-	-	-	-
4		-	-		-	-	-	-
5		-	-		-	-	-	-
6		-	-		-	-	-	-
7		-	-		-	-	-	-
8		-	-		-	-	-	-
9		-	-		-	-	-	-
10		-	-		-	-	-	-



RINCIAN A-221.  
 Penyisihan KLAIM  
 Bulanan

Cabang Asuransi	Dana Tabarru			
	Penyisihan Klaim Dalam Proses	Penyisihan Klaim IBNR	Penyisihan Klaim Pembayaran Berkala	Jumlah Penyisihan Klaim
Harta Benda (Property)	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

RINCIAN A-222  
Penyisihan Risiko Bencana  
Per 31-Jan-1900

Cabang Asuransi	Dana Tabarru <sup>2</sup>	
	Retensi Sendiri	Reasuransi
Harta Benda (Property)	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-
Satelit	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-
Kecelakaan Diri	-	-
Kesehatan	-	-
Kredit (Credit)	-	-
Suretyship	-	-
Aneka	-	-
Jiwa*)	-	-
Total	-	-









RINCIAN POLIS

Kode Produk	Kode Polis Tradisional /PAYDI	Kode Jenis Polis	Kode Cara Bayar	Kode Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Counterparty Pemegang Polis	Status (Aktif/Non Aktif)	Kode Inforce/Not Inforce	Jumlah Polis	Jumlah Peserta	Jumlah Manfaat Asuransi Syariah (Jutaan Rp)
								Peserta Lanjutan			
								Peserta Baru			
								Pemulihan Kembali Kepesertaan			
								Perubahan Dari Lini Asuransi Lain			
								Peserta Meninggal Dunia			
								Kepesertaan Habis Kontrak			
								Pemutusan Kontrak Produk Yang Dihasilkan Pada Tahun Bersangkutan			
								Perubahan Ke Lini Asuransi Lain			



**C-110. LAPORAN DANA JAMINAN**  
**Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan**  
**Per 31-Jan-1900**

Uraian	Jumlah
<b>1. Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan</b>	
Saldo Awal Dana Jaminan	-
Penempatan Dana Jaminan Baru:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
Total Penempatan Dana Jaminan Baru (3 + 4)	-
Pencairan Dana Jaminan:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
Total pencairan Dana Jaminan (7 + 8)	-
Saldo Akhir Dana Jaminan (1 + 5 – 9)	-
<b>2. Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan Tahunan</b>	
Ekuitas minimum yang dipersyaratkan	-
Jumlah Kontribusi neto*)	-
Jumlah Kontribusi reasuransi*)	-
Jumlah Penyisihan atas PAYDI yang digaransi	-
Batas Minimum Dana Jaminan I (20% x 1)	-
Batas Minimum Dana Jaminan II ((1% x 2) + (0,25% x 3) + (2% x 4))	-
Batas Minimum Dana Jaminan Yang Digunakan ( Nilai antara 5 dan 6 mana yang lebih besar)	-
Dana Jaminan Yang Dimiliki	-
Kelebihan (Kekurangan) Dana Jaminan (8 - 7)	-

RINCIAN D-110  
Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi  
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017										Jumlah Peserta Klaim	
	Nama Produk	Jenis Polis (Kumpulan /Individual)	Lini Usaha	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan		Kontribusi Bruto (Rp)
1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-



RINCIAN D-120. Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Pemasar Badan Hukum		Wilayah Pemasaran	Jumlah Badan Hukum		Nama Produk Yang Dipasarkan	Jumlah Peserta	Kontribusi Bruto (Rp)
	Jenis Saluran Pemasaran	Kategori Badan Hukum		Jumlah Badan Hukum	Jumlah Pemasar Perorangan			
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-



K e p a d a

**Yth. Direktorat IKNB Syariah**

Otoritas Jasa Keuangan

Wisma Mulia 2

Jakarta - 12710

**LAPORAN TAHUNAN**  
**USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH**  
Bulan Januari Tahun 1900

---

---

---

---



No.	Nama Sheet	Nama Form
1	DATA UMUM	
2	COVER	
3	VALIDASI	
4	THPPAJS	Profil Perusahaan
5	THPSAJS	Rincian Pemegang Saham
6	THPPUAJS	Rincian Pihak Utama
7	THRPPAJS-1	Rasio Pendidikan Dan Pelatihan - I
8		Profil Produk
9		Profil Kacab Kanwil
10	THLPKS-J	Laporan Posisi Keuangan
11	THLKK-J	Laporan Kinerja Keuangan
12	THLAK-J	Perhitungan Arus Kas
13	THLPDS-J	Laporan Perubahan Dana
14	THSAP	Analisis Perhitungan Aset Dan Liabilitas Sap
15	THRPTSAJSC	Pencapaian Tingkat Solvabilitas
16	THRSTSAJSC	Rasio Selain Tingkat Solvabilitas
17	THRKJS	Modal Minimum Berbasis Risiko Dan Dana Tabarru Minimum Berbasis Risiko
18	THRKRKAJS	Risiko Kredit
19	THRKRAJ	Risiko Kredit - Risiko Kegagalan Atau Ketidakmampuan Debitur Atau Pihak Lain
20	THRKLAJS	Risiko Kredit - Kegagalan/Ketidakmampuan Penanggung Ulang
21	THRPSYA-J	Risiko Likuiditas
22	THRPSA-J	Risiko Pasar
23	THRPSB-J	Risiko Pasar - Perubahan Harga Pasar
24	THRPSA-J	Risiko Pasar - Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
25	THRSAS-J	Risiko Pasar - Risiko Perubahan Tingkat Hasil Investasi
26	THRSAS1-J	Risiko Asuransi
27	THRSAS2-J	Risiko Asuransi - Penyisihan Kontribusi
28	THRSAS3-J	Risiko Asuransi - Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
29	THRSAS4-J	Risiko Asuransi - Penyisihan Klaim
30	THRSOS-J	Risiko Asuransi - Penyisihan Atas Risiko Bencana
31	THRA110-J	Risiko Operasional
32	THRA120-J	Rincian Investasi Dan Property
33	THRA130-J	Rincian Tagihan
34	THRA210-J	Rincian Aset Lain
35	THRA310-J	Rincian Utang
36		Rincian Rekapitulasi Aset Dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang Dan Umur Jatuh Tempo
37		Rincian Kontribusi
38		Rincian Klaim
39		Rincian Polis
40	THRA 220-J	Rincian Penyisihan
41	THRA230-J	Penyisihan Kontribusi
42	THRA240-J	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
43	THRA 250-J	Penyisihan Klaim
44	THRC110-J	Penyisihan Atas Risiko Bencana (Catastrophic Risk)
45	THRE110-J	Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan Dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan
46	THRE110-J (1)	Rincian E-110. Penyisihan Teknis, Aset Reasuransi, Dan Akumulasi Dana Investasi Peserta
47	THRF110-J	Untuk Polis Jangka Panjang Yang Non Renewable
48	THRG 110J	Untuk Polis Jangka Panjang Yang Renewable Dan Polis Jangka Pendek
49	THRG120J	Reasuransi Keluar
50		Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi
51		Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro
52		Evaluasi Kinerja Produk bulanan
53		Evaluasi Kinerja Produk tahunan

**Data Umum**

<b>Versi Laporan</b>	<b>4/30/2020 12:43:58 PM</b>
<b>Tanggal Pelaporan</b>	
<b>Kode Perusahaan / Pihak</b>	
<b>Nama Perusahaan / Pihak</b>	
<b>Alamat Perusahaan / Pihak</b>	
<b>Periode Pelaporan</b>	
<b>Bulan Pelaporan</b>	<b>Januari</b>
<b>Tahun Fiskal</b>	
<b>Jenis Periode Pelaporan</b>	<b>Laporan Tahunan</b>
<b>Nama Direksi / Penanggung Jawab</b>	
<b>Jabatan Direksi / Penanggung Jawab</b>	

## Profil Perusahaan

Per 31-Jan-1900

	Keterangan
Nama Perusahaan	
Alamat Lengkap	
DATI I (Provinsi)	
DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	
Telepon	
Fax	
E-mail	
NPWP	
No. Izin Usaha	
Tanggal Izin Usaha	
Single Investor Identification (SID)	
Jumlah Cabang/Perwakilan	
Jumlah Tenaga Kerja	
Jumlah Peserta	
Auditor Eksternal	
Pengendali	
PIC Laporan Keuangan	
Penyusun Laporan	
Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Extention	
Fax	
Email	
Penanggung Jawab Direksi	
Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Extention	
Fax	
E-mail	



Rincian Pihak Utama

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

## Rincian Pendidikan dan Pelatihan - I

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Uraian	Jenis Peserta Diklat	Realisasi
		(Pegawai/Direksi/Komisaris/ DPS)	
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
14			-
15			-
16			-
17			-
18			-
19			-
20			-
21			-
22			-
23			-
24			-
25			-
26			-
27			-
28			-
29			-
30			-
31			-
32			-
33			-
34			-
35			-
36			-
37			-
38			-
39			-
40			-
41			-
42			-
43			-
44			-
45			-
46			-
47			-
48			-
49			-
50			-









Laporan Kinerja Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Investasi Peserta						
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Akad Wakalah Bil Ujroh	Akad Mudharabah	Penyesuaian	Gabungan
<b>PENDAPATAN</b>							
<b>PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH</b>							
Hasil Investasi							
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan							
Jumlah Hasil Investasi							
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi							
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi							
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi							
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi							
Kontribusi Neto							
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi							
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP							
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana							
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto							
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>							
<b>BEBAN</b>							
<b>BEBAN UNDERWRITING</b>							
Beban Klaim							
a. Klaim Bruto							
b. Klaim recovery							
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan							
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo							
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)							
Jumlah Beban Klaim Netto							
Beban Adjuster							
<b>JUMLAH BEBAN UNDERWRITING</b>							
<b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT)</b>							
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan							
b. Surplus underwriting untuk Peserta							
<b>BEBAN USAHA:</b>							
a. Beban Pemasaran							
b. Beban Akuisisi							
c. Beban Umum dan Administrasi:							
- Beban Pegawai dan Pengurus							
- Beban Pendidikan dan Pelatihan							
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya							
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh							
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi							
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>							
<b>LABA (RUGI) USAHA ASURANSI</b>							
Pendapatan Lain							
Beban Lain							
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset							
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>							
Pajak Penghasilan							
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>							
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>							
<b>JUMLAH KINERJA SELURUH DANA</b>							

PERHITUNGAN ARUS KAS

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Investasi Peserta					
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Gabungan
SALDO AWAL						
PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS						
SALDO AKHIR KAS						
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI						
Arus Kas Masuk						
Kontribusi Para Peserta						
Ujroh yang diterima						
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'						
Klaim Koasuransi						
Klaim Reasuransi Diterima						
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi						
Lain - Lain						
Arus Kas Keluar						
Klaim Dibayar						
Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo						
Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo						
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan						
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis						
Beban Akuisisi						
Beban Pemasaran						
Pembayaran Ujroh Reasuransi						
Pembayaran Ujroh Asuransi						
Kontribusi Reasuransi Dibayar						
Pembayaran Sewa						
Pembayaran Zakat						
Pembayaran Pajak						
Lain-lain						
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI						
Arus Kas Masuk						
Penerimaan Hasil Investasi						
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabarru'						
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta						
Pencairan Investasi						
Penjualan Aktiva Tetap						
Lain-lain						
Arus Kas Keluar						
Penempatan Investasi						
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan						
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan						
Pembelian Aktiva Tetap						
Lain-lain						
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN						
Arus Kas Masuk						
Setoran Modal/Modal Kerja						
Pinjaman Subordinasi						
Penerimaan Qardh						
Lain-lain						
Arus Kas Keluar						
Pembayaran Pinjaman Subordinasi						
Pembayaran Dividen						
Pembayaran Qardh						
Lain-lain						

## LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
I. Saldo Dana Awal						
II. Penambahan						
Modal Disetor						
Laba komprehensif periode berjalan						
Kenaikan akumulasi dana tabarru' / Dana Investasi Peserta						
Penambahan lainnya						
III. Pengurangan						
Rugi komprehensif periode berjalan						
Penurunan akumulasi dana tabarru' / Dana Investasi Peserta						
Pembayaran Deviden						
Pengurangan lainnya						
IV. Saldo Akhir Dana						



**ANALISIS  
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP  
Per 31-Jan-1900**

(dalam jutaan rupiah)

<b>DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD</b>							
I. Investasi							
Deposito							
Sertifikat Deposito							
Saham Syariah							
Sukuk atau Obligasi Syariah							
MTN Syariah							
Surat Berharga Syariah Negara RI							
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia							
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI							
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional							
Reksa Dana Syariah							
Efek Beragun Aset Syariah							
Dana Investasi Real Estat Syariah							
REPO							
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)							
Emas Murni							
Sukuk Daerah							
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif							
Investasi Lain							
Jumlah Investasi							
II. Bukan Investasi							
Kas dan Bank							
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung							
Tagihan Kontribusi Koasuransi							
Tagihan Kontribusi Reasuransi							
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi							
Tagihan Klaim Koasuransi							
Tagihan Hasil Investasi							
Tagihan Investasi							
Aset Reasuransi							
Aset Lain							
Jumlah Bukan Investasi							
<b>JUMLAH KEKAYAAN (I+II)</b>							
Utang							
Penyisihan Kontribusi							
Penyisihan Kontribusi yang Belum Merupakan							
Penyisihan Klaim							
Penyisihan atas Risiko Bencana (Catastrophic Risks)							
Jumlah Liabilitas							

**ANALISIS  
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP  
Per 31-Jan-1900**

(dalam jutaan rupiah)

<b>DANA INVESTASI PESERTA</b>			
I. Investasi			
Deposito			
Sertifikat Deposito			
Saham Syariah			
Sukuk atau Obligasi Syariah			
MTN Syariah			
Surat Berharga Syariah Negara RI			
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia			
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI			
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional			
Reksa Dana Syariah			
Efek Beragun Aset Syariah			
Dana Investasi Real Estat Syariah			
REPO			
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)			
Pembiayaan dengan Hak Tanggungan			
Penyertaan Langsung			
Properti Investasi			
Emas Murni			
Sukuk daerah			
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif			
Investasi Lain			
Jumlah Investasi			
II. Bukan Investasi			
Kas dan Bank			
Tagihan Hasil Investasi			
Tagihan Investasi			
Aset Reasuransi			
Biaya Akuisisi Ditangguhkan			
Property Bukan Investasi			
Aset Lain			
Jumlah Bukan Investasi			
<b>JUMLAH KEKAYAAN (I+II)</b>			
Utang			
Akumulasi Dana Investasi Peserta			
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok			
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>			

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)		-
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	-
Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)		
A. Risiko Kredit		
B. Risiko Likuiditas		
C. Risiko Pasar		
D. Risiko Asuransi		
E. Risiko Operasional		
F. MMBR atas PAYDI Digaransi		
1. Risiko PAYDI Digaransi		
a. Risiko Kredit		
b. Risiko Likuiditas		
c. Risiko Pasar		
2. Aset PAYDI Digaransi		
3. Liabilitas PAYDI Digaransi		
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)		
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)		
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)		
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud		
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal		
B. Ketidacukupan investasi, kas dan bank		
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan		



RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Indikator			
	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	-	-	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)				
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank				
B. Penyisihan teknis retensi sendiri				
C. Utang klaim retensi sendiri				
D. Rasio [a:(b+c)]				
Aset yang Diperhitungkan Untuk Qardh pada Dana Perusahaan				
D. Rasio [a:(b+c)] setelah penambahan				
Rasio Pendapatan investasi netto				
A. Pendapatan investasi netto				
B. Rata-rata investasi				
C. Rasio (a:b)				
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto				
B. Kontribusi netto				
C. Rasio (a:b)				
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan				
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu				
C. Perubahan dana (a-b)				
D. Rasio (c:b)				
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud				
B. Aset Dana Investasi Peserta				
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)				
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)				
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
B. Jumlah Aset				
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
B. Jumlah Aset				
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				
Biaya Pegawai dan Pengurus				
Biaya Pendidikan dan Pelatihan				
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO KREDIT  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru dan Tanahud	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Risiko Kredit (a)			
Risiko Kredit (b)			
Total Risiko Kredit			

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru dan Tanahud	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Tabarru dan Tanahud	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,2%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,1%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,5%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,0%	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	0,01	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	0,02	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	0,03	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	0,05	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	0,09	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	0,0%	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	0,0%	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	0,0%	-	-	-
REPO	-	-	-	1,0%	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain*	-	-	-	-	-	-	-
a. Sangat sehat	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Sehat	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Kurang sehat	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Tidak sehat	-	-	-	6,0%	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-
Properti residensial	-	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	2,8%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	4,0%	-	-	-
Properti komersial lainnya	-	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	5,6%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	8,0%	-	-	-
Properti yang tidak digunakan	-	-	-	12,0%	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	0,0%	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	8,0%	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
a. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas	-	-	-	0,0%	-	-	-
b. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang	-	-	-	30,0%	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,8%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,8%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,0%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,0%	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,8%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,8%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,0%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,0%	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
a. Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal	-	-	-	2,0%	-	-	-
b. Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo/saat	-	-	-	25,0%	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	2,0%	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kode Jenis Reasuradur	Nama Reasuradur	Tipe Reasuransi	Penyisihan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan atau Kontribusi yang ditahan di Perusahaan	Eksposur Reasuransi Netto ((G)-(H))	Faktor	Jumlah Deviasi
1	-		Reasuransi Otomatis (Treaty)	-	-	-	0,00%	-
2	-		-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
3	-		- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
4	-		- Surplus	-	-	-	0,00%	-
5	-		- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
6	-		- Cath X/L	-	-	-	0,00%	-
7	-		- Work X/L	-	-	-	0,00%	-
8	-		Reasuransi Fakultatif	-	-	-	0,00%	-
9	-		-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
10	-		- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
11	-		- Surplus	-	-	-	0,00%	-
12	-		- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
13	-			-	-	-	0,00%	-
14	-			-	-	-	0,00%	-
15	-			-	-	-	0,00%	-
16	-			-	-	-	0,00%	-
17	-			-	-	-	0,00%	-
18	-			-	-	-	0,00%	-
19	-			-	-	-	0,00%	-
20	-			-	-	-	0,00%	-
21	-			-	-	-	0,00%	-
22	-			-	-	-	0,00%	-
23	-			-	-	-	0,00%	-
24	-			-	-	-	0,00%	-
25	-			-	-	-	0,00%	-
26	-			-	-	-	0,00%	-
27	-			-	-	-	0,00%	-
28	-			-	-	-	0,00%	-
29	-			-	-	-	0,00%	-
30	-			-	-	-	0,00%	-
31	-			-	-	-	0,00%	-
32	-			-	-	-	0,00%	-
33	-			-	-	-	0,00%	-
34	-			-	-	-	0,00%	-
35	-			-	-	-	0,00%	-
36	-			-	-	-	0,00%	-
37	-			-	-	-	0,00%	-
38	-			-	-	-	0,00%	-
39	-			-	-	-	0,00%	-
40	-			-	-	-	0,00%	-
41	-			-	-	-	0,00%	-
42	-			-	-	-	0,00%	-
43	-			-	-	-	0,00%	-
44	-			-	-	-	0,00%	-
45	-			-	-	-	0,00%	-
46	-			-	-	-	0,00%	-
47	-			-	-	-	0,00%	-
48	-			-	-	-	0,00%	-
49	-			-	-	-	0,00%	-
50	-			-	-	-	0,00%	-
51	-			-	-	-	0,00%	-



MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO PASAR  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi			Total
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru dan Dana	PAYDI (digaransi)	
Risiko Pasar (A)	-	-	-	-
Risiko Pasar (B)	-	-	-	-
Risiko Pasar (C)	-	-	-	-
Total Risiko Pasar	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO PASAR - PERUBAHAN HARGA PASAR  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD			Faktor	Jumlah Deviasi		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	PAYDI (digaransi)		Dana Perusahaan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	PAYDI (digaransi)
Investasi							
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Termasuk IDX30 atau JII	-	-	-	15,0%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa Indonesia	-	-	-	20,0%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa luar negeri	-	-	-	30,0%	-	-	-
Saham penyusun indeks utama bursa utama negara Asia Pasifik	-	-	-	20,0%	-	-	-
Saham Lainnya	-	-	-	30,0%	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat berharga syariah negara (SBSN)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang (SBPU)	-	-	-	6,0%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas atau indeks syariah	-	-	-	16,0%	-	-	-
Campuran*)	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perusahaan	-	-	-	0,0%	-	-	-
Dana Tabarru	-	-	-	0,0%	-	-	-
PAYDI (digaransi)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	0%	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	10,0%	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	10,0%	-	-	-
Tidak Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	20,0%	-	-	-
Penyertaan langsung pada Perusahaan dengan tujuan khusus (SPV)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi 4% atau lebih	-	-	-	7,0%	-	-	-
Hasil Investasi 2% - 4%	-	-	-	15,0%	-	-	-
Hasil Investasi kurang dari 2%	-	-	-	40,0%	-	-	-
Emas murni	-	-	-	3,0%	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	10,0%	-	-	-
BUKAN INVESTASI							
Property Bukan Investasi	-	-	-	4,0%	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-





MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
 RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'
PKrf	-	-
PKo	-	-
Max((PKrf-PKo),0)	-	-
PUrf	-	-
PUo	-	-
Max((PUrf-PUo),0)	-	-
fPHI	15%	15%
PHI	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU  
RISIKO ASURANSI  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi
I. Total max $((PK^* - PK), 0)$	-
II. Total $((PAKYBMPi - ARi)fpki)$	-
III. Total $((PKli - ARi)fpkli)$	-
IV. Total $((PRBi - ARi)fpbi)$	-
Total Deviasi	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	PK	PK*	Jumlah Deviasi
Kematian Jangka Warsa	-	-	-
Endowment dan/atau Kombinasinya	-	-	-
Seumur Hidup	-	-	-
Anuitas	-	-	-
Kematian Ekawarsa	-	-	-
Kesehatan	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-
Lainnya	-	-	-
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	PAKYBMPi	ARi	fpki	Jumlah Deviasi PAKYBMPi
Kematian Jangka Warsa	-	-	10%	-
Endowment dan/atau Kombinasinya	-	-	10%	-
Seumur Hidup	-	-	10%	-
Anuitas	-	-	10%	-
Kematian Ekawarsa	-	-	10%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Lainnya	-	-	10%	-
II. Total ((PAKYBMPi - ARi)fpki	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Jumlah Deviasi PKli	ARi	fpkli	Jumlah Deviasi PKli
Kematian Jangka Warsa	-	-	10%	-
Endowment dan/atau Kombinasinya	-	-	10%	-
Seumur Hidup	-	-	10%	-
Anuitas	-	-	10%	-
Kematian Ekawarsa	-	-	10%	-
Kesehatan	-	-	20%	-
Kecelakaan Diri	-	-	20%	-
Lainnya	-	-	10%	-
III. Total ((PKli - ARi)fpkli)	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO  
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	PRBi (Gross)	ARi	fcbi	Jumlah Deviasi PRBi
Kematian Jangka Warsa	-	-	10%	-
Endowment dan/atau Kombinasinya	-	-	10%	-
Seumur Hidup	-	-	10%	-
Anuitas	-	-	10%	-
Kematian Ekawarsa	-	-	10%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Lainnya	-	-	10%	-
IV. Total ((PRBi - ARi)fcbi)	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO

RISIKO OPERASIONAL

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Tabarru dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan
I.Risiko Operasional Perusahaan	-	
a. Beban Umum dan Administrasi	-	-
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-
c. Risiko Operasional = $(1\% * (a-b))$	-	-
d. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-
e. Risiko Operasional = $(50\% * d)$	-	-
f. Sub Total Risiko Operasional Perusahaan (c+e)	-	-
II.Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)	-	
g. Aset Dana PAYDI	-	-
h. Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI = $(1\% * g)$ )	-	-
III.Risiko Operasional Dana Tabarru' (RODT)	-	-
i. Investasi Dana Tabarru'	-	-
j. Sub Total RODT = $(1\% * i)$	-	-
Total Deviasi	-	-





RINCIAN A-120. Rincian Tagihan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Debitur	Kode Kategori Usaha / Kategori Debitur	Kode Jenis Tagihan	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Mulai	Kode Mata Uang	Kode Peringkat Debitur	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)	AYD (Juta Rp)
1		-	-	-		-	-	-	-	-
2		-	-	-		-	-	-	-	-
3		-	-	-		-	-	-	-	-
4		-	-	-		-	-	-	-	-
5		-	-	-		-	-	-	-	-
6		-	-	-		-	-	-	-	-
7		-	-	-		-	-	-	-	-
8		-	-	-		-	-	-	-	-
9		-	-	-		-	-	-	-	-
10		-	-	-		-	-	-	-	-
11		-	-	-		-	-	-	-	-
12		-	-	-		-	-	-	-	-
13		-	-	-		-	-	-	-	-
14		-	-	-		-	-	-	-	-
15		-	-	-		-	-	-	-	-
16		-	-	-		-	-	-	-	-
17		-	-	-		-	-	-	-	-
18		-	-	-		-	-	-	-	-
19		-	-	-		-	-	-	-	-
20		-	-	-		-	-	-	-	-
21		-	-	-		-	-	-	-	-
22		-	-	-		-	-	-	-	-
23		-	-	-		-	-	-	-	-
24		-	-	-		-	-	-	-	-
25		-	-	-		-	-	-	-	-
26		-	-	-		-	-	-	-	-
27		-	-	-		-	-	-	-	-
28		-	-	-		-	-	-	-	-
29		-	-	-		-	-	-	-	-
30		-	-	-		-	-	-	-	-
31		-	-	-		-	-	-	-	-
32		-	-	-		-	-	-	-	-
33		-	-	-		-	-	-	-	-
34		-	-	-		-	-	-	-	-
35		-	-	-		-	-	-	-	-
36		-	-	-		-	-	-	-	-
37		-	-	-		-	-	-	-	-
38		-	-	-		-	-	-	-	-
39		-	-	-		-	-	-	-	-
40		-	-	-		-	-	-	-	-
41		-	-	-		-	-	-	-	-
42		-	-	-		-	-	-	-	-
43		-	-	-		-	-	-	-	-
44		-	-	-		-	-	-	-	-
45		-	-	-		-	-	-	-	-
46		-	-	-		-	-	-	-	-
47		-	-	-		-	-	-	-	-
48		-	-	-		-	-	-	-	-
49		-	-	-		-	-	-	-	-
50		-	-	-		-	-	-	-	-

## RINCIAN A-130. Rincian Aset Lain

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Aset	Dasar Penilaian	Kode Jenis Dana	Nilai Pasar / Apraisal	Saldo Juta (Rp)	Keterangan
1		-	-	-	-	
2		-	-	-	-	
3		-	-	-	-	
4		-	-	-	-	
5		-	-	-	-	
6		-	-	-	-	
7		-	-	-	-	
8		-	-	-	-	
9		-	-	-	-	
10		-	-	-	-	
11		-	-	-	-	
12		-	-	-	-	
13		-	-	-	-	
14		-	-	-	-	
15		-	-	-	-	
16		-	-	-	-	
17		-	-	-	-	
18		-	-	-	-	
19		-	-	-	-	
20		-	-	-	-	
21		-	-	-	-	
22		-	-	-	-	
23		-	-	-	-	
24		-	-	-	-	
25		-	-	-	-	
26		-	-	-	-	
27		-	-	-	-	
28		-	-	-	-	
29		-	-	-	-	
30		-	-	-	-	
31		-	-	-	-	
32		-	-	-	-	
33		-	-	-	-	
34		-	-	-	-	
35		-	-	-	-	
36		-	-	-	-	
37		-	-	-	-	
38		-	-	-	-	
39		-	-	-	-	
40		-	-	-	-	
41		-	-	-	-	
42		-	-	-	-	
43		-	-	-	-	
44		-	-	-	-	
45		-	-	-	-	
46		-	-	-	-	
47		-	-	-	-	
48		-	-	-	-	
49		-	-	-	-	
50		-	-	-	-	

RINCIAN A-210. Rincian Utang  
Laporan Keuangan  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama	Kode Jenis Utang	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Periode Mulai	Kode Mata Uang	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)
1		-	-		-	-	-
2		-	-		-	-	-
3		-	-		-	-	-
4		-	-		-	-	-
5		-	-		-	-	-
6		-	-		-	-	-
7		-	-		-	-	-
8		-	-		-	-	-
9		-	-		-	-	-
10		-	-		-	-	-
11		-	-		-	-	-
12		-	-		-	-	-
13		-	-		-	-	-
14		-	-		-	-	-
15		-	-		-	-	-
16		-	-		-	-	-
17		-	-		-	-	-
18		-	-		-	-	-
19		-	-		-	-	-
20		-	-		-	-	-
21		-	-		-	-	-
22		-	-		-	-	-
23		-	-		-	-	-
24		-	-		-	-	-
25		-	-		-	-	-
26		-	-		-	-	-
27		-	-		-	-	-
28		-	-		-	-	-
29		-	-		-	-	-
30		-	-		-	-	-
31		-	-		-	-	-
32		-	-		-	-	-
33		-	-		-	-	-
34		-	-		-	-	-
35		-	-		-	-	-
36		-	-		-	-	-
37		-	-		-	-	-
38		-	-		-	-	-
39		-	-		-	-	-
40		-	-		-	-	-
41		-	-		-	-	-
42		-	-		-	-	-
43		-	-		-	-	-
44		-	-		-	-	-
45		-	-		-	-	-
46		-	-		-	-	-
47		-	-		-	-	-
48		-	-		-	-	-
49		-	-		-	-	-
50		-	-		-	-	-







**RINCIAN POLIS**

Kode Produk	Kode Polis Tradisional /PAYDI	Kode Jenis Polis	Kode Cara Bayar	Kode Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Couterparty Pemegang Polis	Status (Aktif/Non Aktif)	Kode Inforce/Not Inforce	Jumlah Polis	Jumlah Peserta	Jumlah Manfaat Asuransi Syariah (Jutaan Rp)
								Peserta Lanjutan			
								Peserta Baru			
								Pemulihan Kembali Kepesertaan			
								Perubahan Dari Lini Asuransi Lain			
								Peserta Meninggal Dunia			
								Kepesertaan Habis Kontrak			
								Pemutusan Kontrak Produk Yang Dihasilkan Pada Tahun Bersangkutan			
								Perubahan Ke Lini Asuransi Lain			











RINCIAN A-250.  
PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA (CATASTROPHIC RISK)  
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Penyisihan Atas Risiko			Penyisihan Atas Risiko Bencana untuk polis-polis yang Akan Jatuh Tempo < 1 tahun	Periode Sebelumnya
	Tradisional	PAYDI	Total		
A. Asuransi Jiwa			-		
1. Kematian Jangka Warsa (Term Life)	-	-	-	-	-
2. Dwiguna (Endowment) dan/atau Kombinasinya	-	-	-	-	-
3. Seumur Hidup (Whole Life)	-	-	-	-	-
4. Kesehatan	-	-	-	-	-
5. Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-
6. Lainnya	-	-	-	-	-
Sub Jumlah A	-	-	-	-	-
B. Anuitas	-	-	-	-	-
Sub Jumlah B	-	-	-	-	-
Total Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-

C-110. LAPORAN DANA JAMINAN  
Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan  
Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah
I. Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan	
1. Saldo Awal Dana Jaminan	-
2. Penempatan Dana Jaminan Baru:	-
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
3. Pencairan Dana Jaminan:	-
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
4. Saldo Akhir Dana Jaminan (1 + 2 – 3)	-
II. Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan Tahunan	
1. Ekuitas minimum yang dipersyaratkan	-
2. Penyisihan kontribusi tabarru' dan tanahud	-
3. Penyisihan kontribusi tabarru' yang belum merupakan pendapatan	-
4. Jumlah Penyisihan (2+3)	-
5. Penyisihan atas PAYDI	-
6. Batas Minimum Dana Jaminan I (20% x 1)	-
7. Batas Minimum Dana Jaminan II (2% x 5) + (5% x 4)	-
8. Batas Minimum Dana Jaminan Yang Digunakan ( Nilai antara 6 dan 7 mana yang lebih besar)	-
9. Dana Jaminan Yang Dimiliki	-
10. Kelebihan (Kekurangan) Dana Jaminan (9-8)	-











RINCIAN G-120. Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris			Pemasar Badan Hukum		Jumlah Pemasar Perorangan	Nama Produk Yang Dipasarkan	Jumlah Peserta	Kontribusi Bruto (Rp)
	Jenis Saluran Pemasaran	Wilayah Pemasaran	Kategori Badan Hukum	Jumlah Badan Hukum				
1	-	-	-	-	-		-	-
2	-	-	-	-	-		-	-
3	-	-	-	-	-		-	-
4	-	-	-	-	-		-	-
5	-	-	-	-	-		-	-
6	-	-	-	-	-		-	-
7	-	-	-	-	-		-	-
8	-	-	-	-	-		-	-
9	-	-	-	-	-		-	-
10	-	-	-	-	-		-	-
11	-	-	-	-	-		-	-
12	-	-	-	-	-		-	-
13	-	-	-	-	-		-	-
14	-	-	-	-	-		-	-
15	-	-	-	-	-		-	-
16	-	-	-	-	-		-	-
17	-	-	-	-	-		-	-
18	-	-	-	-	-		-	-
19	-	-	-	-	-		-	-
20	-	-	-	-	-		-	-
21	-	-	-	-	-		-	-
22	-	-	-	-	-		-	-
23	-	-	-	-	-		-	-
24	-	-	-	-	-		-	-
25	-	-	-	-	-		-	-
26	-	-	-	-	-		-	-
27	-	-	-	-	-		-	-
28	-	-	-	-	-		-	-
29	-	-	-	-	-		-	-
30	-	-	-	-	-		-	-
31	-	-	-	-	-		-	-
32	-	-	-	-	-		-	-
33	-	-	-	-	-		-	-
34	-	-	-	-	-		-	-
35	-	-	-	-	-		-	-
36	-	-	-	-	-		-	-
37	-	-	-	-	-		-	-
38	-	-	-	-	-		-	-
39	-	-	-	-	-		-	-
40	-	-	-	-	-		-	-
41	-	-	-	-	-		-	-
42	-	-	-	-	-		-	-
43	-	-	-	-	-		-	-
44	-	-	-	-	-		-	-
45	-	-	-	-	-		-	-
46	-	-	-	-	-		-	-
47	-	-	-	-	-		-	-
48	-	-	-	-	-		-	-
49	-	-	-	-	-		-	-
50	-	-	-	-	-		-	-

**Pelaksanaan Seleksi dan Akuntabilitas Saluran Pemasaran (Triwulanan)**

Periode pelaksanaan<sup>\*)</sup>:

Kategori Saluran Pemasaran <sup>1)</sup>	Jumlah Pihak yang Diseleksi <sup>2)</sup>	Jumlah Pihak Baru <sup>3)</sup>	Jumlah Pihak yang Mengikuti Pelatihan <sup>4)</sup>	Jumlah Pihak yang Lulus Pelatihan <sup>5)</sup>	Jumlah Pihak yang Mengikuti Ujian Sertifikasi Pemasar <sup>6)</sup>	Jumlah Pihak yang Lulus Sertifikasi Pemasar <sup>7)</sup>	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi Produk yang	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi Produk yang	Jumlah Pemasar yang Dilakukan Evaluasi <sup>10)</sup>	Jumlah Pemasar yang Diberhentikan <sup>11)</sup>

Petunjuk pengisian:

\*) Diisi waktu pelaksanaan seleksi: Triwulan 1 (1 Januari-31 Maret), Triwulan 2 (1 April-30 Juni), Triwulan 3 (1 Juli-30 September), atau Triwulan 4 (1 Oktober-31 Desember)

1) Diisi dengan saluran pemasaran yang dievaluasi: direct marketing, agen Asuransi, bank, BUSB, atau tenaga Pemasar

2) Diisi jumlah orang yang diseleksi sesuai periode pelaksanaan

3) Diisi jumlah orang yang baru direkrut Perusahaan dari proses seleksi sesuai periode pelaksanaan

4) Diisi jumlah orang yang mengikuti pelatihan sesuai periode pelaksanaan

5) Diisi jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan lulus dalam pelatihan tersebut sesuai periode pelaksanaan

6) Diisi jumlah orang yang mengikuti ujian sertifikasi keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian sesuai periode pelaksanaan

7) Diisi jumlah orang yang lulu ujian sertifikasi keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian sesuai periode pelaksanaan

8) Diisi jumlah materi pemasaran dan RIPLAY yang dievaluasi apakah sesuai dengan yang ditetapkan atau disetujui Perusahaan sesuai periode pelaksanaan

9) Diisi jumlah materi pemasaran dan RIPLAY yang diperbaiki dan disesuaikan dengan persetujuan Perusahaan sesuai periode pelaksanaan

10) Diisi jumlah orang yang dievaluasi Perusahaan, misalnya kesesuaian pihak pemasar dalam menyampaikan informasi, kepatuhan terhadap perjanjian, dll sesuai periode pelaksanaan

11) Diisi jumlah orang yang diberhentikan Perusahaan karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama dan ketentuan yang berlaku sesuai periode pelaksanaan

**1. Kinerja Subdana PAYDI**

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
Nama Subdana	Mata Uang	Kurs	NAB	NAB/Unit	Hasil Investasi Tahunan	Hasil Investasi Benchmark	SHARPE Ratio

- i Nama Subdana PAYDI
- ii Mata uang yang digunakan Subdana PAYDI
- iii Kurs yang digunakan pada saat pelaporan, menggunakan kurs tengah BI (dalam rupiah)
- iv Nilai Aset Bersih (dalam mata uang Subdana PAYDI)
- v Nilai Aset Bersih / jumlah unit, hanya diisi oleh PAYDI berbentuk unit (dalam mata uang Subdana PAYDI)
- vi Hasil investasi Subdana PAYDI satu tahun terakhir (dalam %)
- vii Hasil investasi acuan yang ditetapkan perusahaan pada waktu pembuatan Subdana PAYDI, selama satu tahun terakhir (dalam %)
- viii (Hasil Investasi Tahunan - Risk Free Rate) / Standar Deviasi hasil investasi subdana PAYDI; Risk free rate menggunakan tingkat bunga bank umum yang dijamin LPS.

**2. Rincian Investasi Subdana PAYDI**

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv
Keterangan Akun	Nama Subdana	Status Aset	Jenis Investasi	Dalam/Luar Negeri	Mata Uang	Kurs	Kode (Counterparty)	Nama (Counterparty)	Apakah Counterparty	Nomor Seri	Kategori	Sektor Ekonomi	Nama Manajer
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
<b>Total</b>													

x	xvi	xvii	xviii	xix	xx	xxi	xxii	xxiii	xxiv	xxv	xxvi	xxvii	
Keterangan Akun	Peringkat	Klaster	Jenis Jaminan	Jangka Waktu	Nilai Pasar Jaminan	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Gram)	Saldo	% NAB Subdana	Saldo Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Target Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Hasil Investasi	Keterangan
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
<b>Total</b>													

- i Diisi dengan nama portofolio investasi pada subdana PAYDI
- ii Nama Subdana PAYDI
- iii Diisi dengan status aset berdasarkan peruntukannya, yaitu "Aset Subdana PAYDI Non Garansi", "Aset Subdana PAYDI Garansi", "Aset Back Up Subdana PAYDI Garansi". Yang dimaksud dengan aset back-up adalah aset perusahaan yang disediakan untukantisipasi penambahan Subdana PAYDI digaransi.
- vi Diisi dengan mata uang aset investasi.
- vii Diisi dengan kurs tengah Bank Indonesia dari mata uang aset investasi pada tanggal laporan.
- x Diisi "Ya" atau "Tidak". Definisi hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 71/2016 dan POJK 72/2016.
- xxii Diisi persentase masing-masing underlying aset dari NAB Subdana PAYDI
- xxv Diisi target hasil investasi tahunan untuk masing-masing underlying asset, dalam persentase.
- xxvi Diisi hasil investasi tahunan untuk masing-masing underlying asset, dalam persentase.

**3. Ketersediaan Aset untuk PAYDI yang Digaransi**

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
Nama Subdana	Karakteristik Garansi yang Diberikan					Perkembangan Dana			Estimasi Kebutuhan Aset Back-Up Subdana PAYDI Digaransi 1 Bulan Kedepan
	Jenis Garansi yang Diberikan	Mata Uang	Kurs	Asumsi / Target Tingkat Hasil Investasi	Jumlah Peserta	Aset	Liabilitas atas Subdana yang Digaransi	Rata-rata Penambahan Subdana PAYDI Garansi Bulanan	
<b>Total</b>									

i Diisi nama Subdana PAYDI

ii Diisi jenis garansi yang diberikan, misalnya garansi tingkat hasil investasi, garansi pokok investasi.

iii Diisi mata uang Subdana PAYDI

iv Diisi kurs mata uang Subdana PAYDI

v Diisi asumsi tingkat hasil investasi untuk memenuhi garansi yang diberikan.

vi Diisi jumlah peserta yang memiliki Subdana PAYDI

vii Diisi total aset Subdana PAYDI yang digaransi.

viii Diisi total liabilitas pada PAYDI yang digaransi, untuk bagian manfaat investasi (nilai tunai) setelah memperhitungkan garansi yang diberikan.

ix Diisi rata-rata penambahan Subdana PAYDI Garansi secara bulanan.

x Diisi estimasi kebutuhan Aset Back-Up Subdana PAYDI Digaransi dalam 1 bulan yang akan datang.



No	Kolom	Petunjuk Pengisian
1	Nama Produk	Diisi dengan nama produk yang mendapatkan izin dari OJK
2	Kode Produk	Diisi dengan kode produk yang dibuat oleh perusahaan, kode produk ini tidak boleh berubah
3	Status Produk	Diisi dengan pilihan berupa produk baru, produk masih dijual, dan produk sudah tidak dijual
4	Kanal Distribusi	Diisi dengan <b>kode</b> saluran pemasaran produk yaitu: <b>1201</b> Direct <b>1202</b> Agency <b>1203</b> Bancassurance <b>1204</b> Badan Usaha Selain Bank - Agen Laku Pandai <b>1205</b> Badan Usaha Selain Bank - Selain Agen Laku Pandai <b>1206</b> Tenaga Pemasar (Mikro) - Agen Laku Pandai <b>1207</b> Tenaga Pemasar (Mikro) - Selain Agen Laku Pandai
5	Tanggal Izin Produk	Diisi dengan tanggal persetujuan OJK atas produk tersebut
6	Lini Usaha	Diisi dengan salah satu <b>kode</b> dari lini usaha asuransi umum sebagai berikut: <b>1101</b> Harta Benda (Property) <b>1102</b> Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident) <b>1103</b> Pengangkutan (Marine Cargo) <b>1104</b> Rangka Kapal (Marine Hull) <b>1105</b> Rangka Pesawat (Aviation Hull) <b>1106</b> Satelit <b>1107</b> Energi Onshore (Oil and Gas) <b>1108</b> Energi Offshore (Oil and Gas) <b>1109</b> Rekayasa (Engineering) <b>1110</b> Tanggung Gugat (Liability) <b>1111</b> Kredit (Credit) <b>1112</b> Aneka <b>1113</b> Kesehatan <b>1114</b> Kecelakaan Diri
7	Estimasi Profit/Loss	Diisi dengan pilihan hasil estimasi berupa "Profit" atau "Loss" berdasarkan metode perhitungan estimasi
8	Metode Perhitungan Estimasi	Diisi dengan pilihan metode perhitungan estimasi yaitu Profit Testing, Embedded Value, Value of New Business, dan
9	Kontribusi - Jumlah Kontribusi (Rp)	Diisi dengan pendapatan Kontribusi yang berasal dari Kontribusi bruto (sebelum dikurangi komisi) untuk produk tersebut dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
10	Kontribusi - Jumlah Polis	Diisi dengan jumlah polis yang melakukan pembayaran Kontribusi (untuk Kontribusi kumpulan, tetap dihitung berdasarkan polis)
11	Klaim - Jumlah Klaim (Rp)	Diisi dengan jumlah klaim bruto dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
12	Klaim - Jumlah Polis	Diisi sesuai dengan jumlah polis yang melakukan klaim
13	Penyisihan Teknis – Penyisihan Kontribusi	Diisi dengan jumlah Penyisihan Kontribusi (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
14	Penyisihan Teknis – PAPYBMP	Diisi dengan jumlah PAPYBMP (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
15	Penyisihan Ujroh	Diisi dengan jumlah penyisihan teknis bagi Dana Perusahaan (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
16	Penyisihan Teknis – Penyisihan Klaim Dalam Proses	Diisi dengan jumlah Penyisihan Klaim Dalam Proses (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam Rincian Penyisihan Klaim
17	Keterangan	Diisi dengan keterangan metode perhitungan estimasi yang digunakan apabila memilih isian "Lainnya" pada kolom 6, dan keterangan kolom-kolom lain yang relevan





No	Kolom	Petunjuk Pengisian
1	Nama Produk	Diisi dengan nama produk yang mendapatkan izin dari OJK
2	Kode Produk	Diisi dengan kode produk yang dibuat oleh perusahaan, kode produk ini tidak boleh berubah
3	Status Produk	Diisi dengan pilihan berupa produk baru, produk masih dijual, dan produk sudah tidak dijual
4	Kanal Distribusi	Diisi dengan <b>kode</b> saluran pemasaran produk yaitu: <b>1201</b> Direct <b>1202</b> Agency <b>1203</b> Bancassurance <b>1204</b> Badan Usaha Selain Bank - Agen Laku Pandai <b>1205</b> Badan Usaha Selain Bank - Selain Agen Laku Pandai <b>1206</b> Tenaga Pemasar (Mikro) - Agen Laku Pandai <b>1207</b> Tenaga Pemasar (Mikro) - Selain Agen Laku Pandai
5	Tanggal Izin Produk	Diisi dengan tanggal persetujuan OJK atas produk tersebut
6	Lini Usaha	Diisi dengan salah satu <b>kode</b> dari lini usaha asuransi umum sebagai berikut: <b>1101</b> Harta Benda (Property) <b>1102</b> Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident) <b>1103</b> Pengangkutan (Marine Cargo) <b>1104</b> Rangka Kapal (Marine Hull) <b>1105</b> Rangka Pesawat (Aviation Hull) <b>1106</b> Satelit <b>1107</b> Energi Onshore (Oil and Gas) <b>1108</b> Energi Offshore (Oil and Gas) <b>1109</b> Rekayasa (Engineering) <b>1110</b> Tanggung Gugat (Liability) <b>1111</b> Kredit (Credit) <b>1112</b> Aneka <b>1113</b> Kesehatan <b>1114</b> Kecelakaan Diri
7	Estimasi Profit/Loss	Diisi dengan pilihan hasil estimasi berupa "Profit" atau "Loss" berdasarkan metode perhitungan estimasi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran
8	Metode Perhitungan Estimasi	Diisi dengan pilihan metode perhitungan estimasi yaitu Profit Testing, Embedded Value, Value of New Business, dan Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran
9	Kontribusi - Jumlah Kontribusi (Rp)	Diisi dengan pendapatan Kontribusi yang berasal dari Kontribusi bruto (sebelum dikurangi komisi) untuk produk tersebut dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
10	Kontribusi - Jumlah Polis	Diisi dengan jumlah polis yang melakukan pembayaran Kontribusi (untuk Kontribusi kumpulan, tetap dihitung berdasarkan polis)
11	Klaim - Jumlah Klaim (Rp)	Diisi dengan jumlah klaim bruto dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
12	Klaim - Jumlah Polis	Diisi sesuai dengan jumlah polis yang melakukan klaim

13	Penyisihan Teknis – Penyisihan Kontribusi	Diisi dengan jumlah Penyisihan Kontribusi (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
14	Penyisihan Teknis – PAPYBMP	Diisi dengan jumlah PAPYBMP (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
15	Penyisihan Ujroh	Diisi dengan jumlah penyisihan teknis bagi Dana Perusahaan (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
16	Penyisihan Teknis – Penyisihan Klaim	Diisi dengan jumlah Penyisihan Klaim Dalam Proses (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam
17	Asumsi - Loss Ratio (%)	Diisi berdasarkan tingkat loss ratio yang digunakan ketika melaporkan produk baru
18	Asumsi - Morbidita	Diisi berdasarkan asumsi tabel morbidita yang digunakan ketika melaporkan produk baru
19	Asumsi - Beban Komisi (Rp)	Diisi dengan asumsi jumlah komisi dibayar atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
20	Asumsi - Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Diisi berdasarkan asumsi jumlah biaya umum & administrasi atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
21	Asumsi - Hasil Underwriting (Rp)	Diisi berdasarkan asumsi hasil underwriting atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
22	Realisasi - Loss Ratio (%)	Diisi berdasarkan tingkat loss ratio atas produk tersebut
23	Realisasi - Morbidita	Diisi berdasarkan realisasi tabel morbidita atas produk tersebut
24	Realisasi - Beban Komisi (Rp)	Diisi dengan realisasi jumlah komisi dibayar atas produk tersebut
25	Realisasi - Biaya Umum &	Diisi berdasarkan realisasi jumlah biaya umum & administrasi atas produk tersebut
26	Realisasi - Hasil Underwriting (Rp)	Diisi berdasarkan realisasi hasil underwriting atas produk tersebut
27	Dukungan Reasuransi	Diisi berdasarkan dukungan reasuransi atas produk tersebut
28	Dampak deviasi terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan	Diisi dengan deskripsi singkat mengenai dampak dari deviasi (selisih asumsi dan realisasi) terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan
29	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi (jika ada)	Diisi dengan deskripsi singkat mengenai mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi
30	Keterangan	Diisi dengan keterangan metode perhitungan estimasi yang digunakan apabila memilih isian “Lainnya” pada kolom 6

**PROFIL PERUSAHAAN**

**PERUSAHAAN ASURANSI JIWA/UMUM/REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

- 1 Nama Perusahaan : "Nama Perusahaan"
- 2 Alamat lengkap : "Alamat Perusahaan"
- 3 No. Telepon dan Fax. :
- 4 E-mail :
- 5 NPWP :
- 6 No. & Tanggal Izin Usaha :
- 7 a. Jumlah Cabang/  
Perwakilan :
- b. Jumlah Tertanggung :
- 8 Auditor Eksternal :
- 9 Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kepemilikan Saham	
		Rupiah	Persentase
Total			

10 Pengendali :

11 Direksi dan Komisaris

Nama Direksi	Jabatan	Nama Komisaris	Jabatan

12 PIC Laporan

Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP

13 Tenaga Dengan Kualifikasi Ahli

Nama	Kualifikasi dan No. Registrasi	Lembaga Pemberi Kualifikasi	Bidang Keahlian

14 Jumlah Tenaga Kerja :  
(termasuk Direksi/Pengurus yang setara)

15 Jumlah Agen :  
a. Badan Hukum :  
b. Perorangan :

16 Jumlah Pialang :

**"Tempat", "Tanggal"**  
**"Nama Perusahaan"**  
**"Nama Direksi"**  
**"Jabatan Direksi"**

**A. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah**

**1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS lainnya serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Ket
1.						
2.						
Dst.						

b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst					



No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

Keterangan:

\*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb atau  
 Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/  
 ipar,dsb

c. Dewan Komisaris

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

- 2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

- 3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

- 4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(Resume Hasil Rapat)
----------------------

- 5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

- 6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Ket: Nama-nama perusahaan (Indonesia/ Luar Negeri)
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.											
2.											
Dst.											

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan; B. perusahaan perasuransian lain;

C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan

D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

- 7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi,

anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

Keterangan:

\*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb atau Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

d. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatuhan				
1.								
2.								
Dst								

- 2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:



No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(Resume Hasil Rapat)

e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif</li> <li>faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja</li> </ul>	upaya memperbaiki kinerja Perusahaan

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

f. Komite-Komite

1) Komite di bawah Direksi

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Investasi	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pengembangan Produk	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

g. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Nomor RUPS			

h. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar				
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar				
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar				
Rp500juta ke bawah				

Keterangan:\*) yang diminta secara tunai

i. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
Dst					

j. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*)

No	Fungsi yg dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kontrak
1.				
2.				
Dst.				

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan.
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**			
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian			
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi			
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian			
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan			
7.	Perusahaan memiliki auditor internal			
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko			
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT			

\*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda “√”

\*\*\*) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

## **2. Penilaian Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

### **Cara Pengisian:**

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

A= Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.

B= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.

C= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.

D= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

### **Penafsiran Hasil**

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak applicable", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan score yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

### **I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU**

- |  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan                                     | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 2. Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :                        |          |          |          |          |          |
| 2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 2.2. Kebijakan bagi organ perusahaan   | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

2.3. Kebijakan bagi pegawai	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
2.4. Kebijakan bagi pemegang polis	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
2.5. Kebijakan bagi mitra usaha	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
2.6. Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
3. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :			
4.1. Benturan kepentingan	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
4.2 Pemberian hadiah dan donasi	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
4.3. Kepatuhan terhadap peraturan	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
4.4 Kerahasiaan informasi	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
5. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan:			
5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
5.2 Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
5.3 Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
6. Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis.yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>

**II. ORGAN PERUSAHAAN**

**A.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

1. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
2. Kebijakan perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<b>A B</b>	<b>C D</b>	<b>E</b>
3. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
4. Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini:			
4.1 Panggilan RUPS	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
4.2 Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
4.3 Tersedianya informasi di kantor pusat perusahaan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
4.4 Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>
4.5 Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai hasil RUPS	<b>Tidak</b>		<b>Ya</b>

5. Dalam pengambilan keputusan RUPS :
- 5.1 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus *Fit and Proper Test* bagi perusahaan **Tidak** **Ya**
- 5.2 Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi atau fungsi yang menangani Nominasi dan Remunerasi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi **A B C D E**
- 5.3 Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan **A B C D E**
- 5.4 Melakukan penetapan auditor eksternal **Tidak** **Ya**
- 5.5 Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan **A B C D E**
- 5.6 Memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dalam hal pemberian bonus , tantiem dan dividen **A B C D E**

**B.Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:
- 1.1.Pengendalian Internal **A B C D E**
- 1.2.Manajemen risiko **A B C D E**
- 1.3.Imbal hasil (*return* ) yang wajar bagi Pemegang Saham **A B C D E**
- 1.4.Kebijakan yang terkait kepentingan stakeholders **A B C D E**
- 1.5.Sukses kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi **A B C D E**
- 1.6.Implementasi GCG **A B C D E**
2. Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:
- 2.1.Sasaran usaha perusahaan **A B C D E**
- 2.2.Rencana jangka panjang perusahaan **A B C D E**
- 2.3.Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan **A B C D E**
- 2.4.Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan **A B C D E**
- 2.5.Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest* ). **A B C D E**
- 2.6.Kebijakan dan metode penilaian perusahaan **A B C D E**
- 2.7.Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan **A B C D E**
- 2.8.Struktur organisasi pada tingkat eksekutif **A B C D E**

**C.Dewan Komisaris**

**1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris**

- 1.1.Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan **Tidak** **Ya**
- 1.2.Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen **Tidak** **Ya**
- 1.3.Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku **Tidak** **Ya**
- 1.4.Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti \*):
- a. bidang asuransi **Tidak** **Ya**

b. bidang keuangan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
c. bidang manajemen.	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.5.Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.6.Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan diberi kesempatan membela diri	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.7.Tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.8.Tidak merangkap jabatan lebih dari 4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan lainnya	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.9.Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
<b>2. Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris</b>		
2.1.Memenuhi persyaratan <i>Fit and Proper Test</i>	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.2.Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	<b>A B C D E</b>	
2.3.Mematuhi dan melaksanakan GCG	<b>A B C D E</b>	
2.4.Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
<b>3. Kemampuan dan Integritas DPS</b>		
3.1.Mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional?	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.2.DPS telah mendapat persetujuan dari OJK	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.3.Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.4.Mematuhi dan melaksanakan GCG	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.5.Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.6.50% atau lebih anggota DPS berkewarganegaraan Indonesia	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
<b>4. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris</b>		
4.1.Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan perusahaan oleh Direksi	<b>A B C D E</b>	
4.2.Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional	<b>A B C D E</b>	
4.3.Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara , dengan ketentuan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS	<b>A B C D E</b>	
4.4.Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang perusahaan secara lengkap dan tepat waktu	<b>A B C D E</b>	
4.5.Dewan Komisaris memiliki Tata tertib dan Pedoman Kerja ( <i>charter</i> )	<b>A B C D E</b>	
4.6.Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya.	<b>A B C D E</b>	
4.7.Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan mendapatkan <i>acquid et decharge</i> dari RUPS	<b>A B C D E</b>	

4.8.Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.9.Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.10.Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda ( <i>dissenting opinion</i> ) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.11.Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

**5. Fungsi Pengawasan Dewan Syariah**

5.1.Informasi yang diberikan oleh Direksi kepada DPS disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
5.2.DPS melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran terhadap kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
5.3.DPS mengadakan rapat secara berkala	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
5.4.Setiap rapat DPS dibuat risalah rapat	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
5.5.Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda ( <i>dissenting opinions</i> ) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
5.6.Setiap anggota DPS baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat DPS	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

**6. Komite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)**

<b>6.1. Komite Audit</b>	<b>Tidak</b>	<b>lanjutkan ke 6.1.8.</b>			
Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan hal-hal berikut ini:	<b>Ada</b>				
6.1.1.Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
6.1.2.Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
6.1.3.Tindaklanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
6.1.4.Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
6.1.5.Tindaklanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
6.1.6.Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
6.1.7.Anggota Komite Audit terdiri dari :					
a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua atau Pihak Independen bagi Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak memiliki Komisaris Independen	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
b.anggota Dewan Komisaris	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
c.pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

**6.2. Komite Pemantau Risiko**

<b>6.2. Komite Pemantau Risiko</b>	<b>Tidak</b>	<b>lanjutkan ke 6.2.4.</b>			
Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:	<b>Ada</b>				
6.2.1.Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>



6.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi. **A B C D E**

6.2.3. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen; **Tidak Ya**
- b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuarial; dan **Tidak Ya**
- c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian **Tidak Ya**

**6.3. Komite Remunerasi dan Nominasi**

**Tidak lanjutkan ke  
Ada 6.3.11.**

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

6.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**

6.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi **A B C D E**

6.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan **A B C D E**

6.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan **A B C D E**

6.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan **A B C D E**

6.3.6. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris **A B C D E**

6.3.7. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi **A B C D E**

6.3.8. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**

6.3.9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi **A B C D E**

6.3.10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

- a. (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris **Tidak Ya**
- b. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia; dan **Tidak Ya**
- c. 1 (satu) orang anggota dari Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

6.3.11. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :

- |  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris                     | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi                             | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.          | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.       | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris                                    | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.                                     | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris                                | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi.                                       | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

**6.4. Komite Kebijakan Tata Kelola**

**Tidak lanjutkan ke Ada 6.4.4.**

Komite Kebijakan Corporate Governance (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi ) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- |   |              |          |          |          |           |
|---|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 6.4.1.Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) secara menyeluruh yang disusun Direksi                         | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 6.4.2.Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR         | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 6.4.3.Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari :  |              |          |          |          |           |
| a.Anggota Dewan Komisaris   | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| b.Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, pengalaman, dan kualitas di bidang <i>corporate governance</i>  | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 6.4.4.Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Tata Kelola, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut: |              |          |          |          |           |
| a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi  | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| b. Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR            | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |

**7. Komisaris Independen**

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

7.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham pengendali perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.2. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Direktur Perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris lainnya	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.4. Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.5. Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.6. Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain yang terafiliasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.7. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan lain yang terafiliasi	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.8. Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.9. Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari Perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.10. Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi.	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.11. Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi.	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.12. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
7.13. Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
7.14. Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
7.15. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

**D. Direksi**

**1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi**

1.1. Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi *)seperti :		
1.1.a Bidang Asuransi	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.1.b Bidang Keuangan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.1.c Bidang Manajemen	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.2. Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui mekanisme yang transparan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>

## 2. Persyaratan Anggota Direksi

2.1 Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.2. Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.3. Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perusahaan	<b>A B C D E</b>	
2.4. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG	<b>A B C D E</b>	
2.5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan perusahaan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.6. Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.7. Selain Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda yang bukan merupakan Perusahaan anak	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.8. Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang bukan Perusahaan Perasuransian	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>

## 3. Fungsi Direksi

### 3.1. Kepengurusan

3.1.1. Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan	<b>A B C D E</b>	
3.1.2. Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki, secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.	<b>A B C D E</b>	
3.1.3. Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan	<b>A B C D E</b>	
3.1.4. Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya	<b>A B C D E</b>	
3.1.5. Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja ( <i>charter</i> )	<b>A B C D E</b>	

### 3.2. Manajemen Risiko

3.2.1. Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan	<b>A B C D E</b>	
3.2.2. Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>

### 3.3. Pengendalian Internal

3.3.1. Perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.3.2. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.3.3. Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite Audit	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.3.4. Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
3.3.5. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>

3.3.6. Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3.7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3.8. Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3.9. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3.10. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan perusahaan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3.11. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>3.4. Komunikasi</b>					
3.4.1. Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders	<b>Tidak Ada lanjutan ke 3.4.2</b>				<b>Ya</b>
3.4.2. Dalam hal kompleksitas perusahaan belum mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi komunikasi dijabat oleh salah seorang anggota Direksi	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.4.3. Sekretaris Perusahaan harus mampu :					
a. Memastikan perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan perundangan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.4.4. Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.4.5. Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundangan dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan ( <i>compliance committee</i> ) tersendiri.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
<b>3.5. Aktuaria</b>					
3.5.1. Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut					
a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.5.2. Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan aktuaria untuk melakukan evaluasi kewajiban perusahaan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
<b>3.6. Investasi</b>					
3.6.1. Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
3.6.2. Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.6.3. Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan Direksi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.6.4. Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

menetapkan strategi investasi yang direncanakan					
3.6.5. Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.6.6. Perusahaan memiliki fungsi pengelolaan Investasi	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
<b>3.7. Pemasaran</b>					
3.7.1. Perusahaan memiliki Program Promosi ( <i>media plan</i> ) yang intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.7.2. Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat luas	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.7.3. Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.7.4. Perusahaan memiliki kontrak keagenan yang baku	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.7.5. Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.7.6. Perusahaan memiliki dan menerapkan Kode Etik Keagenan dalam pemasaran produknya	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.7.7. Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.7.8. Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemasaran	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
<b>3.8. Teknologi Informasi (TI)</b>					
3.8.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.8.2. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi untuk menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.8.3. Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI yang berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.8.4. Perusahaan memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> untuk bagian TI	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.8.5. Perusahaan melakukan audit TI secara berkala	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
3.8.6. Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>3.9. Tanggung Jawab Sosial</b>					
3.9.1. Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.9.2. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
<b>4. Pertanggungjawaban Direksi</b>					
4.1. Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain :					
4.2.1. Memuat paling sedikit:					
a. Laporan keuangan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
b. Laporan kegiatan perusahaan	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
c. Laporan pelaksanaan GCG	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>
4.2.2. Mendapat persetujuan RUPS	<b>Tidak</b>				<b>Ya</b>

4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
4.2.4. Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat melakukan penilaian.	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
4.3. Rapat Direksi					
4.3.1. Direksi mengadakan rapat secara berkala	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
4.3.2. Direksi menetapkan tata tertib rapat	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
4.3.3. Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			
4.3.4. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda ( <i>dissenting opinion</i> ) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4.3.5. Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>			

### III. PEMEGANG SAHAM

#### 1. Persyaratan Pemegang Saham

1.1. Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
1.3 Pemegang Saham Pengendali tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Perusahaan lain yang merupakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>

#### 2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

2.1. Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur yang benar	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.2. Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:		
a. Hak untuk hadir dalam RUPS	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>

#### 3. Kewajiban Pemegang Saham

3.1. Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.2. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.3. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3.4. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

praktik-praktik yang sehat di industri perasuransian

- |  |              |          |          |          |           |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 3.5. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 3.6. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat  | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 3.7. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat   | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 3.8. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS  | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 3.9. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui mekanisme RUPS  | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |

#### 4. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

- |  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.1. Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya   | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 4.2. Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan                         | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 4.3. Perusahaan menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 4.4. Perusahaan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang saham lainnya                         | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 4.5. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

#### IV. PEMANGKU KEPENTINGAN

##### A. Pemegang Polis

- |  |              |          |          |          |           |
|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :  |              |          |          |          |           |
| 1.1. Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis   | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 1.2. Perlindungan kepentingan pemegang polis   | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 1.3. Perlindungan kerahasiaan pemegang polis   | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 1.4. Evaluasi kebutuhan pemegang polis   | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 1.5. Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis  | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 1.6. Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip <i>utmost good faith</i> dengan integritas dan kompetensi yang tinggi | <b>A</b>     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  |
| 1.7. Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila diperlukan   | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |
| 2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis  |              |          |          |          |           |
| 2.1. Menyampaikan informasi kepada perusahaan secara jujur terkait   | <b>Tidak</b> |          |          |          | <b>Ya</b> |



data tertanggung dan obyek risiko		
2.2. Membayar premi tepat waktu	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.3. Melaporkan klaim ke perusahaan sesuai prosedur	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.4. Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan bekerjasama dengan <i>adjuster</i>	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>

**B. Pegawai**

1. Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :					
1.1. Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.2. Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang:					
1.2.1. Pola penetapan remunerasi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.2.2. Mengikutsertakan dalam pelatihan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.2.3. Penetapan jenjang karir	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.2.4. Penetapan persyaratan kerja	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.3. Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.4. Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.5. Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi bagi pegawai	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.6. Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :					
2.1 Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.2. Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.4. Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

**C. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain**

1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan persaingan usaha secara sehat	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2. Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada :					
2.1. Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.2. Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan dan akurat	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.3. Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
3. Perusahaan memiliki <i>coverage</i> otomatis dari perusahaan reasuransi	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
4. Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil risiko yang bersangkutan	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>

5. Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis (*treaty*) didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan **A B C D E**

**D.Perusahaan Penunjang**

**1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi**

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian **A B C D E**
- 1.2. Perusahaan memastikan bahwa pialang :
- 1.2.1. memiliki izin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi pialang **Tidak Ya**
- 1.2.2. menyampaikan semua informasi yang relevan kepada perusahaan secara benar, jujur, dan lengkap **Tidak Ya**
- 1.2.3. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Tidak Ya**

**2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi**

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (*adjuster*), perusahaan berpedoman pada hak-hak sebagai berikut:

- 2.1 Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim **A B C D E**
- 2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian :
- 2.2.1. Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara perusahaan dengan pemegang polis **Tidak Ya**
- 2.2.2. Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi **Tidak Ya**
- 2.2.3. Mengambil kesimpulan atas pemeriksaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang polis **Tidak Ya**
- 2.2.4. Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak **Tidak Ya**
- 2.2.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan **Tidak Ya**

**3. Hubungan dengan Konsultan Aktuaria**

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan **A B C D E**
- 3.2. Perusahaan memastikan konsultan aktuaria yang ditunjuk :
- 3.2.1. Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga yang berwenang **Tidak Ya**
- 3.2.2. Independen terhadap perusahaan dan bebas dari kepentingan **Tidak Ya**

pemegang saham

3.2.3. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku **Tidak** **Ya**

3.2.4. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan **Tidak** **Ya**

**4. Hubungan dengan Agen Asuransi**

Dalam berhubungan dengan agen asuransi, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

4.1. Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian keagenan **A B C D E**

4.2. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam perjanjian keagenan berikut sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran. **Tidak** **Ya**

4.3. Memastikan bahwa agen yang ditunjuk :

4.3.1. Kompeten dalam mewakili perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang **Tidak** **Ya**

4.3.2. Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya. **Tidak** **Ya**

4.3.3. Menandatangani , melaksanakan dan mematuhi perjanjian keagenan dengan Perusahaan **Tidak** **Ya**

4.3.4. Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Perusahaan sesuai perjanjian **Tidak** **Ya**

4.3.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian **Tidak** **Ya**

4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada:

4.4.1. Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik yang berlaku **A B C D E**

4.4.2. Membentuk *sales compliance department* yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan salah seorang Direktur **A B C D E**

4.4.3. Mewajibkan *sales compliance department* memberikan laporan secara berkala kepada Direksi **A B C D E**

4.4.4 Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait setiap pelanggaran kode etik yang terjadi **A B C D E**

**5. Mitra Bisnis**

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan.

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

5.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan **A B C D E**

5.2. Memastikan bahwa perusahaan dan mitra bisnis :

5.2.1. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan **Tidak** **Ya**

wajar

5.2.2. Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak , kecuali dipersyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan **Tidak** **Ya**

5.2.3. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Tidak** **Ya**

**6. Masyarakat**

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 6.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat , termasuk program kemitraan dan bina lingkungan **A B C D E**
- 6.2. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan perusahaan terhadap masyarakat. **A B C D E**

**V.PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT**

**A.Underwriting**

- 1. Perusahaan memiliki kebijakan *underwriting* yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman *Underwriting* **A B C D E**
- 2. Pedoman *Underwriting* memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan kewenangan untuk setiap *underwriter*, *pricing* serta kapasitas pertanggung jawaban asuransi **A B C D E**
- 3. Dalam melakukan *underwriting* yang *prudent*, perusahaan :
  - 3.1. Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi **A B C D E**
  - 3.2. Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya, seperti : survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggung jawaban. **A B C D E**
  - 3.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan **A B C D E**
- 4. Perlindungan (*coverage*) yang diberikan oleh perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya *dispute* di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis **A B C D E**

**B.Klaim**

- 1. Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelesaian klaim asuransi **A B C D E**
- 2. Memastikan perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait dengan pertanggung jawaban ulang yang dilakukan perusahaan **A B C D E**
- 3. Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian (*adjuster*) independen apabila diperlukan **Tidak** **Ya**
- 4. Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam Pedoman Penyelesaian Klaim perusahaan **A B C D E**
- 5. Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang- undangan **A B C D E**

**C.Reasuransi dan retrosesi**

- 1. Perusahaan melakukan pertanggung jawaban ulang (reasuransi/retrosesi) untuk risiko yang melebihi atau di luar batas kemampuan **A B C D E**

perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pelaksanaan reasuransi/ retrosesi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung ulang, baik yang bersifat fakultatif maupun *treaty* **A B C D E**

**D. Kepatuhan**

1. Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan **Tidak Ya**
2. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (*compliance*) terhadap ketentuan peraturan-perundangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain **A B C D E**
3. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku **A B C D E**
4. Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan **A B C D E**
5. Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk **A B C D E**
6. Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan **A B C D E**
7. Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan **A B C D E**
8. Direktur yang membawahi fungsi teknik kepatuhan tidak merangkap teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran **A B C D E**

**E. Manajemen Risiko**

1. Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko **Tidak Ya**
2. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi :
- 2.1. Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, mengurangi dan memonitor risiko **A B C D E**
- 2.2. Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan **A B C D E**
- 2.3. Sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik **A B C D E**
- 2.4. Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan **A B C D E**
3. Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi *Asset and Liability Management (ALM)* yang dilaksanakan pada komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh perusahaan **A B C D E**
4. Perusahaan melaksanakan *Stress Test* terkait risiko dalam memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan. **A B C D E**
5. Perusahaan mengembangkan *Contingency Plans* khususnya untuk menanggulangi risiko-risiko yang diyakini bisa terjadi, seperti **A B C D E**

bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem teknologi informasi, kekosongan Direksi atau posisi manajemen kunci. Penyusunan *Contingency Plans* dilakukan melalui pendekatan yang berkesinambungan dan dikomunikasikan kepada karyawan melalui training.

**F. Audit Internal**

Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus :

- |   |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari sistem yang dimiliki Perusahaan | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 2. Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup material diaudit dalam jangka waktu yang memadai                                  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 3. Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil audit kepada Manajemen   | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 4. Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi dan Dewan Komisaris   | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 5. Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi pengendalian lainnya kepada manajemen.                                    | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 6. Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.                                      | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

**G. Auditor Eksternal**

- |   |              |           |
|---|--------------|-----------|
| 1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaan secara independen terhadap kebenaran laporan yang disajikan oleh Direksi | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| 2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di otoritas Pengawas   | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| 3. Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS.                                | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| 4. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris  | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| 5. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi  | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| 6. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan.   | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| 7. Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi  | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| 8. Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang diperlukan   | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| 9. Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit.  | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |
| 10. Penunjukan KAP diusulkan oleh komite audit kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS                           | <b>Tidak</b> | <b>Ya</b> |

**H. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)**

- |  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan perusahaan | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 2. Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan                                      | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 3. Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor   | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 4. Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |

setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor

	<b>Tidak langsung ke VI</b>	<b>Ya</b>
<b>I. Aktuaris Perusahaan</b>		
1. Perusahaan memiliki aktuaris perusahaan yang bertindak independen		
2. Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait :		
2.1. Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi yang disiapkan perusahaan	<b>A B C D E</b>	
2.2. Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko yang tepat	<b>A B C D E</b>	
2.3. Menilai manajemen risiko	<b>A B C D E</b>	
2.4. Testing kondisi keuangan	<b>A B C D E</b>	
2.5. Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban	<b>A B C D E</b>	
2.6. Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis	<b>A B C D E</b>	
2.7. Kecukupan premi dan nilai tunai	<b>A B C D E</b>	
2.8. <i>Management participating fund</i> , termasuk analisa pengaruh utama sebagai akibat strategi dan kebijakan	<b>A B C D E</b>	
2.9. Desain produk , mengurangi risiko dan kewajiban manajemen risiko lainnya	<b>A B C D E</b>	
3. Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan maupun unit operasional	<b>A B C D E</b>	
4. Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris yang ditunjuk.	<b>A B C D E</b>	
5. Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan struktur internal.	<b>A B C D E</b>	
6. Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis untuk dibagikan kepada <i>participating policyholders</i> , dengan memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai kelompok pemegang polis.	<b>A B C D E</b>	
7. Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang harus dilakukan perusahaan	<b>A B C D E</b>	
8. Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
<b>VI. PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG</b>		
1. Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.	<b>Tidak Ada</b>	<b>Ya</b>
2. Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi:		
2.1 Nama anggota Dewan Komisaris	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.2 Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.3 Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) tentang kinerja masing-masing Komisaris	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>
2.4 Penjelasan mengenai komite penunjang Dewan Komisaris		
2.4.1. Nama	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud g)

1) Pencegahan :

.....  
.....  
.....  
.....

2) Deteksi :

.....  
.....  
.....  
.....

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi :

.....  
.....  
.....  
.....

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut :

.....  
.....  
.....  
.....

PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN :

- a) Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perusahaan, atau lainnya.
- b) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- c) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- d) Tindakan Perusahaan merupakan respon Perusahaan atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- e) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Perusahaan yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perusahaan.
- f) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perusahaan terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.
- g) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

## 5. LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### a. Pernyataan Sesuai/Tidak Sesuai

#### Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Kami telah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha (*asuransi/reasuransi*\*) PT .... (“perusahaan”) terhadap penerapan prinsip syariah selama periode tanggal ..... sampai dengan tanggal ....., sebagaimana diamanatkan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang ....., Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas kegiatan usaha perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, produk asuransi syariah yang dipasarkan dan praktik pemasaran produk asuransi syariah.

Dari hasil pengawasan, diketahui bahwa (terdapat / tidak terdapat)\* praktik penyelenggaraan kegiatan usaha yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

Terkait dengan pelanggaran tersebut, Perusahaan (telah / belum)\* memperbaiki praktik pelanggaran kegiatan tersebut. Adapun praktik yang melanggar prinsip syariah adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Usaha yang Melanggar Prinsip Syariah	Periode Terjadi	Tindak Lanjut

(dicoret apabila tidak terdapat pelanggaran)\*.

Dengan demikian, praktik penyelenggaraan kegiatan usaha secara umum (sesuai / tidak sesuai)\* dengan prinsip prinsip syariah.

.....(Nama Kota),..... (Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah :

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1			
2			

dst			
-----	--	--	--

\*) Pilih salah satu pernyataan yang sesuai

**b. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat**

Kami telah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha (asuransi/reasuransi\*) PT .... (“perusahaan”) terhadap penerapan prinsip syariah selama periode tanggal ..... sampai dengan tanggal ....., sebagaimana diamanatkan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas kegiatan usaha perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, produk asuransi syariah yang dipasarkan dan praktik pemasaran produk asuransi syariah.

Perusahaan tidak memberikan akses kepada kami untuk memperoleh dokumen dan informasi yang kami perlukan untuk melakukan penilaian atas aspek- aspek pada paragraf 1 di atas, sehingga kami tidak memberikan pendapat atas penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan.

.....(Nama Kota),....(Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah:

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
dst			
1			
2			

\*) Pilih salah satu pernyataan yang sesuai

**Pengisian Kuesioner Hasil Pengawasan  
Dewan Pengawas Syariah**

*Pengisian dilakukan dengan cara memberikan pilihan jawab atas pertanyaan/ pernyataan dalam kuesioner dimaksud*

**A. Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban**

<u>Pokok Materi 1:</u> Sistem dan prosedur pengelolaan kekayaan dan kewajiban.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
---	--

<u>Pokok Materi 2:</u> Pemisahan pencatatan kekayaan dan kewajiban secara jelas dan tegas antara Dana <i>Tabarru'</i> , Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta, termasuk pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaannya dan kewajibannya yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam polis.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
--	--

<u>Pokok Materi 3:</u> Pembatasan penggunaan <i>Dana Tabarru'</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) POJK No. 72/POJK.05/2016	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
---	--

<u>Pokok Materi 4:</u> Pembentukan <i>Dana Tabarru'</i> (dibuat terpisah per lini usaha atau gabungan lini usaha) telah sesuai dengan akadnya.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
---	--

<u>Pokok Materi 5:</u> Pembentukan Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan akadnya.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
---	--

<u>Pokok Materi 6:</u> Pencatatan dan pengadministrasian akun peserta secara individual sebagai bagian dari kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
---	--

<u>Pokok Materi 7:</u> Pemberian dan pengembalian <i>Qardh</i> ke / dari <i>Dana Tabarru'</i> .	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
--	--

<u>Pokok Materi 8:</u> Pengelolaan kekayaan <i>Dana Tabarru'</i> , Dana Perusahaan dan Dana Investasi Peserta dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, misalnya kekayaan tersebut hanya ditempatkan pada bentuk instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
---	--

<u>Pokok Materi 9:</u> Penghitungan dan pembagian <i>surplus underwriting</i> sesuai dengan polis dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
--	--

<u>Pokok Materi 10:</u> Penyediaan <i>surplus underwriting</i> bagian peserta yang dimanfaatkan untuk dana sosial sesuai dengan prinsip syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
---	--

## B. Produk-produk Yang Dipasarkan

<u>Pokok Materi 1:</u> Sistem dan prosedur perancangan, penerbitan, pelaksanaan dan pemantauan produk-produk yang dipasarkan.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
--	--

<u>Pokok Materi 2:</u> Penyusunan dan pelaksanaan isi polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) / surat permohonan kepesertaan yang meliputi: a. Penggunaan akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> . b. Substansi minimum yang harus termuat dalam setiap akad. c. Metode pengalokasian dan pembagian <i>surplus underwriting</i> yang adil dan wajar bagi semua peserta. d. Pemberian <i>qard</i> oleh Perusahaan dan pembayaran kembali <i>qard</i> kepada Perusahaan.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
---	--

<p><u>Pokok Materi 3:</u>  Penetapan dan pembebanan besar <i>ujrah</i>/imbalan dalam pengelolaan risiko dengan penggunaan akad <i>wakalah bil ujah</i> yang tertuang di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 POJK nomor 69/POJK.05/2016.</p>	<p><u>Status Kesesuaian:</u>  Tidak            Ya</p>
--	---

<p><u>Pokok Materi 4:</u>  Penetapan dan pembebanan besar <i>ujrah</i>/imbalan dalam pengelolaan investasi dengan penggunaan akad <i>wakalah bil ujah</i> dan atau besar <i>nisbah</i>/bagi hasil dalam akad <i>mudharabah</i> dan akad <i>mudharabah musytarakah</i> yang tertuang di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 POJK nomor 69/POJK.05/2016.</p>	<p><u>Status Kesesuaian:</u>  Tidak            Ya</p>
---	---

<p><u>Pokok Materi 5:</u>  Pemungutan atau pembebanan biaya kepada Peserta sesuai dengan yang tercantum di dalam polis.</p>	<p><u>Status Kesesuaian:</u>  Tidak            Ya</p>
---	---

<p><u>Pokok Materi 6:</u>  Pelaksanaan prosedur <i>underwriting</i> untuk setiap produk dilakukan secara adil, wajar dan tidak diterapkan secara diskriminatif.</p>	<p><u>Status Kesesuaian:</u>  Tidak            Ya</p>
---	---

<p><u>Pokok Materi 7:</u>  Dalam hal pengelolaan investasi Dana <i>Tabarru</i>” menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i>, Perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.</p>	<p><u>Status Kesesuaian:</u>  Tidak            Ya</p>
---	---

### C. Praktik Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

<u>Pokok Materi 1:</u> Perusahaan, dalam hal ini para tenaga pemasar atau agen asuransi, telah memperoleh pelatihan mengenai produk yang dipasarkan serta telah memberikan penjelasan dengan benar, akurat dan lengkap kepada calon peserta, antara lain: a. Akad-akad yang disepakati. b. Kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
---	--

<u>Pokok Materi 2:</u> Setiap penerbitan polis harus dilengkapi dengan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) / surat permohonan kepesertaan yang diisi benar dan lengkap, ditandatangani peserta dan Perusahaan sebagai bentuk persetujuan ( <i>ijab qabul</i> ) atas akad-akad di dalam polis.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
--	--

<u>Pokok Materi 3:</u> Perjanjian Perusahaan dengan rekan bisnis, antara lain agen asuransi, pialang asuransi / reasuransi, penilai kerugian, reasuradur, dan pihak lainnya, dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
--	--

<u>Pokok Materi 4:</u> Praktik pemasaran produk dan pelayanan peserta tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya tidak memberikan <i>riswah</i> / suap dalam rangka pemasaran produk dan pelayanan Peserta.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
---	--

<u>Pokok Materi 5:</u> Pemberian komisi pemasaran dilakukan secara wajar, adil dan proporsional, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan perolehan bisnis / penutupan polis.	<u>Status Kesesuaian:</u> Tidak            Ya
--	--

## **B. Laporan Data Profil Risiko Asuransi**

*Laporan Data profil Risiko Asuransi ini berdasarkan ketentuan POJK 2/POJK.05/2015 Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi Dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor dan SEOJK 28/SEOJK.05/2015 Tentang Pelaporan Data Risiko Asuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukkan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIPETIR.*



**C. Laporan Penempatan Reasuransi**

**a. Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Reasuransi**

**LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI  
20XX**

A. Seluruh Lini  
Usaha Asuransi

dalam  
jutaan  
rupiah

No	Keterangan	Uang Pertanggungan (UP)				Premi		
		Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (Treaty)	Reasuransi Fakultatif	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (Treaty)	Reasuransi Fakultatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Retensi Sendiri							
	Dukungan Reasuradur Dalam Negeri							
B	Luar Negeri per Negara							
	1.							
	2.							
	3. ....							
	Sub Jumlah							
C	Total							

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Kolom (4) uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
3. Kolom (7) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi.
4. Kolom keterangan dukungan reasuradur dalam negeri diisi total dukungan reasuransi dalam negeri.
5. Kolom Keterangan luar negeri per negara diisi dengan nama negara reasuradur yang mengacu pada lokasi reasuradur, bukan *country of origin* reasuradur.



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

- Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
  2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
  3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
  4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
  5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
  6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

- 1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
- 2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
- 3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- 4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
- 5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
- 6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

- Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
  2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
  3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
  4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
  5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
  6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi





Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

**Keterangan:**

- 1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
- 2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
- 3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- 4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
- 5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
- 6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

- Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
  2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
  3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
  4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
  5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
  6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

- Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
  2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
  3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
  4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
  5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
  6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi





Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

- Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
  2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
  3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
  4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
  5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
  6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi





Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

**b. Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa**

**LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS  
TAHUN 20XX**

A. Semua Lini Usaha Asuransi

No	Keterangan	Uang Pertanggungan (UP)				Premi		
		Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (Treaty)	Reasuransi Fakultatif	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (Treaty)	Reasuransi Fakultatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Retensi Sendiri							
B	Dukungan Reasuradur Dalam Negeri							
	Luar Negeri per Negara							
	1.							
	2.							
	3. ....							
	Sub Jumlah							
C	Total							

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Kolom (4) uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (7) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Kolom keterangan dukungan reasuradur dalam negeri diisi total dukungan reasuransi dalam negeri
5. Kolom Keterangan luar negeri per negara diisi dengan nama negara reasuradur yang mengacu pada lokasi reasuradur, bukan *country of origin* reasuradur.



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi





Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

- Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
  2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
  3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
  4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
  5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
  6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi





Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

- Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
  2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
  3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
  4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
  5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
  6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi





Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi



Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis ( <i>Treaty</i> )				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	<i>Quota Share</i>	Surplus	Cath X/L	Work X/L	<i>Quota Share</i>	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

**Keterangan:**

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

**c. Laporan Aktuaris**

1. Pernyataan Aktuaris

<p>1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nama Perusahaan;</li><li>- Nama Aktuaris;</li><li>- Alamat Rumah dan Nomor Telepon;</li><li>- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;</li><li>- Tanggal Pengangkatan;</li><li>- Tempat dan Tanggal Lahir;</li><li>- Kualifikasi Profesi;</li><li>- Pengalaman Kerja (sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya).</li></ul> <p>1.2 Uraian atas prosedur-prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standard praktik yang sehat.</p> <p>1.3 Tanggung jawab Aktuaris Perusahaan atas laporan aktuaris tahunan.</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan pendapat profesional secara profesi aktuaris (<i>professional judgement</i>) dan telah menerapkan tes yang memadai;</li><li>2. Saya bertanggung jawab penuh atas laporan aktuaris tahunan ini secara keseluruhan; dan</li><li>3. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip aktuarial yang berlaku umum.</li></ol> <p>Tempat, tanggal pembuatan</p> <p>Ttd.</p> <p>Nama</p> <p>No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)</p> <p>No. Izin Aktuaris Publik:</p>
---

2. Pernyataan Direksi

<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur penentuan liabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. Informasi yang diberikan kepada Aktuaris Perusahaan dalam</li></ol>
---

laporan aktuaris tahunan PT ... tahun ... sudah akurat dan lengkap;  
dan

3. Telah memahami isi dari laporan aktuaris tahunan ini dan akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan aktuaris ini.

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan\*)

Ttd.

Nama

\*)Direksi yang berwenang sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan

### 3. Ikhtisar Eksekutif

Tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan, ikhtisar perubahan yang terjadi sejak laporan terakhir, kesimpulan utama (*key finding*) dari laporan termasuk perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan dan rekomendasi yang diberikan Aktuaris Perusahaan kepada Direksi.

### 4. Pendahuluan

1. latar belakang dan tujuan laporan;
2. ruang lingkup laporan;
3. dasar hukum laporan; dan
4. materialitas (*materiality*), ketergantungan (*reliance*), dan keterbatasan (*limitation*) dalam penyusunan laporan.

### 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi yang belum dilaksanakan termasuk adanya keterbatasan yang terjadi dan target waktu penyelesaian.

### 6. Kualitas Data

Kelengkapan data, keandalan data, prosedur yang telah dilakukan untuk meyakini kelengkapan dan keandalan data termasuk metode yang dilakukan dan kelemahan atas data tersebut.

7. Gambaran Bisnis Perusahaan

Pada bagian ini, aktuaris memberikan uraian mengenai informasi umum Perusahaan yang terdiri dari struktur dan operasional Perusahaan meliputi:

- a. Lini usaha atau produk yang dipasarkan

- b. Target pasar

- c. Saluran distribusi yang digunakan

8. Tingkat Kesehatan Keuangan Dan Kecukupan Modal

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

- a. Analisis kesehatan keuangan dan kecukupan permodalan

- b. Proyeksi kesehatan keuangan dan kecukupan modal

- c. Asumsi yang digunakan

d. Analisis akses Perusahaan terhadap kebutuhan modal

e. Analisis atas risiko Perusahaan terkait pembentukan aset bukan investasi

9. Penetapan Harga Premi Dan Profitabilitas

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

a. Kebijakan penetapan harga premi

b. Tinjauan atas *pricing policy*

c. Analisis realisasi biaya dan profitabilitas

d. Analisis profitabilitas untuk pertanggungan baru dan lama

e. Distribusi profit



f. Analisis historis profitabilitas

10. Liabilitas

a. Metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan

b. Pendapat aktuaris

11. Kesesuaian Aset Terhadap Liabilitas

12. Reasuransi

13. Manajemen Risiko

14. Proyeksi Keuangan

--

15. Area Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

--

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 /SEOJK.05/2021

TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI  
SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

**FORMAT II A**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

*Laporan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 15 ayat (5) dan pasal 19 POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November tahun sebelumnya.*

**LAPORAN RENCANA BISNIS**

**Tahun .....**

(diisi nama dan alamat perusahaan)

---

---

---

---

\_\_\_\_\_20xx

Disetujui,  
Dewan Komisaris

\_\_\_\_\_  
Direktur,

(Cap Perusahaan)

(Cap Perusahaan)

    N a m a J e l a s      
Jabatan

    N a m a J e l a s      
Jabatan

LAPORAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

- Format 1 : Ringkasan Eksekutif
- Format 2 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode  
Sebelumnya
- Format 3 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis
- Format 4 : Rencana Kegiatan Usaha
- Format 5 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha
- Format 6 : Rencana Investasi
- Format 7 : Rencana Permodalan
- Format 8 : Rencana Pendanaan
- Format 9 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor  
atau Saluran Distribusi
- Format 10 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia,  
dan/atau Teknologi Informasi
- Format 11 : Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan  
Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat
- Format 12 : Proyeksi Laporan Keuangan serta Asumsi Yang Digunakan
- Format 13 : Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya
- Format 14 : Informasi Lainnya

**Format 1: Ringkasan Eksekutif**

- a. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (satu tahun)<sup>1)</sup>  
 .....  
 .....  
 .....
- b. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga Tahun)<sup>1)</sup>  
 .....  
 .....  
 .....
- c. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 5 (Lima Tahun)<sup>1)</sup>  
 .....  
 .....  
 .....
- d. Indikator Keuangan Utama

*Diisi dalam jutaan rupiah*

No.	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi	
				Juni Tahun X	Desember Tahun X
<b>A.</b>	<b>Dana Perusahaan</b>				
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Penyisihan Teknis				
5	Qardh				
6	Ekuitas				
7	Ujroh atas kontribusi				
8	Beban Pemasaran				
9	Beban Akuisisi				
10	Beban Umum dan Administrasi				
11	Beban Pemasaran				
12	Hasil Investasi				
13	Laba (Rugi) Sebelum Pajak				
14	Laba (Rugi) Setelah Pajak				
15	Pendapatan Komprehensif Lain				
<b>B.</b>	<b>Dana Tabarru'</b>				
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Penyisihan Teknis				
5	Qardh				
6	Akumulasi Dana				

7	Kontribusi Tabarru & Tanahud				
8	Klaim Bruto				
9	Surplus (defisit) Underwriting				
10	Hasil Investasi				
<b>C.</b>	<b>Dana Tanahud</b>				
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Penyisihan Teknis				
5	Qardh				
6	Akumulasi Dana				
7	Kontribusi Tabarru & Tanahud				
8	Klaim Bruto				
9	Surplus (defisit) Underwriting				
10	Hasil Investasi				
<b>D.</b>	<b>Dana Investasi Peserta</b>				
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Hasil Investasi				
5	Akumulasi Dana Investasi Peserta				
6	Kontribusi Alokasi Dana Investasi Peserta				
7	Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
8	Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

e. Rasio Keuangan

No	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi tahun X	
				Juni X	Des X
<b>A.</b>	<b>Dana Perusahaan</b>				
1	Rasio Pencapaian Solvabilitas				
2	Rasio Likuiditas				
3	Rasio Beban Usaha				

	(Beban Usaha/Kontribusi Dana Perusahaan atau Ujroh)				
4	Rasio Beban Komisi				
5	<i>Return on Investment</i> (ROI)				
6	<i>Return on Equity</i> (ROE)				
<b>B.</b>	<b>Dana Tabarru' dan Dana Tanahud</b>				
1	Rasio Pencapaian Solvabilitas				
2	Rasio Kecukupan Investasi				
3	Rasio Likuiditas				
4	Rasio Beban Klaim (Netto)				
5	<i>Return on Investment</i> (ROI)				
<b>C.</b>	<b>Dana Investasi Peserta</b>				
1	Rasio Likuiditas				
2	<i>Return on Investment</i> (ROI)				

f. Uraian Mengenai Kondisi Keuangan Perusahaan

.....  
 .....  
 .....

*\*Uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan yang tercermin dari indikator keuangan dan rasio keuangan termasuk alasan peningkatan/penurunannya*

g. Uraian Mengenai Target Jangka Pendek Periode 1 (Satu Tahun1)

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

*Keterangan:*

*1) antara lain meliputi peningkatan efisiensi Perusahaan, penguatan permodalan, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan laba Perusahaan.*

**Format 2: Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya**

a. Perbandingan Antara Rencana Bisnis dengan Realisasi Rencana Bisnis Setiap Tahun (Abaikan jika perusahaan anda perusahaan baru).

*(Jabarkan secara detil rencana bisnis saat ini dan bagaimana dengan rencana bisnis setiap tahun). Pada bagian ini, Perusahaan dapat melihat kinerja Perusahaan pada periode tersebut dengan membandingkan antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis. Contoh tabel di bawah dapat dimodifikasi lebih detil sesuai kebutuhan Perusahaan.)*



No	Indikator	Juni 20XX-1		
		Rencana Bisnis	Realisasi	%
		(1)	(2)	(2-1)/1
<b>A.</b>	<b>Dana Perusahaan</b>			
	Ujroh atas kontribusi Diterima			
	Beban Usaha			
	Laba (Rugi) Setelah pajak			
	Rasio Pencapaian Solvabilitas			
	Rasio Likuiditas			
	Rasio Beban Usaha			
	Rasio Beban Komisi			
	<i>Return on Investment (ROI)</i>			
	<i>Return on Equity (ROE)</i>			
	<i>dst (tambahkan indicator lain yang dianggap perlu)</i>			
<b>B.</b>	<b>Dana Tabarru'</b>			
	Kontribusi Tabarru & Tanahud			
	Klaim Bruto			
	Surplus Underwriting			
	Rasio Pencapaian Solvabilitas			
	Rasio Kecukupan Investasi			
	Rasio Likuiditas			
	Rasio Beban klaim (Netto)			
	<i>Return on Investment (ROI)</i>			
	<i>Return on Equity (ROE)</i>			
	<i>dst (tambahkan indicator lain yang dianggap perlu)</i>			
<b>C.</b>	<b>Dana Tanahud</b>			
	Kontribusi Tabarru & Tanahud			
	Klaim Bruto			
	Surplus Underwriting			
	Rasio Pencapaian Solvabilitas			
	Rasio Kecukupan Investasi			
	Rasio Likuiditas			
	Rasio Beban klaim (Netto)			
	<i>Return on Investment (ROI)</i>			
	<i>Return on Equity (ROE)</i>			
	<i>dst (tambahkan indicator lain yang dianggap perlu)</i>			
<b>D.</b>	<b>Dana Investasi Peserta</b>			
	Kontribusi Dana Investasi Peserta			
	Total Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta			
	Rasio Likuiditas			
	<i>Return on Investment (ROI)</i>			
	<i>Return on Equity (ROE)</i>			

No	Indikator	Juni 20XX-1		
		Rencana Bisnis	Realisasi	%
		(1)	(2)	(2-1)/1
	<i>dst (tambahkan indikator lain yang dianggap perlu)</i>			

b. Kendala Yang Dihadapi

.....  
.....  
.....

*\* Nyatakan secara jelas kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana bisnis yang telah ditetapkan*

c. Upaya Pemecahan Masalah

.....  
.....  
.....

*\* Nyatakan secara jelas solusi dari pemecahan masalah*

**Format 3: Visi, Misi, Dan Strategi Bisnis**

a. Visi Perusahaan \*

.....  
.....  
.....

*\* Visi merupakan gambaran kondisi perusahaan di masa yang akan datang dan merupakan cita-cita perusahaan. Visi merupakan suatu pernyataan untuk menjawab pertanyaan arah Perusahaan ke depan.*

b. Misi Perusahaan

.....  
.....  
.....

*\* Misi merupakan penjabaran dari visi yang menjabarkan kondisi lingkungan dan kondisi pasar yang ada serta antisipasi perusahaan ke depan.*

c. Strategi Bisnis Perusahaan

1. analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha

.....  
.....  
.....

2. arah kebijakan Perusahaan

.....  
.....  
.....

3. kebijakan manajemen (*policy statements*)

.....  
.....  
.....

4. strategi pengembangan bisnis

.....  
.....  
.....

**Format 4: Rencana Kegiatan Usaha \***

\* Rencana mengenai kegiatan usaha yang pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan usaha masing Perusahaan dan izin usaha serta persetujuan kegiatan usaha Perusahaan kepada OJK. Dapat ditambahkan dengan alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana dimaksud dan strategi untuk merealisasikan rencana dimaksud.

a. Rencana Pengembangan Produk dan Pemasaran Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi atau Rencana Pengembangan Program Pertanggung Ulang bagi Perusahaan Reasuransi untuk 1 (Satu) Tahun Ke Depan.

No	Usulan Nama Produk Baru	Lini Usaha/Cabang Asuransi	Saluran Pemasaran	Rencana penerbitan/Waktu pelaksanaan
1				
2				
Dst.				

b. Alasan dan Pertimbangan

.....  
.....  
.....

c. Strategi

.....  
.....  
.....

**Format 5: Rencana Pengembangan Atau Perluasan Kegiatan Usaha**

No	Jenis Kegiatan Usaha	Des-kripsi Umum Kegiatan Usaha	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha	Keterkaitan Kegiatan Usaha Baru dengan Strategi Bisnis Perusahaan	Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha

*Keterangan:*

1. Rencana Pengembangan Atau Perluasan Kegiatan Usaha meliputi rencana pelaksanaan kegiatan usaha asuransi lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dilaporkan kepada OJK.
2. Sesuai dengan Pasal 4 POJK 69/2016 tentang Penyelenggaraan usaha, dapat diisi mengenai perluasan ruang lingkup usaha asuransi misalnya asuransi umum pada kegiatan PAYDI, fee based, dan penugasan lain dari pemerintah.

**Format 6: Rencana Investasi**

a. Komposisi Investasi

*Dalam jutaan rupiah*

No.	Jenis investasi	Aktual Per 30 sept 20xx-1	Proyeksi Per 31 des 20xx-1	Proyeksi	
				Tahun ke-1	
				Per 30 Jun 20xx	Per 31 Des 20xx
<b>A.</b>	<b>Dana Perusahaan</b>				
1.	(d disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
	Dst				
<b>B.</b>	<b>Dana Tabarru'</b>				
1.	(d disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
	Dst				

<b>C.</b>	<b>Dana Tanahud</b>				
1.	(d disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					
<b>D.</b>	<b>Dana Investasi Peserta</b>				
1.	(d disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					

Informasi strategi investasi yang dapat ditambahkan antara lain:

1. Target total return investasi dari setiap instrumen untuk year on year (%)
2. Sektor penempatan investasi (perbankan syariah, properti, dan lain lain)
3. Kapitalisasi (big capitalization, medium capitalization, small capitalization)
4. Strategi investasi (konservatif, agresif, atau mix)

b. Hasil Investasi

No.	Jenis investasi	Aktual Per 30 sept 20xx-1	Proyeksi Per 31 des 20xx-1	Proyeksi	
				Tahun ke-1	
				Per 30 Jun 20xx	Per 31 Des 20xx
<b>A.</b>	<b>Dana Perusahaan</b>				
1.	(d disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					
<b>B.</b>	<b>Dana Tabarru'</b>				
1.	(d disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					
<b>C.</b>	<b>Dana Tanahud</b>				
1.	(d disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					

<b>D.</b>	<b>Dana Investasi Peserta</b>				
1.	(d disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					

**Format 7: Rencana Permodalan**

*(Rencana permodalan paling sedikit meliputi rencana perubahan modal termasuk rencana penambahan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru, rencana penambahan modal melalui pasar modal dan rencana penambahan modal lain. Perusahaan dapat menggunakan format tabel di bawah jika tidak mempunyai format baku. Contoh tabel di bawah berlaku bagi perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi jiwa/perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi jiwa/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.)*

a. Proyeksi Permodalan

URAIAN <i>(Dana Perusahaan)</i>	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
POSISI MODAL				
Pemegang Saham	<i>(diisi dgn nominal)</i>			
1. -----				
2. -----				
3. ----- (dst)				
IPO (Initial Public Offering)-Go Public				
Penerbitan saham baru				
Lainnya (seperti pinjaman subordinasi)				
Total Modal Disetor				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

b. Rencana Perubahan Modal

1) Uraian Mengenai Rencana Perubahan Modal

.....  
.....  
.....

\* *diisi dengan rencana perubahan permodalan disertai dengan rencana besaran nominal serta rencana waktu pelaksanaan perubahan permodalan dimaksud*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....  
.....  
.....

\* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana perubahan permodalan*

3) Strategi

.....  
.....  
.....

\* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana perubahan permodalan*

**Format 8: Rencana Pendanaan**

a) Uraian Mengenai Rencana Pendanaan

.....  
.....  
.....

\* *diisi dengan rencana berdasarkan sumber pendanaan yang akan diperoleh Perusahaan dalam 1 tahun kedepan. Sumber pendanaan dimaksud dapat berasal dari qardh atau penerbitan efek melalui penawaran umum.*

b) Alasan dan Pertimbangan

.....  
.....  
.....

\* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan*

c) Strategi

.....  
.....  
.....

\* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan*

**Format 9: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi**

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.

No	Jenis kantor	Waktu pelaksanaan 1	Perkiraan Investasi / Biaya	Lokasi 2	Keterangan 3
<b>A. Pembukaan</b>					
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi syariah, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
2	Kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi syariah, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
<b>B. Perubahan Alamat</b>					
1					
2					
Dst					
<b>C. Penutupan</b>					
1					
2					
Dst					

**Keterangan:**

1. Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
2. Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
3. Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.
4. Khusus untuk kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim, diinformasikan tenaga ahli yang akan mengisi kantor tersebut.



**Format 10: Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi**

a. Rencana Pengembangan Organisasi

1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi

.....  
 .....  
 .....

*\* diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....  
 .....  
 .....

*\* diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi*

3) Strategi

.....  
 .....  
 .....

*\* diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi*

b. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

No	Level Jabatan	Jumlah SDM per 30 Sept 20XX-1	Des 20xx-1		Juni 20XX		Desember 20XX	
			(+)*	(-)*	(+)*	(-)*	(+)*	(-)*
1								
2								
Ds t								
Total								

*\* diisi penambahan dan pengurangan jumlah pegawai*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....  
 .....  
 .....

*\* diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia*

3) Strategi

.....  
 .....  
 .....

*\* diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia*

c. Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai

1) Tabel Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia

No	Materi	Metode Diklat	Perkiraan Waktu Diklat	Durasi Diklat	Tempat	Narasumber / Lembaga Diklat	Jumlah Seluruh Peserta	Biaya Diklat
1								
2								
Dst								

2) Alasan dan Pertimbangan

.....  
 .....

*\* diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia*

3) Strategi

.....  
 .....

*\* diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia*

d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1) Tabel Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada) / Jumlah Tenaga Kerja Asing	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan	Alasan <sup>1)</sup>
1.							
2.							
3.							
...							

Keterangan:

1) *diisi mengenai alasan pemanfaatan tenaga kerja asing dan alasan mengapa tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....  
 .....

\* diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing

3) Strategi

.....  
 .....  
 .....

\* diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penggunaan tenaga kerja asing

e. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					
...					

2) Alasan dan Pertimbangan

.....  
 .....  
 .....

\* diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya

3) Strategi

.....  
 .....  
 .....

\* diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya

f. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar, termasuk Informasi Mengenai Biaya Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi

.....  
 .....  
 .....

No	Jenis>Nama Aplikasi	Kepemilikan (Inhouse/vendor)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi

2) Alasan dan Pertimbangan

.....  
 .....  
 .....

\* diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar

3) Strategi

.....  
 .....  
 .....

\* diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar

**Format 11: Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat**

a. Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

LAPORAN RENCANA KEGIATAN  
 DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN  
 PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)  
 ... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana
1	Nama Kegiatan	... (diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)
2	Tujuan Kegiatan	... (diisi dengan tujuan kegiatan yang akan dicapai oleh PUJK)
3	Bentuk Pelaksanaan	<p><b>Edukasi Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sosialisasi</li> <li><input type="checkbox"/> Workshop</li> <li><input type="checkbox"/> Konsultasi</li> <li><input type="checkbox"/> Pendampingan</li> <li><input type="checkbox"/> Simulasi</li> <li><input type="checkbox"/> Training of Community</li> <li><input type="checkbox"/> Outreach program</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><b>Pengembangan Infrastruktur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Training of trainers</li> <li><input type="checkbox"/> Training of facilitators</li> <li><input type="checkbox"/> Pengembangan e-learning</li> <li><input type="checkbox"/> Pengembangan website</li> <li><input type="checkbox"/> Pengembangan aplikasi mobile</li> </ul>

		<input type="checkbox"/> Penyusunan/ pengembangan modul/ materi Edukasi Keuangan <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) <b>Kategori</b> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)		
4	Metode Pelaksanaan dan Metode serta Sarana Pengukuran	<b>Metode Pelaksanaan</b>  <b>Langsung</b> <input type="checkbox"/> Tatap muka <input type="checkbox"/> Siaran langsung dengan sarana: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)	<b>Metode Pengukuran</b>  <b>Edukasi Keuangan</b> <input type="checkbox"/> Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ( <i>pre dan post test</i> ) <input type="checkbox"/> Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: <input type="checkbox"/> manfaat, <input type="checkbox"/> kemudahan materi dipahami, <input type="checkbox"/> kesesuaian dengan sasaran, <input type="checkbox"/> lainnya: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)  <b>Pengembangan Infrastruktur SDM</b> <input type="checkbox"/> Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ( <i>pre dan post test</i> ) <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)  <b>Non-SDM</b>	<b>Sarana Pengukuran</b>  <input type="checkbox"/> Tertulis <input type="checkbox"/> Media elektronik <input type="checkbox"/> Sistem online <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)

			<input type="checkbox"/> Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur <input type="checkbox"/> Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu <input type="checkbox"/> Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>	
		<p><b>Metode Pelaksanaan</b></p> <p><b>Tidak langsung,</b> melalui media</p> <input type="checkbox"/> Elektronik: ... <i>(sebutkan)</i> <input type="checkbox"/> Cetak <input type="checkbox"/> Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i>	<p><b>Metode Pengukuran</b></p> <p><b>Edukasi Keuangan</b></p> <input type="checkbox"/> Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ( <i>pre dan post test</i> ) <input type="checkbox"/> Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: <input type="checkbox"/> manfaat, <input type="checkbox"/> kemudahan materi dipahami, <input type="checkbox"/> kesesuaian dengan sasaran, <input type="checkbox"/> lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <input type="checkbox"/> Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu <input type="checkbox"/> Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> <p><b>Pengembangan Infrastruktur SDM</b></p> <input type="checkbox"/> Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ( <i>pre dan post test</i> )	<p><b>Sarana Pengukuran</b></p> <input type="checkbox"/> Tertulis <input type="checkbox"/> Media elektronik <input type="checkbox"/> Sistem online <input type="checkbox"/> Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i>

			<input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <b>Non-SDM</b> <input type="checkbox"/> Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur <input type="checkbox"/> Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)	
		Kategori <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)		
5	Materi	<p>a. <b>Pengelolaan Keuangan</b>, meliputi:</p> <input type="checkbox"/> Identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan <input type="checkbox"/> Tujuan pengelolaan keuangan <input type="checkbox"/> Tahapan dalam pengelolaan keuangan <input type="checkbox"/> Pencatatan aset/harta yang dimiliki <input type="checkbox"/> Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (budgeting), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan <input type="checkbox"/> Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <p><b>b. Jenis industri jasa keuangan dan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan</b></p> <p><b>Jenis industri jasa keuangan:</b></p> <input type="checkbox"/> Perbankan <input type="checkbox"/> Pasar modal <input type="checkbox"/> Perasuransian <input type="checkbox"/> Dana pensiun <input type="checkbox"/> Lembaga pembiayaan <input type="checkbox"/> Lembaga penjaminan <input type="checkbox"/> Pergadaian <input type="checkbox"/> Lembaga jasa keuangan lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)		

		<p><b>Karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan, meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Manfaat</li> <li><input type="checkbox"/> Biaya</li> <li><input type="checkbox"/> Risiko</li> <li><input type="checkbox"/> Hak konsumen</li> <li><input type="checkbox"/> Kewajiban konsumen</li> <li><input type="checkbox"/> Cara mengakses atau memperoleh</li> <li><input type="checkbox"/> Informasi mekanisme transaksi</li> <li><input type="checkbox"/> Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya ... (sebutkan)</li> </ul> <p><b>c. Perpajakan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan</li> </ul> <p><b>Kategori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Baru</li> <li><input type="checkbox"/> Lanjutan</li> </ul> <p><i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i></p>
6	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pekerja informal</li> <li><input type="checkbox"/> Petani</li> <li><input type="checkbox"/> Nelayan</li> <li><input type="checkbox"/> Guru</li> <li><input type="checkbox"/> Dosen</li> <li><input type="checkbox"/> Penyuluh</li> <li><input type="checkbox"/> Profesional: ... (sebutkan)</li> <li><input type="checkbox"/> Karyawan</li> <li><input type="checkbox"/> Pedagang</li> <li><input type="checkbox"/> Pelaku UMKM</li> <li><input type="checkbox"/> Perempuan</li> <li><input type="checkbox"/> Pelajar</li> <li><input type="checkbox"/> Mahasiswa</li> <li><input type="checkbox"/> Pemuda</li> <li><input type="checkbox"/> Pensiunan</li> <li><input type="checkbox"/> Tenaga Kerja Indonesia (TKI)</li> <li><input type="checkbox"/> Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</li> <li><input type="checkbox"/> Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI)</li> <li><input type="checkbox"/> Disabilitas</li> <li><input type="checkbox"/> Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan)</li> <li><input type="checkbox"/> Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar</li> </ul>



		<input type="checkbox"/> Komunitas: ... <i>(sebutkan)</i> <input type="checkbox"/> Masyarakat umum <input type="checkbox"/> Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>  <b>Kategori</b> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>
7	Jumlah Peserta	<p style="text-align: center;">... orang</p> <i>(diisi dengan jumlah peserta)</i>
8	Jadwal Pelaksanaan :	<p>Dimulai ... selesai ...</p> <i>(diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)</i>
9	Wilayah Pelaksanaan	<b>Provinsi</b> <input type="checkbox"/> Aceh <input type="checkbox"/> Bali <input type="checkbox"/> Banten <input type="checkbox"/> Bengkulu <input type="checkbox"/> Gorontalo <input type="checkbox"/> DKI Jakarta <input type="checkbox"/> Jambi <input type="checkbox"/> Jawa Barat <input type="checkbox"/> Jawa Tengah <input type="checkbox"/> Jawa Timur <input type="checkbox"/> Kalimantan Barat <input type="checkbox"/> Kalimantan Selatan <input type="checkbox"/> Kalimantan Tengah <input type="checkbox"/> Kalimantan Timur <input type="checkbox"/> Kalimantan Utara <input type="checkbox"/> Kepulauan Bangka Belitung <input type="checkbox"/> Kepulauan Riau <input type="checkbox"/> Lampung <input type="checkbox"/> Maluku <input type="checkbox"/> Maluku Utara <input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Barat <input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Timur <input type="checkbox"/> Papua <input type="checkbox"/> Papua Barat <input type="checkbox"/> Riau

		<input type="checkbox"/> Sulawesi Barat <input type="checkbox"/> Sulawesi Selatan <input type="checkbox"/> Sulawesi Tengah <input type="checkbox"/> Sulawesi Tenggara <input type="checkbox"/> Sulawesi Utara <input type="checkbox"/> Sumatera Barat <input type="checkbox"/> Sumatera Selatan <input type="checkbox"/> Sumatera Utara <input type="checkbox"/> DI Yogyakarta <input type="checkbox"/> Seluruh Indonesia <i>(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)</i>  <b>Kabupaten/Kota</b> ... <i>(diisi apabila ada)</i>  <b>Wilayah Lainnya</b> ... <i>(diisi apabila ada)</i>  <b>Kategori</b> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>
10	Frekuensi Pelaksanaan	... kali
11	Sumber Biaya	<input type="checkbox"/> Anggaran edukasi keuangan <input type="checkbox"/> Anggaran CSR <input type="checkbox"/> Anggaran lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>
12	Jumlah Biaya (dalam rupiah)	... <i>(diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan)</i>
13	Parameter Pemantauan :	<b>Edukasi Keuangan</b> <input type="checkbox"/> Kesesuaian bentuk kegiatan <input type="checkbox"/> Kesesuaian materi <input type="checkbox"/> Kesesuaian sasaran peserta <input type="checkbox"/> Kesesuaian jumlah peserta <input type="checkbox"/> Lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>

		<p><b>Pengembangan Infrastruktur SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kesesuaian bentuk kegiatan</li> <li><input type="checkbox"/> Kesesuaian materi</li> <li><input type="checkbox"/> Kesesuaian sasaran peserta</li> <li><input type="checkbox"/> Kesesuaian jumlah peserta</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><b>Non-SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kesesuaian tahapan pengembangan infrastruktur</li> <li><input type="checkbox"/> Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p>
14	Bentuk Pemantauan	<p><i>(mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kunjungan langsung</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p>
15	Parameter Evaluasi	<p><b>Edukasi Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pengetahuan</li> <li><input type="checkbox"/> Keterampilan</li> <li><input type="checkbox"/> Kepercayaan</li> <li><input type="checkbox"/> Sikap</li> <li><input type="checkbox"/> Perilaku</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p> <p><b>Pengembangan Infrastruktur SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><b>Non-SDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: ... (sebutkan)</li> <li><input type="checkbox"/> Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</li> </ul> <p><i>(dapat diisi lebih dari satu)</i></p>
16	Bentuk Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola</li> <li><input type="checkbox"/> Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan</li> <li><input type="checkbox"/> Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</li> <li><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)</li> </ul>
17	Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1),</li> <li>2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst.</li> </ol> </li> <li><input type="checkbox"/> Bekerja sama dengan pihak lain:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1),</li> <li>2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Informasi lainnya:</b> Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan. ... (deskripsi)</p>

Tabel 2  
Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terencana dan Terukur	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 – 12 serta 13 – 14 dan/atau 15 – 16
2	Berorientasi pada Pencapaian	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11
3	Berkelanjutan	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi Kategori “Lanjutan” pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9
4	Kolaborasi	Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 17 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/atau pihak lain..

b. Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

LAPORAN RENCANA KEGIATAN  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN  
PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)  
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1	Ruang Lingkup Kegiatan	<input type="checkbox"/> Perluasan Akses <input type="checkbox"/> Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
2	Nama Kegiatan	... <i>(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)</i>	
3	Bentuk Pelaksanaan	<p><b>Perluasan Akses</b></p> <input type="checkbox"/> Penambahan jaringan kantor <input type="checkbox"/> Penambahan kerja sama dengan pihak lain <input type="checkbox"/> Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <p><b>Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan</b></p> <input type="checkbox"/> Penciptaan skema: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
4	Sasaran	<input type="checkbox"/> Pekerja informal <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> Institusi pendidikan <p><b>Kategori</b></p> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	

		<input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Pedagang <input type="checkbox"/> Pelaku UMKM <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Pemuda <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Tenaga Kerja Indonesia (TKI) <input type="checkbox"/> Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) <input type="checkbox"/> Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) <input type="checkbox"/> Disabilitas <input type="checkbox"/> Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Masyarakat daerah tertinggal, terpinggirkan, dan terluar <input type="checkbox"/> Komunitas: ... (sebutkan) <input type="checkbox"/> Masyarakat umum <input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>  <b>Kategori</b> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
5	Target Pengguna	... pengguna <i>(diisi dengan jumlah pengguna)</i>	
6	Jadwal	Dimulai ... selesai ... <i>(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)</i>	
7	Wilayah	<b>Provinsi</b> <input type="checkbox"/> Aceh <input type="checkbox"/> Bali <input type="checkbox"/> Banten <input type="checkbox"/> Bengkulu <input type="checkbox"/> Gorontalo <input type="checkbox"/> DKI Jakarta <input type="checkbox"/> Jambi <input type="checkbox"/> Jawa Barat <input type="checkbox"/> Jawa Tengah <input type="checkbox"/> Jawa Timur <input type="checkbox"/> Kalimantan Barat	

		<input type="checkbox"/> Kalimantan Selatan <input type="checkbox"/> Kalimantan Tengah <input type="checkbox"/> Kalimantan Timur <input type="checkbox"/> Kalimantan Utara <input type="checkbox"/> Kepulauan Bangka Belitung <input type="checkbox"/> Kepulauan Riau <input type="checkbox"/> Lampung <input type="checkbox"/> Maluku <input type="checkbox"/> Maluku Utara <input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Barat <input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Timur <input type="checkbox"/> Papua <input type="checkbox"/> Papua Barat <input type="checkbox"/> Riau <input type="checkbox"/> Sulawesi Barat <input type="checkbox"/> Sulawesi Selatan <input type="checkbox"/> Sulawesi Tengah <input type="checkbox"/> Sulawesi Tenggara <input type="checkbox"/> Sulawesi Utara <input type="checkbox"/> Sumatera Barat <input type="checkbox"/> Sumatera Selatan <input type="checkbox"/> Sumatera Utara <input type="checkbox"/> DI Yogyakarta <input type="checkbox"/> Seluruh Indonesia <i>(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)</i>  <b>Kabupaten/Kota</b> ... <i>(diisi apabila ada)</i>  <b>Wilayah Lainnya</b> ... <i>(diisi apabila ada)</i>  <b>Kategori</b> <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lanjutan <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	
8	Parameter	<b>Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan</b> <input type="checkbox"/> Penambahan jaringan kantor <input type="checkbox"/> Penambahan kerja sama dengan pihak lain	

	<p><input type="checkbox"/> Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat</p> <p><input type="checkbox"/> Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</p> <p><b>Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</p> <p><b>Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Penambahan jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/ rekening pensiun</p> <p><input type="checkbox"/> Penambahan jumlah transaksi</p> <p><input type="checkbox"/> Penambahan jumlah polis asuransi</p> <p><input type="checkbox"/> Penambahan jumlah sertifikat penjaminan</p> <p><input type="checkbox"/> Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura</p> <p><input type="checkbox"/> Penambahan jumlah transaksi gadai</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</p> <p><b>Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat</b></p> <p><input type="checkbox"/> Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya</p> <p><input type="checkbox"/> Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan)</p>	
--	--	--



		(dapat diisi lebih dari satu)	
9	Bentuk Pemantauan	<p><b>Bentuk Pemantauan</b> (mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)</p> <p><input type="checkbox"/> Lapangan</p> <p><input type="checkbox"/> Melalui laporan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)</p> <p><b>dilakukan secara</b> (mengacu pada bentuk pemantauan)</p> <p><input type="checkbox"/> Bulanan</p> <p><input type="checkbox"/> Triwulanan</p> <p><input type="checkbox"/> Tahunan</p> <p><input type="checkbox"/> Periode lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)</p>	
10	Evaluasi	<p><input type="checkbox"/> Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan</p> <p><input type="checkbox"/> Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya</p> <p><input type="checkbox"/> Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan</p> <p><input type="checkbox"/> Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)</p>	
12	Keterangan	<p><input type="checkbox"/> Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain:</p> <p>1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1),</p> <p>2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst.</p> <p><input type="checkbox"/> Bekerja sama dengan pihak lain:</p> <p>1. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1),</p> <p>2. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), dst.</p> <p><b>Informasi lainnya:</b></p>	

		<i>Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan. ... (deskripsi)</i>	
--	--	--	--

Tabel 2  
Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terukur	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10</i>
2	Terjangkau	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8</i>
3	Tepat Sasaran	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5</i>
4	Berkelanjutan	<i>Otomatis terisi apabila PUJK mengisi "Kategori" pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7</i>

**Format 12: Proyeksi Laporan Keuangan dan Asumsi Yang Digunakan**

- a. Proyeksi Posisi Keuangan  
1) Untuk Dana Perusahaan

*(dalam jutaan rupiah)*

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
<b>I. ASET</b>				
1. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksa Dana Syariah				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan				
16. Penyertaan Langsung				
17. Properti Investasi				
18. Emas Murni				
19. Sukuk Daerah				
20. Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
21. Investasi Lain				
2. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan				
3. Aset Reasuransi				
4. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan				
5. Property Bukan Investasi				
6. Aset Lain				
<b>3. LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
A. Liabilitas				
1. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
2. Utang lain				
3. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan ujroh				
b. Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi				
B. Qardh				
C. Ekuitas Dana				
1. Modal Disetor				
2. Agio/Disagio Saham				
3. Saldo Laba				
4. Komponen Ekuitas Lainnya.				

2) Untuk Dana *Tabarru'*

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
<b>I. ASET</b>				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10.Reksadana Syariah				
11.Efek Beragun Aset Syariah				
12.Dana Investasi Real Estate Syariah				
13.REPO				
14.Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15.Emas Murni				
16.Sukuk Daerah				
17.Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
18.Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan				
3. Aset Reasuransi				
4. Aset Lain				
<b>II. LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				
4. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan kontribusi				
b. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan				
c. Penyisihan Klaim				
d. Penyisihan atas risiko bencana				
B. Qardh				
C. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. Komponen Ekuitas Lainnya.				

3) Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
<b>I. ASET</b>				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksa Dana Syariah				
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15. Emas Murni				
16. Sukuk Daerah				
17. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
18. Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
2. Tagihan				
3. Aset Lain				
<b>II. LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				
B. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. <i>Profit Equalization Reserve</i> (PER)				
3. Komponen Ekuitas Lainnya.				

b. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

1) Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
<b>I. PENDAPATAN</b>				
1. PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
4. Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi				
5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Ujroh)				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
2. Kontribusi Reasuransi/ Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				
PENDAPATAN <i>UNDERWRITING</i>				
Surplus <i>underwriting</i> untuk dana Perusahaan				
<b>2. BEBAN USAHA:</b>				
1. Beban Pemasaran				
2. Beban Akuisisi				
3. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
4. Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
5. Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

2) Untuk Dana *Tabarru'*

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
<b>I. PENDAPATAN</b>				
1. PENDAPATAN INVESTASI				



URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta ( <i>Tabarru</i> )				
2. Kontribusi Reasuransi/ Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				
4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
<b>2. BEBAN</b>				
1. BEBAN UNDERWRITING				
2. Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Jumlah Beban Klaim Netto				
3. Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
<b>3. JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>				
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

3) Untuk Dana Tanahud

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
<b>I. PENDAPATAN</b>				
1. PENDAPATAN INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
1. Kontribusi Peserta (Tabarru')				
2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				
4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
<b>2. BEBAN</b>				
1. BEBAN UNDERWRITING				
1. Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
Jumlah Beban Klaim Netto				
2. Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
<b>3. JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>				
a. Surplus				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

4) Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20X X-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
<b>I. PENDAPATAN</b>				
1. PENDAPATAN INVESTASI DAN KONTRIBUSI ALOKASI INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
4. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Alokasi Investasi)				
<b>2. BEBAN</b>				
1. BEBAN UNDERWRITING				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20X X-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
1. Beban Klaim				
a. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
b. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)				
Jumlah Beban Klaim				
Surplus underwriting untuk Peserta				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

c. Proyeksi Arus Kas

1) Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Ujroh yang diterima				
2. Kontribusi Peserta				
3. Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Beban Akuisisi				
2. Beban Pemasaran				
3. Pembayaran Ujroh Reasuransi				

4. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
5. Pembayaran Sewa				
6. Pembayaran Zakat				
7. Pembayaran Pajak				
8. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabarru'				
3. Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta				
4. Pencairan Investasi				
5. Penjualan Aktiva Tetap				
6. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Pembelian Aktiva Tetap				
3. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Setoran Modal/Modal Kerja				
2. Pinjaman Subordinasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
2. Pembayaran Dividen				
3. Lain-lain				

2) Untuk Dana *Tabarru'*

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				

1. Kontribusi Para Peserta				
2. Klaim Reasuransi Diterima				
3. Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
3. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
4. Pembayaran Ujroh Asuransi				
5. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
6. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Qardh				
2. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				

1. Pembayaran Qardh				
2. Lain-lain				

3) Untuk Dana Tanahud

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Kontribusi Para Peserta				
2. Klaim Reasuransi Diterima				
3. Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
3. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
4. Pembayaran Ujroh Asuransi				
5. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
6. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				



3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Qardh				
2. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran Qardh				
2. Lain-lain				

4) Untuk Dana Investasi Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Kontribusi Para Peserta				
2. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
3. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo				
4. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				

1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujjroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
ARUS KAS DARI AKTIVTIAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
1. Lain-lain				
Arus Kas Keluar				
1. Lain-lain				

d. Asumsi Yang Digunakan

No	URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
				Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1	Nilai tukar rupiah				
2	Tingkat inflasi				
3	Kerugian katastropik (dalam rupiah)				
4	Tingkat hasil investasi				
5	Jumlah pertanggungan baru (dalam premi rupiah)				
6	Tingkat penghentian polis ( polis yang dihentikan/jumlah polis di awal periode)				
7	Tingkat klaim (klaim bruto/premi bruto)				
8	dst (asumsi lain yang relevan)				

**Format 13: Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya**

a. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

1) **Untuk Dana Perusahaan**

(dalam jutaan rupiah)  
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
<b>A. Rasio Solvabilitas</b>				
1. Tingkat Solvabilitas				
a. Aset yang diperkenankan (AYD)				
b. Liabilitas				
2. Modal Minimum Berbasis Risiko				
3. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
4. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)				
5. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)				
6. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana <i>Tabarru'</i> dan Tanahud				
a. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				
b. Ketidacukupan investasi, kas dan bank				
7. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan				
<b>B. Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas</b>				
1. Rasio Likuiditas				
a. Kekayaan lancar				
b. Kewajiban lancar				
c. Rasio (a:b)				
2. Rasio Pendapatan investasi neto				
a. Pendapatan investasi netto				
b. Rata-rata investasi				
c. Rasio (a:b)				
3. Rasio perubahan dana				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
a. Dana Perusahaan Periode berjalan				
b. Dana Perusahaan Periode lalu				
c. Perubahan dana Perusahaan (a-b)				
d. Rasio (c:b)				
4. Rasio Aset Unit Syariah				
a. Aset Dana <i>Tabarru</i> dan Dana Tanahud				
b. Aset Dana Investasi Peserta				
c. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)				
d. Rasio (a+b) : (a+b+c)				

2) **Untuk Dana *Tabarru***

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
<b>A. Rasio Solvabilitas</b>				
1. Tingkat Solvabilitas				
a. Aset yang diperkenankan (AYD)				
b. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan				
2. Dana Tabaru dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko				
3. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
4. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)				
5. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)				
6. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana <i>Tabarru</i> dan Tanahud				
a. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
b. Ketidacukupan investasi, kas dan bank				
7. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud				
<b>B. Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas</b>				
1. Rasio Likuiditas				
a. Kekayaan lancar				
b. Kewajiban lancar				
c. Rasio (a:b)				
2. Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
a. Investasi, kas dan bank				
b. Penyisihan teknis				
c. Utang klaim retensi sendiri				
d. Rasio [a:(b+c)]				
3. Rasio Pendapatan investasi netto				
a. Pendapatan investasi netto				
b. Rata-rata investasi				
c. Rasio (a:b)				
4. Rasio beban klaim				
a. Beban klaim netto				
b. Kontribusi netto				
c. Rasio (a:b)				
5. Rasio perubahan dana				
a. Dana Tabarru dan Tanahud Periode berjalan				
b. Dana Tabarru dan Tanahud Periode lalu				
c. Perubahan dana (a-b)				
d. Rasio (c:b)				
6. Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana <i>Tabarru</i>				
a. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
b. Jumlah Aset				
c. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				
7. Penghitungan Qardh yang				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Diperlukan Dana <i>Tanahud</i>				
a. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
b. Jumlah Aset				
c. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				

### 3) Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)  
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	URAIAN	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. Rasio Likuiditas				
a. Kekayaan lancar				
b. Kewajiban lancar				
c. Rasio (a:b)				
2. Rasio Pendapatan investasi neto				
a. Pendapatan investasi netto				
b. Rata-rata investasi				
c. Rasio (a:b)				
3. Rasio perubahan dana				
a. Dana Investasi Peserta Periode berjalan				
b. Dana Investasi Peserta Periode lalu				
c. Perubahan dana (a-b)				
d. Rasio (c:b)				

#### Format 14: Informasi Lainnya

Informasi lainnya meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.

Contoh:

1. rencana merger, akuisisi dan konsolidasi;

2. rencana pengalihan portofolio pertanggungan;
3. rencana perubahan bidang usaha perasuransian;
4. rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah; dan
5. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
6. Update Rencana Spin Off unit syariah termasuk menyebutkan tahun akan dilakukan spin off dan proses penyusunan rencana kerja spin off.

**A. Rencana Penyertaan Langsung**

2. Rincian Rencana Penyertaan Langsung

Nama Perusahaan Anak	Kinerja	Proyeksi		
	September 20XX-1	Desember 20XX-1	Juni 20XX	Desember 20XX

3. Alasan dan Pertimbangan

.....  
 .....  
 ...

*\* diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penyertaan langsung*

4. Strategi

.....  
 .....  
 ...

*\* diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penyertaan langsung*

**B. Rencana Penggabungan, Peleburan dan/atau Pemisahan**

1. Rencana Penggabungan

a. Keterangan mengenai rencana penggabungan:

Perusahaan yang menggabungkan diri:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Perusahaan yang menerima penggabungan: .....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....  
 .....  
 .....

*\* diisi dengan alasan/pertimbangan penggabungan*

c. Strategi

.....  
.....  
.....

\* diisi dengan strategi penggabungan

2. Rencana Peleburan

a. Keterangan mengenai rencana peleburan

Perusahaan yang meleburkan diri:

1) .....

2) .....

3) .....

Perusahaan setelah peleburan: ....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....  
.....  
.....

\* diisi dengan alasan/pertimbangan peleburan

c. Strategi

.....  
.....  
.....

\* diisi dengan strategi peleburan

3. Rencana Pemisahan

a. Keterangan mengenai rencana peleburan

Perusahaan yang meleburkan diri:

1) .....

2) .....

3) .....

Perusahaan setelah peleburan: ....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....  
.....  
.....

\* diisi dengan alasan/pertimbangan pemisahan

c. Strategi

.....  
.....  
.....

\* diisi dengan strategi pemisahan



**C. Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi Menjadi Perusahaan**

1. Penjelasan

.....  
.....  
*\* diisi dengan penjelasan mengenai rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak menjadi Perusahaan, termasuk mengenai alasan penghewntian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadiPerusahaan*

2. Alasan dan Pertimbangan

.....  
.....  
*\* diisi dengan alasan/pertimbangan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan*

3. Strategi

.....  
.....  
*\* diisi dengan strategi penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan*

**D. Rencana Konversi Perusahan Asuransi Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah**

1. Keterangan mengenai rencana konversi:

Perusahaan hasil konversi: .....

2. Alasan dan Pertimbangan

.....  
.....  
.....  
*\* diisi dengan alasan/pertimbangan konversi*

3. Strategi

.....  
.....  
.....  
*\* diisi dengan strategi konversi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah*

**E. Rencana Pembentukan, Penutupan, atau Pemisahaan UUS**

1. Rencana Pembentukan UUS

a. Keterangan mengenai rencana pembentukan:

UUS hasil pembentukan: .....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....  
.....  
*\* diisi dengan alasan/pertimbangan pembentukan UUS*

c. Strategi

.....  
.....  
.....  
*\* diisi dengan strategi pembentukan UUS*

2. Rencana Penutupan UUS

a. Keterangan mengenai rencana penutupan:  
UUS yang ditutup: .....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....  
.....  
.....\* *diisi dengan alasan/pertimbangan penutupan UUS*

c. Strategi

.....  
.....  
.....\* *diisi dengan strategi penutupan UUS*

3. Rencana Pemisahan UUS

a. Keterangan mengenai rencana pemisahan UUS:  
UUS yang memisahkan diri: .....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....  
.....  
.....\* *diisi dengan alasan/pertimbangan pemisahan UUS*

c. Strategi

.....  
.....  
.....\* *diisi dengan strategi pemisahan UUS*

**FORMAT IIB**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

*Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat satu bulan setelah semester bersangkutan berakhir*

**LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS**

**Tahun .....**

(diisi nama dan alamat perusahaan)

---

---

---

---

Disetujui,  
Dewan Komisaris

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s  
Jabatan

---

Direktur,

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s  
Jabatan

**A. Penjelasan Mengenai Pencapaian Rencana Bisnis**

*Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:*

1. realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4;
2. realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 5;
3. realisasi atas rencana komposisi investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
4. realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam angka 7;
5. realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 8;
6. realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9;
7. realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 10;
8. Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam format 11;
9. realisasi atas proyeksi laporan keuangan serta Asumsi Yang Digunakan sebagaimana dimaksud dalam format 12

**B. Penjelasan Mengenai Deviasi atas Realisasi Rencana Bisnis**

1. Realisasi Keuangan Untuk Laporan Posisi Keuangan

a) **Untuk Dana Perusahaan**

*(dalam jutaan rupiah)*

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
<b>I. ASET</b>				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksa Dana Syariah				
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama				

dengan Pihak Lain				
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan				
16. Penyertaan Langsung				
17. Properti Investasi				
18. Emas Murni				
19. Sukuk Daerah				
20. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
21. Investasi Lain				
<b>B. Bukan Investasi</b>				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan Ujrah Penutupan Langsung				
3. Tagihan Ujrah Penutupan Tidak Langsung				
4. Tagihan Hasil Investasi				
5. Tagihan Investasi				
6. Aset Reasuransi				
7. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan				
8. Property Bukan Investasi				
9. Aset Lain				
<b>II. LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>A. Liabilitas</b>				
1. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
2. Utang lain				
3. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan ujroh				
b. Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi				
<b>B. Qardh</b>				
<b>C. Ekuitas Dana</b>				
1. Modal Disetor				
2. Agio/Disagio Saham				
3. Saldo Laba				
4. Komponen Ekuitas Lainnya.				

b) **Untuk Dana Tabarru'**

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
<b>I. ASET</b>				
<b>A. Investasi</b>				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Syariah Negara				

7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksa dana Syariah				
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15. Emas Murni				
16. Sukuk Daerah				
17. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
18. Investasi Lain				
<b>B. Bukan Investasi</b>				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung				
3. Tagihan Kontribusi Penutupan Tidak Langsung				
4. Tagihan Reasuransi				
5. Tagihan Kontribusi Koasuransi				
6. Tagihan Recovery Klaim Reasuransi				
7. Tagihan Hasil Investasi				
8. Tagihan Investasi				
9. Aset Reasuransi				
10. Aset Lain				
<b>II. LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>A. Liabilitas</b>				
1. Utang klaim dan manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				
4. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan kontribusi				
b. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan				
c. Penyisihan Klaim				
d. Penyisihan atas risiko bencana				
<b>B. Qardh</b>				
<b>C. Ekuitas Dana</b>				
1. Akumulasi Dana				
2. Komponen Ekuitas Lainnya.				

c) **Untuk Dana Tanahud**

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
<b>I. ASET</b>				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10.Reksa dana Syariah				
11.Efek Beragun Aset Syariah				
12.Dana Investasi Real Estate Syariah				
13.REPO				
14.Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15.Emas Murni				
16.Sukuk Daerah				
17.Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
18.Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung				
3. Tagihan Kontribusi Penutupan Tidak Langsung				
4. Tagihan Reasuransi				
5. Tagihan Kontribusi Koasuransi				
6. Tagihan Recovery Klaim Reasuransi				
7. Tagihan Hasil Investasi				
8. Tagihan Investasi				
9. Aset Reasuransi				
10.Aset Lain				
<b>II. LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				

4. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan kontribusi				
b. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan				
c. Penyisihan Klaim				
d. Penyisihan atas risiko bencana				
B. Qardh				
C. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. Komponen Ekuitas Lainnya.				

**d) Untuk Dana Investasi Peserta**

*(dalam jutaan rupiah)*

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
<b>I. ASET</b>				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksadana Syariah				
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15. Emas Murni				
16. Sukuk Daerah				
17. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
18. Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan Hasil Investasi				
3. Tagihan Investasi				
4. Aset Lain				
<b>II. LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				



A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				
B. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. <i>Profit Equalization Reserve</i> (PER)				
3. Komponen Ekuitas Lainnya.				

2. Realisasi Keuangan untuk Laba/Rugi Komprehensif

**a) Untuk Dana Perusahaan**

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
<b>I. PENDAPATAN</b>				
1. PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
4. Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi				
5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Ujroh)				
2. Kontribusi Reasuransi/ Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
<b>2. BEBAN USAHA:</b>				
1. Beban Pemasaran				
2. Beban Akuisisi				
3. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
4. Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
5. Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

**b) Untuk Dana Tabarru'**

*(dalam jutaan rupiah)*

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
<b>I. PENDAPATAN</b>				
1. PENDAPATAN INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
2. PENDAPATAN				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Tabarru')				
2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				
4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
<b>2. BEBAN</b>				
1. BEBAN UNDERWRITING				
2. Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
Jumlah Beban Klaim Netto				
3. Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
<b>3. JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

**c) Untuk Dana Tanahud**

*(dalam jutaan rupiah)*

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
<b>I. PENDAPATAN</b>				
1. PENDAPATAN INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Tabarru')				
2. Kontribusi Reasuransi/ Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
<b>2. BEBAN</b>				
1. BEBAN UNDERWRITING				
1. Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
Jumlah Beban Klaim Netto				
2. Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
<b>3. JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>				
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
LABA (RUGI) USAHA				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

**d) Untuk Dana Investasi Peserta**

*(dalam jutaan rupiah)*

URAIAN	Rencana Bisnis	Real isasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
<b>I. PENDAPATAN</b>				
1. PENDAPATAN INVESTASI DAN KONTRIBUSI ALOKASI INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
4. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Alokasi Investasi)				
<b>2. BEBAN</b>				
1. BEBAN UNDERWRITING				
1. Beban Klaim				
a. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
b. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)				
Jumlah Beban Klaim				
Surplus underwriting untuk Peserta				

URAIAN	Rencana Bisnis	Real isasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

3. LAPORAN ARUS KAS

**a) Untuk Dana Perusahaan**

*(Dalam jutaan rupiah)*

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Ujroh yang diterima				
2. Kontribusi Peserta				
3. Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Beban Akuisisi				
2. Beban Pemasaran				
3. Pembayaran Ujroh Reasuransi				
4. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
5. Pembayaran Sewa				
6. Pembayaran Zakat				
7. Pembayaran Pajak				

8. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'				
3. Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta				
4. Pencairan Investasi				
5. Penjualan Aktiva Tetap				
6. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Pembelian Aktiva Tetap				
3. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Setoran Modal/Modal Kerja				
2. Pinjaman Subordinasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
2. Pembayaran Dividen				
3. Lain-lain				



**b) Untuk Dana Tabarru'**

(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	Renca na Bisnis	Realisa si	Deviasi	
			Rupi ah	%
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Kontribusi Para Peserta				
2. Klaim Reasuransi Diterima				
3. Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
3. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
4. Pembayaran Ujroh Asuransi				
5. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
6. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				

3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Qardh				
2. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran Qardh				
2. Lain-lain				

**c) Untuk Dana Tanahud**

*(dalam jutaan rupiah)*

Uraian	Renca na Bisnis	Realisa si	Deviasi	
			Rupi ah	%
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Kontribusi Para Peserta				
2. Klaim Reasuransi Diterima				
3. Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Pembayaran				

Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
3. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
4. Pembayaran Ujroh Asuransi				
5. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
6. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Qardh				
2. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran Qardh				
2. Lain-lain				

**d) Untuk Dana Investasi Perusahaan**

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana a Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Kontribusi Para Peserta				
2. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
3. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo				
4. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
ARUS KAS DARI AKTIVTIAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
1. Lain-lain				
Arus Kas Keluar				
1. Lain-lain				

\* Deviasi Rupiah = Realisasi – Rencana  
 Deviasi (%) = (Realisasi/Rencana)x100%

**C. Tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis**

.....  
 .....  
 .....

**D. Rasio Keuangan Dan Pos-Pos Tertentu**

1. Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

a) **Untuk Dana Perusahaan**

(dalam jutaan rupiah)  
 (rasio dalam persentase)

	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
<b>I. Rasio Solvabilitas</b>				
A. Tingkat Solvabilitas				
1. Aset yang diperkenankan (AYD)				
2. Liabilitas				
B. Modal Minimum Berbasis Risiko				
C. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
D. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)				
E. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Diperyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)				
F. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana <i>Tabarru'</i> dan Tanahud				
1. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				
2. Ketidacukupan investasi, kas dan bank				
G. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan				
<b>II. Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas</b>				
A. Rasio Likuiditas				
1. Kekayaan lancar				
2. Kewajiban lancar				
3. Rasio (a:b)				
B. Rasio Pendapatan investasi neto				
1. Pendapatan investasi netto				
2. Rata-rata investasi				
3. Rasio (a:b)				
C. Rasio perubahan dana				
1. Dana Perusahaan Periode berjalan				

2. Dana Perusahaan Periode lalu				
3. Perubahan dana Perusahaan (a-b)				
4. Rasio (c:b)				
D. Rasio Aset Unit Syariah				
1. Aset Dana <i>Tabarru</i> dan Dana Tanahud				
2. Aset Dana Investasi Peserta				
3. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)				
4. Rasio (a+b) : (a+b+c)				

b) **Untuk Dana *Tabarru*'**

(dalam jutaan rupiah)  
(rasio dalam persentase)

	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
<b>I. Rasio Solvabilitas</b>				
A. Tingkat Solvabilitas				
1. Aset yang diperkenankan (AYD)				
2. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan				
B. Dana Tabaru Minimum Berbasis Risiko				
C. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
D. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)				
E. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Diperkirakan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)				
F. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana <i>Tabarru</i> ' dan Tanahud				
1. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				
2. Ketidacukupan investasi, kas dan bank				
G. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan				
<b>II. Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas</b>				
A. Rasio Likuiditas				
1. Kekayaan lancar				
2. Kewajiban lancar				
3. Rasio (a:b)				
B. Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				

1. Investasi, kas dan bank				
2. Penyisihan teknis				
3. Utang klaim retensi sendiri				
4. Rasio [a:(b+c)]				
C. Rasio Pendapatan investasi netto				
1. Pendapatan investasi netto				
2. Rata-rata investasi				
3. Rasio (a:b)				
D. Rasio beban klaim				
1. Beban klaim netto				
2. Kontribusi netto				
3. Rasio (a:b)				
E. Rasio perubahan dana				
1. Dana Tabarru dan Tanahud Periode berjalan				
2. Dana Tabarru dan Tanahud Periode lalu				
3. Perubahan dana (a-b)				
4. Rasio (c:b)				
F. Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana <i>Tabarru</i>				
1. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
2. Jumlah Aset				
3. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				
G. Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana <i>Tanahud</i>				
1. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
2. Jumlah Aset				
3. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				

c) **Dana Investasi Peserta**

(dalam jutaan rupiah)  
(rasio dalam persentase)

	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. Rasio Likuiditas				
1. Kekayaan lancar				
2. Kewajiban lancar				
3. Rasio (a:b)				
II. Rasio Pendapatan investasi netto				
1. Pendapatan investasi netto				
2. Rata-rata investasi				
3. Rasio (a:b)				
II. Rasio perubahan dana				

1. Dana Investasi Peserta Periode berjalan				
2. Dana Investasi Peserta Periode lalu				
3. Perubahan dana (a-b)				
4. Rasio (c:b)				

**E. Informasi Lainnya**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*\* Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya.*

*Contoh:*

- a. realisasi atas rencana merger, akuisisi dan konsolidasi;*
- b. realisasi atas rencana pengalihan portofolio pertanggung;*
- c. realisasi atas rencana perubahan bidang usaha perasuransian;*
- d. realisasi atas rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah.*
- e. realisasi terkini atas rencana spin off unit syariah dan penjelasan mengenai realisasi/proses penyusunan rencana kerja spin off.*



**FORMAT II C**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

*Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (5) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November tahun sebelumnya.*

**LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS**

**Tahun .....**

(diisi nama dan alamat perusahaan)

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20xx

Dewan Komisaris

(Cap Perusahaan)

N a m a   J e l a s

Jabatan

*(diisi penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Perusahaan, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Perusahaan.*

**FORMAT II D**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS**

*Bentuk dan susunan Laporan Program Reasuransi/Retroseksi Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi atau Retroseksi.*

**FORMAT III E**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**LAPORAN PENGADUAN KONSUMEN DAN TINDAK LANJUT PELAYANAN DAN  
PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

*Bentuk dan susunan Laporan Pengaduan Konsumen Dan Tindak Lanjut Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.*

**FORMAT II F**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA  
KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

*Bentuk dan susunan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Bagi Konglomerasi Keuangan*

**FORMAT II G**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

*Bentuk dan susunan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi  
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan  
mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola  
Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan*

**FORMAT II H**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**LAPORAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI**

*Bentuk dan susunan Laporan Profil Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi Bagi Konglomerat Keuangan*

**FORMAT II I**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**LAPORAN KECUKUPAN PERMODALAN TERINTEGRASI**

*Bentuk dan susunan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan*



**FORMAT II J**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**LAPORAN RENCANA KEGIATAN PENGKINIAN DATA DAN LAPORAN REALISASI  
PENGKINIAN DATA NASABAH**

*Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Pengkinian  
Data Nasabah Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan*

**FORMAT II K**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**LAPORAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA AUDIT ATAS INFORMASI KEUANGAN HISTORIS TAHUNAN**

*Bentuk dan susunan laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.*

**FORMAT II L**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI KOMITE AUDIT TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBERIAN JASA AUDIT ATAS INFORMASI KEUANGAN HISTORIS TAHUNAN  
OLEH AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

*Bentuk dan susunan laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan*

**FORMAT II M**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN**

*Bentuk dan susunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan ini berdasarkan ketentuan POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukkan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.*

**FORMAT III N**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**RENCANA TINDAK YANG MERUPAKAN TINDAK LANJUT DARI HASIL PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN**

*Bentuk dan susunan rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Perusahaan ini berdasarkan ketentuan POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukkan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.*

**FORMAT III O**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**PELAKSANAAN RENCANA TINDAK**

*Bentuk dan susunan pelaksanaan rencana tindak berdasarkan ketentuan POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukkan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.*

**FORMAT II P**

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN**

*Bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan triwulanan dan tahunan  
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai  
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi*





B. Laporan Triwulanan

Bingkisan Laporan Keuangan  
PT .....  
Triwulan ... Tahun ...

Laporan Posisi Keuangan (Balance Sheet) table with columns for assets and liabilities.

Laporan Kinerja Keuangan (Income Statement) table with columns for income, expenses, and profit.

PERKAPAN TINGKAT SOLVABILITAS (Solvency Ratio Table) table with columns for various financial ratios.

PERKAPAN TINGKAT SOLVABILITAS (Solvency Ratio Table) table with columns for various financial ratios.

BASIS KELUARAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS (Other Basis Solvability Table) table with columns for various financial ratios.

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Basis Keuangan Sebagai Solvabilitas merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum  
ttd  
Mufla Asmawidjaja